



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025



**MENGAKSELERASI TRANSFORMASI DAN MEMPERKUAT
RESPONS KEBIJAKAN UNTUK STABILITAS DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN**



Burung Garuda sebagai lambang negara tidak hanya sebagai simbol kedaulatan negara, namun juga mencerminkan kekuatan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dengan penuh optimisme serta semangat untuk terus berkarya dan berinovasi. Sulur emas memiliki makna semangat kuat dalam bersinergi guna mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Garis digital merepresentasikan transformasi teknologi dan digitalisasi dalam menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Nuansa warna merah, biru, dan emas melambangkan semangat, keberanian, serta kejayaan dalam menghadapi tantangan global serta mencapai kemakmuran menuju Indonesia Emas 2045.



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN
WEWENANG, SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025

Laporan Kelembagaan Bank Indonesia - Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia adalah laporan kinerja kelembagaan yang disusun sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB 1 Kelembagaan Bank Indonesia	1
1.1. Profil Bank Indonesia	2
1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia	3
1.3. Organisasi Bank Indonesia	12
1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia	16
BAB 2 Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia	18
2.1. Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional	22
2.2. Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan	26
BAB 3 Respons Kebijakan Bank Indonesia	28
3.1. <i>Stance</i> Kebijakan Bank Indonesia	30
3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia	31
BAB 4 Transformasi Bank Indonesia	34
4.1. Transformasi Kebijakan	36
4.2. Transformasi Kelembagaan	48
BAB 5 Capaian Kinerja Bank Indonesia	58
PS 01 Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter dan Bauran Kebijakan Bank Indonesia Secara Berkelanjutan, Konsisten, dan Transparan untuk Mencapai Stabilitas Nilai Rupiah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	60
PS 02 Memperkuat Sinergi Bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan Kebijakan Fiskal dan Reformasi Struktural Pemerintah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	64

PS 03	Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan serta Surveilans Makroprudensial untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	68
PS 04	Memperkuat Sinergi Kebijakan serta Pengawasan Makroprudensial dengan KSSK dan Otoritas Terkait untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	71
PS 05	Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran, serta Pelindungan Konsumen, untuk Memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	75
PS 06	Memperkuat Sinergi Kebijakan, Pengawasan, dan Pelindungan Konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan Otoritas terkait untuk Percepatan Ekonomi dan Keuangan Digital dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	79
PS 07	Mengatur, Mengawasi, dan Mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valas untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Memperkuat Sinergi dengan Otoritas Terkait untuk Pengembangan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Ekonomi	84
PS 08	Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Pengembangan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau, baik secara Konvensional maupun Berdasarkan Prinsip Syariah, serta Memperkuat Sinergi dan Koordinasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	91
PS 09	Merumuskan Kebijakan dan Melaksanakan Kerjasama Internasional dengan Bank Sentral, Organisasi, dan Lembaga Internasional untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Bersinergi dengan Pemerintah dan Otoritas Lain dalam rangka Memperjuangkan Kepentingan Nasional	97
PS 10	Merumuskan dan Implementasi Bauran Kebijakan Kelembagaan dengan Kepemimpinan Profesional dan Tata Kelola yang Baik untuk Mencapai Kinerja Unggul	102
PS 11	Merumuskan dan Implementasi Kebijakan Komunikasi dan Pengaturan Hukum untuk Memperkuat Akuntabilitas, Transparansi, dan Kredibilitas Bank Indonesia	106
PS 12	Merencanakan, Mengembangkan, dan Mengelola Aset Fisik dan Aset Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Pengadaan dan Pengelolaan Program untuk Mendukung Pencapaian Kinerja Kelembagaan Optimal	107
Lampiran		112
Daftar Istilah		114
Daftar Singkatan		123
Daftar Tabel		
Tabel 1.	Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia per Desember 2025 dan 2024	105
Tabel 2.	Laporan Surplus Defisit Bank Indonesia periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 dan 2024	106

KATA PENGANTAR



PERRY WARJIYO
GUBERNUR BANK INDONESIA

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala (SWT), Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode tahun 2025. Sebagai bagian dari Laporan Kelembagaan Bank Indonesia, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Laporan ini disusun sebagai perwujudan dari komitmen Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang kredibel dalam mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada 2025, kebijakan tarif sepihak oleh Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya ketegangan geopolitik telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi global yang semakin terfragmentasi. Pertumbuhan ekonomi global 2025 tumbuh 3,4% dan diperkirakan melambat pada 2026 dan 2027. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan ekonomi negara maju dan *emerging economies* tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Akibatnya, penurunan inflasi dunia berjalan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi berdampak pada pergeseran aliran modal keluar dari *Emerging Market Economies (EMEs)*. Di pasar valuta asing, indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara utama dunia (DXY) cenderung tetap tinggi, disertai

dengan volatilitas yang tetap tinggi. Hal ini mencerminkan perbedaan imbal hasil antarnegara tetap tinggi di tengah kebijakan moneter bank-bank sentral yang secara umum tetap akomodatif, dengan kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan kecepatan dan waktu penurunan suku bunga kebijakannya.

Kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap berkinerja baik dan menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat di tengah tingginya gejolak ekonomi dan geopolitik global. Kinerja ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di *Emerging Market Economies (EMEs)*, dengan pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabilitas yang terjaga. Inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ serta nilai tukar Rupiah terkendali didukung komitmen kuat Bank Indonesia. Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga dengan kondisi permodalan perbankan yang kuat dan risiko kredit bermasalah yang rendah di tengah pertumbuhan kredit yang perlu terus didorong. Digitalisasi sistem pembayaran meningkat pesat sehingga menopang ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional dan secara keseluruhan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Namun demikian, perekonomian domestik masih dihadapkan pada tantangan, yaitu penyaluran kredit perbankan yang perlu terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, didukung dengan pendalaman pasar keuangan untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan ekonomi, serta transformasi sektor riil untuk memperkuat struktur ekonomi.

Di tengah tantangan lingkungan strategis tahun 2025 yang semakin berat, Bank Indonesia terus memperkuat dan mengarahkan seluruh bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian guna mendukung dan bersinergi erat dengan Program Asta Cita Pemerintah. *Pertama*, penurunan suku bunga kebijakan moneter BI-Rate sebanyak 5 (lima) kali dengan total penurunan sebesar 125 bps menjadi 4,75% pada Desember 2025, level terendah sejak 2022. *Kedua*, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional dari dampak gejolak global. *Ketiga*, ekspansi likuiditas moneter melalui strategi operasi moneter *pro-market* untuk makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas). *Keempat*, pembelian Surat

Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder sejalan dengan kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan suku bunga BI-Rate dan ekspansi likuiditas moneter. *Kelima*, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada perbankan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas Pemerintah dalam Asta Cita. *Keenam*, akselerasi sistem pembayaran digital terus ditempuh dan diarahkan untuk mempercepat ekonomi-keuangan digital nasional dalam rangka mendorong efisiensi, produktivitas, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian. Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, juga terus diperluas dengan dukungan 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia.

Sepanjang 2025, Bank Indonesia juga memperkuat berbagai inisiatif transformasi guna merespons lingkungan strategis yang berkembang. Transformasi kebijakan diarahkan pada penguatan kerangka kerja dan pengaturan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UU. Transformasi kelembagaan juga terus diperkuat dan dipertajam, terutama dalam rangka mengimplementasikan mandat UU P2SK, dengan berfokus pada tiga area utama. *Pertama*, penguatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi, selaras, dan lengkap. *Kedua*, penguatan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan melalui penyempurnaan *business process re-engineering* berbasis digital yang mengutamakan *collaborative work*

dan didukung pemanfaatan *Artificial Intelligence*. *Ketiga*, penguatan sumber daya manusia melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan kapabilitas baru, dan penguatan *Employee Value Proposition* (EVP). Lebih lanjut, Bank Indonesia akan senantiasa memperkuat tata kelola kebijakan dan kelembagaan untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat, dan transparan.

Sepanjang 2025, Bank Indonesia mampu mencatatkan kinerja yang tinggi dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melampaui target. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai inisiatif transformasi dan respons kebijakan yang tepat, serta ditopang oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah baik di pusat maupun daerah, dan otoritas terkait. Di tengah tantangan perekonomian global dan domestik yang semakin berat, serta tuntutan implementasi dari amanat UU P2SK, konsistensi penerapan kebijakan yang kredibel dan tata kelola yang baik, inovasi yang berkelanjutan, dan sinergi erat yang dilakukan Bank Indonesia telah menghasilkan persepsi dan dukungan positif dari mitra kerja.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas mulia dalam menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia Tahun 2025 ini dapat menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menyusun langkah bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan keberkahan, kesempurnaan, dan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

Jakarta, 9 Juni 2026

Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo



FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur

JUDA AGUNG
Deputi Gubernur

PERRY WARJIYO
Gubernur



DESTRY DAMAYANTI
Deputi Gubernur Senior

AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur

RICKY P. GOZALI
Deputi Gubernur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia

Dinamika geopolitik dunia yang cepat berubah telah memengaruhi perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2025. Ketidakpastian global tetap tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas perang dagang dan berlanjutnya ketegangan geopolitik. Pengumuman dan implementasi tarif sepihak oleh Amerika Serikat (AS) yang direspons dengan tindakan balasan dari sejumlah negara besar mendorong eskalasi perang dagang antarnegara. Selain itu, ketegangan geopolitik juga terus berlanjut, antara lain akibat belum meredanya perang Rusia-Ukraina serta meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah seiring peningkatan serangan Israel ke Palestina. Kebijakan tarif AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dengan divergensi antarnegara yang semakin melebar. Kebijakan tarif menurunkan volume dan nilai perdagangan global serta menimbulkan gangguan pada rantai pasok dunia. Selanjutnya, dampak terhadap aktivitas ekonomi juga terlihat pada memburuknya sentimen konsumen dan produsen akibat ketidakpastian pendapatan dan keberlangsungan usaha. Meski demikian, peningkatan investasi sektor teknologi termasuk *artificial intelligence* (AI) di AS dan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya menahan perlambatan perekonomian dunia tahun 2025 yang lebih dalam. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi global tahun 2025 tumbuh sebesar 3,4% dan diperkirakan melambat pada 2026 dan 2027 yang disertai dengan divergensi pertumbuhan antarnegara.

Pengenaan tarif yang lebih tinggi juga berdampak pada penurunan inflasi dunia yang berjalan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Perkembangan tersebut mendorong bank-bank sentral cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kecepatan dan waktu penurunan suku bunga kebijakannya meskipun secara umum arah kebijakan moneter global sepanjang 2025 tetap bersifat akomodatif. Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang mulai menurunkan Fed Fund Rate (FFR) menjadi 4,50% pada September 2024, menunda penurunan berikutnya hingga September 2025 menjadi 4,25%, lalu pada Oktober 2025 menjadi 4,00% dan terakhir pada Desember 2025 menjadi 3,75%. Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang disertai dengan tetap tingginya tekanan inflasi global

berdampak negatif pada keyakinan para pelaku ekonomi dan investor di berbagai negara. Perkembangan tersebut menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan global tetap tinggi sehingga meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor melakukan realokasi portofolio ke aset-aset investasi yang dianggap aman (*safe-haven assets*), khususnya obligasi AS dan komoditas emas. Sejalan dengan itu, indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara utama dunia (DXY) cenderung tinggi meskipun disertai dengan volatilitas yang tinggi. Sementara itu, aliran modal ke *Emerging Market Economies* (EMEs) terbatas sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uangnya. Tingginya ketidakpastian perekonomian global sepanjang 2025 memerlukan peningkatan kewaspadaan serta penguatan respons bauran kebijakan guna memperkuat ketahanan ekonomi domestik dari rambatan eksternal, sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beratnya tantangan perekonomian global sepanjang 2025 juga dikonfirmasi oleh pernyataan sejumlah lembaga internasional. Pernyataan European Central Bank, International Monetary Fund, OECD, World Economic Forum, serta UN Trade and Development menunjukkan bahwa perekonomian global masih dibayangi tingginya ketidakpastian akibat fragmentasi ekonomi, meningkatnya risiko pasar keuangan, tekanan utang global, serta potensi gangguan perdagangan dan rantai pasok. Di sisi lain, prospek pertumbuhan jangka panjang juga tertahan oleh disrupsi struktural, termasuk realokasi sumber daya yang tidak optimal dan perkembangan teknologi yang belum merata.

Tantangan perekonomian domestik yang dihadapi sepanjang 2025 juga masih berat. Di tengah tantangan dinamika global yang berat, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap berdaya tahan dan perlu terus didorong agar dapat tumbuh lebih tinggi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Ketidakpastian perekonomian global yang tinggi juga memengaruhi kinerja eksternal ekonomi Indonesia. Transaksi berjalan tahun 2025 mencatat defisit yang terkendali sebesar 1,5 miliar dolar AS (0,1% dari PDB). Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2025 mencatat defisit sebesar 4,2 miliar dolar AS didorong oleh keluarnya aliran modal asing pada investasi portofolio

dan investasi lainnya seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Perkembangan tersebut mendorong besarnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah meskipun pergerakannya relatif tetap stabil dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan bahkan lebih kuat dibandingkan negara maju selain dolar AS didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas Rupiah. Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah lembaga dan pelaku pasar juga memandang bahwa tekanan terhadap stabilitas eksternal mengalami peningkatan di tahun 2025. Sementara itu, inflasi tahun 2025 terkendali dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ dengan inflasi IHK tercatat sebesar 2,92% (yoy), meski tekanan inflasi kelompok volatile food (VF) cukup tinggi sebesar 6,21% (yoy). Selain itu, penyaluran kredit perbankan perlu terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, didukung dengan pendalaman pasar keuangan untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan ekonomi, serta transformasi sektor riil untuk memperkuat struktur ekonomi. Dalam kaitan ini, diperlukan penguatan kredibilitas kebijakan dan percepatan reformasi struktural untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di tengah tantangan lingkungan strategis yang berat, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap berdaya tahan dan perlu terus didorong agar dapat tumbuh lebih tinggi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II dan III 2025 masing-masing tercatat sebesar 5,12% (yoy) dan 5,04% (yoy), ditopang oleh permintaan domestik maupun kinerja ekspor. Dari permintaan domestik, tingginya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II dan III 2025 ditopang terutama oleh investasi swasta dan realisasi sejumlah program prioritas Pemerintah, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga tumbuh baik seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat. Dari sektor eksternal, kinerja ekspor nonmigas meningkat dipengaruhi *front-loading* ekspor ke AS sebagai respons antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif AS, di samping kenaikan ekspor produk pertanian dan manufaktur. Momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi berlanjut pada triwulan IV 2025 dengan realisasi pertumbuhan mencapai 5,39% (yoy),

lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 sebesar 5,03% (yoy) dan diikuti dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan. Ke depan, capaian pertumbuhan ekonomi 2025 dapat terus ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian.

Ketidakpastian perekonomian global yang tinggi juga memengaruhi kinerja eksternal ekonomi Indonesia.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap terjaga sehat dengan transaksi berjalan tahun 2025 mencatat defisit yang terkendali sebesar 1,5 miliar dolar AS (0,1% dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2024 sebesar 8,6 miliar dolar AS (0,6% dari PDB). Sementara itu, nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah besarnya tekanan dari ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Tekanan besar terhadap nilai tukar Rupiah sempat terjadi pascapengumuman kebijakan tarif sepihak oleh AS pada awal April 2025. Langkah penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang ditempuh Bank Indonesia berhasil menahan pelemahan lebih dalam. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah kembali tinggi sejak akhir Agustus 2025 akibat faktor global seperti penurunan FFR yang dinilai kurang akomodatif (*less dovish*), serta faktor domestik antara lain kekhawatiran pasar terhadap melebarnya defisit fiskal. Nilai tukar Rupiah hingga akhir Desember 2025 tercatat Rp16.675 per dolar AS, atau melemah 3,48% dari posisi akhir Desember 2024. Secara keseluruhan, pergerakan Rupiah relatif stabil dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan lebih kuat dibandingkan dengan mata uang negara maju selain dolar AS. Stabilisasi nilai tukar Rupiah tidak hanya ditopang oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia maupun intensitas langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF baik di *off-shore* maupun *on-shore* (DNDF) dan pasar *spot*, tetapi juga oleh peningkatan konversi valuta asing ke Rupiah oleh eksportir seiring dengan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Posisi cadangan devisa Indonesia tetap tinggi di tengah

kebutuhan intervensi valas yang dilakukan Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar 156,5 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2024 sebesar 55,7 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sepanjang 2025, inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas sistem keuangan terjaga, serta digitalisasi sistem pembayaran meningkat pesat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$, dengan inflasi IHK Desember 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga rendah sebesar 2,38% (yoy), seiring konsistensi kebijakan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat relatif tinggi sebesar 6,21% (yoy), terutama disebabkan karena gangguan produksi dan distribusi akibat kendala cuaca, peningkatan biaya bahan baku produksi, serta dampak bencana di Sumatra. Sementara itu, inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat sebesar 1,93% (yoy), sejalan dengan terbatasnya kebijakan penyesuaian harga yang diatur oleh Pemerintah.

Lebih lanjut, stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga dengan kondisi permodalan perbankan yang kuat dan risiko kredit bermasalah yang rendah di tengah pertumbuhan kredit yang perlu terus didorong. Kredit perbankan pada 2025 tumbuh sebesar 9,69% (yoy), berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 8-11% (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan upaya untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) serta realisasi program prioritas Pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga. Meski demikian, percepatan penurunan suku bunga perbankan perlu terus dilakukan untuk memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan moneter. Kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% (yoy) pada Desember 2025. Ketahanan sistem keuangan terjaga baik didukung likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang rendah.

Digitalisasi sistem pembayaran meningkat pesat sehingga menopang ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional dan secara keseluruhan mampu mendukung pertumbuhan

ekonomi tahun 2025. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital sepanjang tahun 2025 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet, termasuk transaksi QRIS juga terus meningkat. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas.

Selain dinamika perekonomian global dan nasional, Bank Indonesia juga mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan. Sinergi bauran kebijakan bank sentral dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, serta kebijakan stabilitas sistem keuangan perlu semakin diperkuat di tengah meningkatnya dampak ketidakpastian global. Selain itu, diperlukan penguatan respons dan transformasi kebijakan dan kelembagaan untuk mengawal penyelesaian pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK, menjaga kecermatan, kepatuhan hukum, dan kepentingan Bank Indonesia dalam berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh K/L lain, termasuk mengelola perubahan demografi pegawai melalui digitalisasi dan otomasi dengan sejumlah manfaat dan risikonya. Tantangan lingkungan strategis global, domestik, dan kelembagaan yang berat tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik terhadap rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis tahun 2025, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter diarahkan pada keseimbangan *pro-stability and growth*, antara lain dengan menurunkan BI-Rate sebanyak lima kali selama tahun 2025, yakni pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025, masing-masing sebesar 25 bps, sehingga menjadi 4,75%. Keputusan ini sejalan dengan prospek inflasi 2026-2027 yang terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$, upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta turut mendukung upaya bersama Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan. Bank Indonesia terus memperkuat strategi

operasi moneter *pro-market* guna makin meningkatkan efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas). Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah juga diperkuat melalui intervensi baik melalui transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif dioptimalkan untuk memperkuat fleksibilitas likuiditas perbankan serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan guna mendukung intermediasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Untuk mendukung ketiga kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan untuk pendalaman PUVA, kebijakan internasional, serta kebijakan untuk mendukung program-program UMKM dan ekonomi-keuangan syariah. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Transformasi Bank Indonesia

Sepanjang 2025, transformasi di Bank Indonesia terus diperkuat sebagai upaya untuk membangun bank sentral yang kredibel, profesional, bertatakelola, akuntabel, dan transparan, di tengah dinamika lingkungan strategis kebijakan dan kelembagaan. Pada area kebijakan, transformasi Bank Indonesia dilakukan dengan penguatan kerangka kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran sejalan dengan amanat UU P2SK melalui penetapan PBI tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI). Pada 2025, Bank Indonesia meluncurkan *Blueprint* Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 sebagai arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, melangkapi berbagai *blueprint* yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030, dan *Blueprint* Pengelolaan Uang Rupiah (BPPUR) 2024–2030. Landasan hukum dan kerangka pengaturan di area kebijakan turut diperkuat,

antara lain terkait pengendalian moneter, pengelolaan cadangan devisa, termasuk pengaturan Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, pengelolaan likuiditas, Protokol Manajemen Krisis (PMK) Terintegrasi, kebijakan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan (IEKB), serta kebijakan sistem pembayaran dan industri sistem pembayaran.

Selain penyempurnaan kerangka kerja dan ketentuan, transformasi Bank Indonesia difokuskan pula pada berbagai upaya optimalisasi pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung. Di area kebijakan moneter, transformasi diarahkan pada optimalisasi pelaksanaan OM *pro-market* melalui penerbitan instrumen Bank Indonesia *Floating Rate Notes* (BI-FRN) dan perluasan repo dengan surat berharga berkualitas tinggi. Lebih lanjut, transformasi juga menasar digitalisasi proses bisnis statistik melalui penguatan sistem perolehan dan pelaporan data, serta integrasi dan digitalisasi pemrosesan dan diseminasi statistik. Upaya ini juga meliputi penajaman relevansi produk statistik dan penyusunan kerangka digitalisasi yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan data yang lebih efektif dan terintegrasi.

Di area makroprudensial, upaya transformasi difokuskan pada penguatan instrumen makroprudensial untuk mendukung pembiayaan ekonomi sementara itu di area sistem pembayaran selain diarahkan untuk mendorong transaksi sistem pembayaran, transformasi juga difokuskan pada penguatan infrastruktur. Pada 2025, Bank Indonesia memperkuat kebijakan insentif likuiditas berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (*KLM forward looking*) guna mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, transformasi dalam transaksi dan *velocity* ditempuh melalui implementasi inovasi instrumen pembayaran melalui QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) dan menginisiasi pembentukan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) atau sebelumnya disebut Bank Indonesia-Digital Innovation Center (BIDIC). Penguatan infrastruktur dilakukan melalui peningkatan stabilitas dan skalabilitas sistem ritel dan *wholesale*, termasuk pengembangan BI-FAST, BI-RTGS Generasi III, BI-Payment Clear, serta standardisasi ISO 20022. Selain itu, Bank Indonesia memperluas konektivitas global melalui partisipasi dalam proyek Nexus dan pengembangan infrastruktur data pembayaran untuk mendukung integritas transaksi dan perumusan kebijakan.

Sementara itu, transformasi di area kebijakan pendukung sepanjang 2025 ditempuh melalui pengembangan PUVA yang berfokus pada aspek *product*, *pricing*, *pelaku*, dan *infrastruktur* (3P+1I). Pengembangan infrastruktur pasar keuangan menjadi fokus utama dalam transformasi

kebijakan pendukung sepanjang 2025, khususnya untuk mengakselerasi pendalaman PUVA yang modern, maju, dan terintegrasi dengan strategi Operasi Moneter (OM) *pro-market*. Bank Indonesia mengembangkan interkoneksi sistem *Financial Market Infrastructure* (FMI) dengan PT KPEI melalui implementasi *triparty repo*, memperluas layanan *Central Counterparty* (CCP) PUVA dan memperkuat pasar *repo* melalui peluncuran TPA *Repo* dan perluasan penandatanganan GMRA. Semakin berkembangnya pasar *repo* di Indonesia akan mendorong pendalaman pasar dan memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang lebih tinggi bagi lembaga jasa keuangan.

Di area kelembagaan, transformasi Bank Indonesia berfokus pada 3 (tiga) area strategis yang meliputi organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digital. Transformasi kelembagaan diarahkan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan melalui tata kelola yang baik dan profesional, di tengah perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penyempurnaan sejumlah kerangka kerja termasuk pemenuhan pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK, akselerasi digitalisasi, dan perubahan demografi pegawai yang didominasi oleh Gen Y dan Z. Dalam rangka memperkuat dukungan organisasi yang sejalan dengan mandat UU P2SK, pada 2025 Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan ketentuan tentang sistem pengambilan keputusan di Bank Indonesia dan peran Anggota Dewan Gubernur, serta menetapkan kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) yang diturunkan ke dalam berbagai ketentuan strategis, mencakup manajemen strategis dan program kerja, manajemen proses bisnis dan fungsi organisasi, manajemen risiko, manajemen audit intern, dan manajemen fungsi hukum. Penyempurnaan juga dilakukan pada organisasi satuan kerja, yaitu mencakup fungsi hukum, manajemen risiko, audit internal, pengembangan pasar keuangan, organisasi di IKN, dan pengelolaan cadangan devisa, disertai pembentukan *working group* guna mempercepat dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis Bank Indonesia yang saling terinterkoneksi.

Sementara itu, transformasi SDM dan budaya kerja ditempuh melalui sejumlah upaya yang berfokus pada penguatan aspek *people* sedangkan transformasi digital diarahkan untuk penguatan manajemen informasi serta infrastruktur teknologi. Penguatan tersebut ditempuh melalui penyempurnaan ketentuan terkait SDM, penguatan kepemimpinan, pengembangan *new capabilities*, serta penguatan *employee value proposition* (EVP). Adapun pada area transformasi digital, Bank Indonesia menempuh penyempurnaan kerangka pengaturan manajemen informasi, termasuk penerapan *Digital Work Process* (DWP) untuk mendukung proses pengambilan keputusan,

serta penguatan infrastruktur teknologi informasi melalui pengembangan *data center*.

Capaian Kinerja Bank Indonesia

Di tengah beratnya tantangan perekonomian global dan domestik, serta tuntutan implementasi dari amanat UU P2SK, sepanjang 2025 Bank Indonesia berhasil mencapai kinerja yang tinggi dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melampaui target. Hal ini didukung oleh berbagai inisiatif transformasi dan respons kebijakan serta persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk sejumlah pengakuan dan penghargaan, baik pada level nasional maupun level internasional. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan wujud nyata dari penerapan kebijakan yang konsisten, inovasi yang berkelanjutan, dan eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah dan kementerian/lembaga terkait.

Pada area kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat mengendalikan inflasi inti tahun 2025 terjaga pada level rendah sebesar 2,38% (yoy). Nilai tukar Rupiah juga tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang meningkat akibat kebijakan tarif sepihak AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik. Meskipun pada posisi akhir tahun 2025 mengalami tekanan, pergerakan Rupiah masih relatif stabil dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan lebih kuat dibandingkan dengan mata uang negara maju selain dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat sebesar 156,5 miliar dolar AS, jauh berada di atas standar kecukupan internasional. Sinergi fiskal-moneter antara Bank Indonesia dan Pemerintah sepanjang 2025 semakin erat termasuk dalam memitigasi dampak negatif rambatan global.

Bank Indonesia berhasil menyelesaikan seluruh target IKU di area makroprudensial dengan pencapaian di atas target 2025. Kredit perbankan pada tahun 2025 tercatat tumbuh 9,69% (yoy) sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, pembiayaan inklusif melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mencapai 32,04%, dan likuiditas perbankan tetap terjaga (AL/DPK sebesar 28,57%). Stabilitas sistem keuangan tetap kuat dengan rasio CAR tinggi dan NPL rendah, serta diperkuat melalui sinergi yang erat dalam KSSK dan otoritas terkait lainnya dalam rangka mendukung ketahanan sistem keuangan nasional.

Di area sistem pembayaran, keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai berbagai target IKU 2025 telah berdampak pada kinerja sistem pembayaran nasional yang solid. Digitalisasi layanan pembayaran terus berakselerasi didukung dengan *availability* infrastruktur sistem pembayaran yang stabil, tecermin dari transaksi melalui BI-FAST yang terus mengalami peningkatan.

Penggunaan QRIS juga menunjukkan akselerasi. Pada akhir tahun 2025, total pengguna QRIS tercatat sebanyak 59,53 juta, jumlah *merchant* QRIS sebanyak 42,75 juta, serta volume transaksi meningkat 148,54% (yoy) dengan kumulatif volume transaksi mencapai 15,51 miliar transaksi. Selain itu, transaksi *digital payment* tercatat 49,91 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 36% (yoy). Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, sepanjang 2025 Bank Indonesia mampu memenuhi kebutuhan uang Rupiah bagi masyarakat di seluruh wilayah NKRI termasuk di daerah 3T, dengan kualitas tingkat kelayakan uang (*soil level*) yang terjaga.

Sementara itu, pencapaian IKU di area kebijakan pendukung menunjukkan komitmen Bank Indonesia yang tinggi dalam mendorong pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi-keuangan inklusi dan syariah, serta peningkatan kerja sama internasional. Sejak implementasi BPPU 2030, transaksi PUVA Indonesia terus melanjutkan perkembangan positif. Dari sisi pengembangan produk di pasar uang, rerata harian nilai transaksi repo pada tahun 2025 telah mencapai Rp20,57 triliun, meningkat 37,1% dari Rp15 triliun tahun 2024. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja transaksi di pasar valuta asing (valas) juga menunjukkan perkembangan positif, termasuk transaksi derivatif valas. Kenaikan rerata harian transaksi DNDF terus berlanjut hingga mencapai 346 juta dolar AS per hari di tahun 2025 dari 298 juta dolar AS per hari di tahun 2024. Dari sisi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, baik secara konvensional maupun syariah, berbagai inisiatif Bank Indonesia mampu meningkatkan jumlah UMKM yang berdaya saing hingga mencapai 11.811 UMKM pada akhir tahun 2025 dari sebelumnya 8.719 UMKM di tahun 2024. Sementara itu, kebijakan internasional yang strategis dan proaktif sepanjang 2025 diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan membangun persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain melalui pengelolaan persepsi positif investor dan lembaga *rating*, penguatan kerja sama *Local Currency Transaction* (LCT) dengan bank sentral, serta penguatan diplomasi di berbagai forum global dalam bentuk penyampaian posisi/*stance* yang terkait dengan kepentingan Bank Indonesia dan Indonesia.

Pendalaman PUVA menunjukkan capaian tinggi dengan peningkatan volume dan likuiditas pasar yang memperkuat transmisi moneter, stabilitas Rupiah, dan manajemen likuiditas, didukung oleh instrumen

pro-market dan integrasi *platform* bilateral dengan CCP. Kompetensi pelaku pasar terus diperkuat melalui sertifikasi profesi dan kepatuhan kode etik. Pembiayaan syariah juga meningkat seiring tumbuhnya transaksi PUAS, sementara pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha syariah diperkuat melalui penyelenggaraan KKI, FESyar, IN2MF, dan ISEF. Literasi dan keberdayaan konsumen pun meningkat signifikan. Di sisi lain, kebijakan internasional turut mencatat pencapaian IKU di atas target, tercermin dari peningkatan pangsa penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dan semakin strategisnya peran Bank Indonesia/Republik Indonesia dalam berbagai forum kerja sama global.

Dari sisi kelembagaan, Bank Indonesia senantiasa melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan profesional. Seluruh IKU di area kelembagaan berhasil melampaui target, didukung kualitas SDM yang menunjukkan kinerja positif dengan tingkat *person-to-job fit* yang melebihi sasaran, kecukupan regulasi, serta dukungan organisasi dan pengelolaan aset yang optimal. Selain itu, transformasi pola kerja *hybrid* dan digitalisasi, termasuk pemanfaatan AI, berjalan efektif dengan tetap menjaga keamanan siber. Penerapan tata kelola yang kuat tercermin dari capaian maturitas dalam tata kelola, pengelolaan risiko, dan audit internal yang melampaui target. Bank Indonesia juga berhasil mempertahankan Opini WTP secara konsisten sejak 2003, disertai pengakuan sebagai Lembaga Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) serta capaian indeks “terjaga” dan berada di atas rata-rata indeks nasional dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Capaian kinerja Bank Indonesia tahun 2025 yang melampaui target IKU 2025 menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, upaya menjaga kredibilitas kelembagaan melalui penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Dalam menjalankan mandatnya, pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia akan senantiasa dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan transparan sesuai amanat UU serta prinsip tata kelola yang baik dan profesional.

BAB 1

KELEMBAGAAN BANK INDONESIA





Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (Koperbi) Jakarta

1.1. Profil Bank Indonesia

Status dan Kedudukan

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Republik Indonesia diamanatkan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999, yang kemudian beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 12 Januari 2023. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan UU Bank Indonesia tersebut.

Dalam menjalankan independensinya, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Sebagai perwujudan dari tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, Bank Indonesia mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2024, yang merupakan capaian ke-22 secara berturut-turut sejak tahun 2003. Hal ini merupakan bukti komitmen Bank Indonesia untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden, serta memublikasikannya kepada masyarakat.

Visi

“Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat, yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju.”

Misi

- 01 Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 02 Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 03 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 04 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional.
- 05 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing (valas), termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
- 06 Turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Bank Indonesia.
- 07 Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Tujuan dan Tugas

Tujuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK, adalah: (i) mencapai stabilitas nilai Rupiah; (ii) memelihara stabilitas Sistem Pembayaran; dan (iii) turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Stabilitas nilai Rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta kestabilan nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi secara eksplisit dan diumumkan secara transparan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan publik.

Dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan seluruh perangkat pengaturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana berjalan lancar untuk memenuhi setiap kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Teknologi digital dan inovasi kini telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi-keuangan. Tren digitalisasi tersebut mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali di sektor keuangan. Hal ini menjadi tantangan kebijakan bagi otoritas, khususnya Bank Indonesia, dalam mencari titik keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan

peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko. Oleh karena itu, Bank Indonesia menginisiasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia dan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, guna memperoleh manfaat dari digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya sistem keuangan, Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran.

1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputi Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis. Dalam kaitan ini, RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Setiap anggota Dewan Gubernur mempunyai hak suara yang sama. Pengambilan keputusan oleh Dewan Gubernur di dalam RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial. Keputusan Dewan Gubernur dalam RDG merupakan keputusan Bank Indonesia dan mengikat seluruh anggota Dewan Gubernur.

Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputi Gubernur dengan profil sebagai berikut:



Perry Warjiyo
Gubernur

PERRY WARJIYO menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023 dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan 2023–2028. Sebelumnya, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018–2023 dan sebagai Deputy Gubernur untuk masa jabatan 2013–2018.

Sebelum menduduki jabatan Deputy Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Jabatan ini diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the South–East Asia Voting Group (SEAVG), yang berkedudukan di Washington, D.C., AS. Perry Warjiyo mempunyai karier yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa, dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo saat ini juga menduduki posisi sebagai *Chair of Asian Consultative Council–Bank for International Settlements (ACC-BIS)*, *Chairman of Executive Committee*

(EC) – Islamic Financial Services Board (IFSB), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (KAFEGAMA). Selain itu, Perry Warjiyo juga mewakili Bank Indonesia dan Indonesia dalam Keketuaan G20 pada tahun 2022, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan ASEAN+3 pada tahun 2023, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) *Meeting*, serta di IMF, Financial Stability Board (FSB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Islamic International Liquidity Management (IILM). Selama tahun 2023, Perry Warjiyo aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

Perry Warjiyo juga telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional. Salah satu bukunya, yaitu *“Central Bank Policy: Theory and Practice”* yang ditulis bersama Dr. Solikin M. Juhro, mendapat pengakuan nasional dan internasional sebagai referensi penting dalam perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada tahun 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Gelar Master dan Ph.D. di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.



Destry Damayanti

Deputi Gubernur Senior

DESTRY DAMAYANTI menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019–2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024, Destry Damayanti kembali ditetapkan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024–2029 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2024. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner LPS periode 2015–2019. Selain menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner (*ex officio*) Bank Indonesia pada LPS sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Destry Damayanti mengawali kariernya sebagai Asisten Peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) pada tahun 1988, lalu Peneliti dan Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 1987–1990. Selanjutnya, Destry Damayanti bekerja di Kementerian Keuangan selama periode 1992–1997. Pada tahun 1997–2000, Destry Damayanti menjadi

ekonom di Citibank, yang kemudian diteruskan menjadi *Senior Economic Advisor* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000–2003. Kariernya sebagai ekonom berlanjut sebagai Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005–2015 dan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif untuk Mandiri Institute. Pada 2015–2019 Destry Damayanti juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selama tahun 2014–2015, Destry Damayanti juga menjabat sebagai Ketua *Task Force* Ketahanan Ekonomi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2015, Destry Damayanti dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015–2019. Pada tahun 2019–2021, Destry Damayanti dipercaya menjadi Ketua Iluni FEB UI dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban MASTRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) dari tahun 2015 sampai saat ini.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraihinya dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science pada *Field of Regional Science* diraihinya dari Cornell University, New York, AS, pada tahun 1992.



Jуда Agung
Deputi Gubernur

JUDA AGUNG menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan 2022–2027.

Memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991, Jуда Agung memiliki pengalaman yang panjang melalui sejumlah penugasan, baik di eksternal Bank Indonesia sebagai Economist di Netherlands Central Planning Bureau, Advisor to Executive Director di International Monetary Fund (IMF), dan Direktur Eksekutif IMF, yang mewakili 13 negara Southeast Asian dan Pacific, maupun di internal Bank Indonesia yang meliputi area riset ekonomi dan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, manajemen strategis, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebelum terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Jуда Agung menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP), sekaligus Asisten Gubernur yang membawahi Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020–2022. Dalam kepemimpinannya di DKMP, Jуда Agung berperan penting untuk meletakkan pondasi dasar kerangka kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, termasuk dalam merumuskan sejumlah kebijakan Makroprudensial untuk mendukung inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan.

Sebagai ekonom, Jуда Agung telah memublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Review of International Economics*, *Applied Economics*, dan *Asian Economic Journal*. Salah satu publikasi yang pernah diterbitkan Jуда Agung adalah buku “Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi”, yang menjadi salah satu referensi utama terkait kerangka kebijakan Makroprudensial di Indonesia. Jуда Agung juga aktif menjadi pembicara pada berbagai forum dan seminar internasional, antara lain IMF, FSB, BIS, Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) dan berbagai forum internasional lainnya, serta memberikan berbagai kuliah tamu di Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri. Jуда Agung juga pernah menjadi staf pengajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Jуда Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan di bidang Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Jуда Agung melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Master di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Jуда Agung kemudian melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Ph.D. di bidang Ekonomi pada tahun 1999.



AIDA S. BUDIMAN menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan yang akan berlangsung hingga tahun 2027. Selain itu, Aida S. Budiman juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (*ex officio*) Bank Indonesia untuk sisa masa jabatan tahun 2020–2025, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.101/P Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner LPS.

Aida S. Budiman memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991 dan selama perjalanan kariernya telah memiliki pengalaman yang luas melalui berbagai penugasan, termasuk sebagai Wakil Direktur Eksekutif untuk South East Asia Voting Group (SEAVG) *office* di International Monetary Fund (IMF). Sebelum terpilih menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Kepala Departemen Internasional (DIInt) dari tahun 2014–2018, dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) pada tahun 2018, sekaligus sebagai Asisten Gubernur yang bertugas mengoordinir kebijakan strategis sektor moneter, bauran kebijakan Bank Indonesia, dan sinerginya dengan kebijakan nasional dalam kurun waktu tahun 2020–2022. Di bawah kepemimpinannya di DKEM, Aida S. Budiman memainkan peran kunci dalam merumuskan penguatan Kerangka Bauran Kebijakan Bank Indonesia, mengembangkan sektor prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta memperkuat peran

Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dan nasional.

Sebagai seorang ekonom, Aida S. Budiman telah menerbitkan sejumlah artikel dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan di berbagai jurnal internasional, termasuk di antaranya *The Falsification of Four Popular Hypotheses about the Asian Crisis*, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, dan *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Selain itu, Aida S. Budiman aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum dan seminar baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pernah memberikan berbagai kuliah umum di Perguruan Tinggi. Aida S. Budiman juga telah menjadi pengajar dalam berbagai diklat internal Bank Indonesia dan Sekolah Staf dan Komando TNI serta menjadi dosen pengajar di Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Saat ini, Aida S. Budiman menjabat sebagai Ketua Bidang II Perumusan Kebijakan di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menyelesaikan pendidikan pada bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di University of Southern California dan meraih gelar Master di bidang Ekonomi pada tahun 1996. Aida S. Budiman kemudian melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar Ph.D. di bidang Ekonomi pada tahun 2001.



Filianingsih Hendarta Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 18 April 2023 untuk masa jabatan 2023–2028.

Filianingsih Hendarta memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1986. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi kebijakan strategis di sektor sistem pembayaran sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019–2023). Sebelumnya, Filianingsih Hendarta memimpin Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015–2019) dan Departemen Pengelolaan Moneter (2013–2015).

Sepanjang kariernya, Filianingsih Hendarta memimpin berbagai proyek berskala nasional dan internasional. Filianingsih merupakan figur kunci dalam peluncuran Proyek Garuda yang mengawali eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Rupiah Digital. Filianingsih Hendarta juga memimpin implementasi *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia* (BSPI) 2025 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi dan integrasi ekonomi serta keuangan digital guna meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di hampir seluruh sektor di Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dipercaya untuk terlibat dalam berbagai forum strategis lintas Kementerian/Lembaga di tingkat domestik maupun internasional. Di dalam negeri, Filianingsih Hendarta berperan dalam berbagai forum, antara lain Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan Sektor Keuangan, Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Elektronifikasi Lintas Kementerian/Lembaga, serta berbagai komite internal Bank Indonesia. Di kancah internasional, Filianingsih Hendarta acap kali mewakili Bank Indonesia dalam berbagai fora, seperti G20, Bank for International Settlements (BIS), FSB, IMF, World Bank, ECB, dan Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP).

Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan pada bidang hukum di Universitas Airlangga, Filianingsih Hendarta melanjutkan pendidikan di Boston University dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration (Economics and Finance)* pada tahun 1992. Filianingsih Hendarta juga pernah aktif terlibat sebagai pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *Focus Group Moneter dan Makroprudensial* pada tahun 2018–2021. Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Wakil Ketua 1–Dewan Kehormatan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode tahun 2021–2025.



Ricky P. Gozali
Deputi Gubernur

RICKY P. GOZALI menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/P Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.

Ricky P. Gozali memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1995 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dalam perjalanan kariernya selama lebih dari dua dekade, Ricky P. Gozali banyak terlibat dalam pengelolaan portofolio cadangan devisa negara, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, Ricky P. Gozali juga pernah ditugaskan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York selama empat tahun (2004–2008) dan menjadi *Chief Dealer* di pasar valuta asing. Pengalaman tersebut melengkapi pemahamannya atas dinamika pasar keuangan global secara menyeluruh.

Setelah kembali ke tanah air, Ricky P. Gozali melanjutkan penugasan strategis di Departemen Pengelolaan Devisa sebagai Kepala Divisi Manajemen Valuta Asing, Kepala Divisi Analisa Pasar Internasional, serta di Departemen Internasional sebagai Kepala Grup Hubungan Internasional dan Kepala Grup Kebijakan Internasional. Karier Ricky P. Gozali termasuk memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia di sejumlah provinsi, seperti Gorontalo (2018–

2019), Kalimantan Timur (2022–2023), Sumatera Selatan (2023–2025), dan terakhir di Provinsi DKI Jakarta (2025). Dalam kapasitas ini, Ricky P. Gozali berperan aktif dalam mendorong pengembangan UMKM, ekonomi syariah, digitalisasi sistem pembayaran, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Ricky P. Gozali juga berpengalaman di bidang keorganisasian dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) periode 2020–2023, serta mengoordinasikan pelaksanaan *event* Presidensi G20 Sektor Keuangan.

Ricky P. Gozali lahir di Jakarta pada tahun 1970. Setelah menempuh pendidikan di bidang Manajemen Universitas Pancasila, Ricky P. Gozali melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia pada tahun 2011. Ricky P. Gozali juga mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia – SESPIBI (2019) serta beragam program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan strategis di berbagai lembaga internasional, seperti *Strategic Leadership Program* di London Premier Center Spanyol (2024), Columbia University (2023), dan Bayes Business School London (2022). Selain itu, Ricky P. Gozali juga aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi kebanksentralan dan pasar keuangan baik di dalam maupun di luar negeri.



Doni P. Joewono

Deputi Gubernur

Menjabat sampai dengan 10 Agustus 2025

DONI PRIMANTO JOEWONO menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020. Selain itu, Doni Primanto Joewono juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (*ex officio*) Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Juli 2022.

Doni Primanto Joewono memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991 di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah, dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa. Doni Primanto Joewono pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005–2008). Kariernya berlanjut dengan memimpin beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, dimulai di Solo, kemudian di Provinsi DKI Jakarta, dan terakhir di Provinsi Jawa Barat. Selama kariernya di daerah, Doni Primanto Joewono bersama kepala daerah setempat pernah mendapat penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik, yaitu saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017), serta banyak menginisiasi

berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2020.

Selama perjalanan kariernya di Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono juga aktif memimpin dan memberdayakan organisasi, yaitu sebagai Ketua Keluarga Alumni FEB Universitas Sebelas Maret (UNS) periode 2016–2021 dan terpilih kembali untuk periode 2021–2026, serta menjadi Wakil Ketua Ikatan Alumni UNS (2021–2024).

Doni Primanto Joewono lahir di Surabaya pada tahun 1965. Pendidikan formalnya ditempuh pada bidang Ekonomi Studi Pembangunan di UNS pada tahun 1988 untuk gelar Sarjana, serta bidang Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di UI pada tahun 2004 untuk gelar Magister. Doni Primanto Joewono mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI pada tahun 2012 dan Program Pendidikan Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANNAS) pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (antara lain IMF dan SEACEN).



1.3. Organisasi Bank Indonesia

Struktur Organisasi Bank Indonesia

Per Desember 2025



Keterangan:

¹⁾ Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur

²⁾ Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara



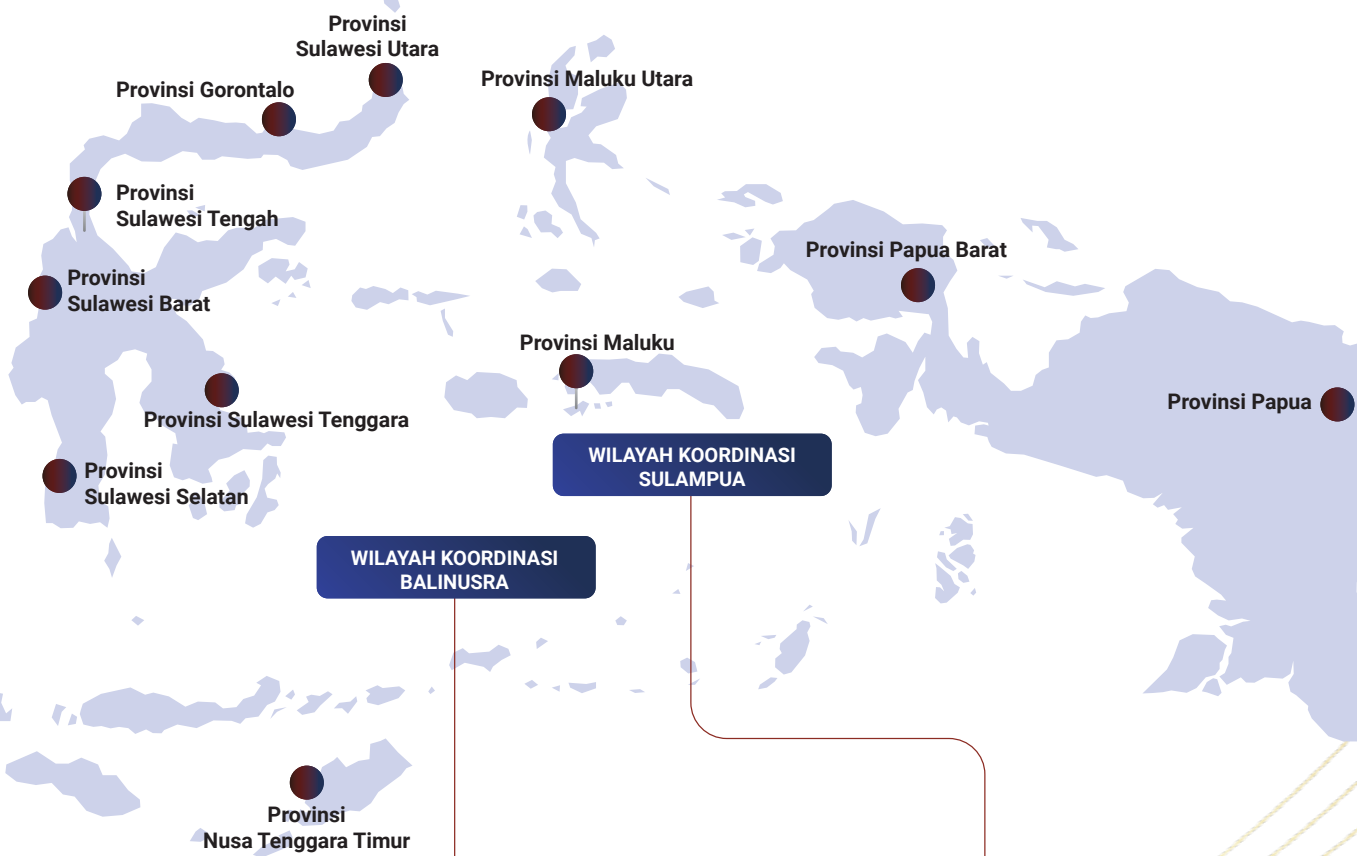
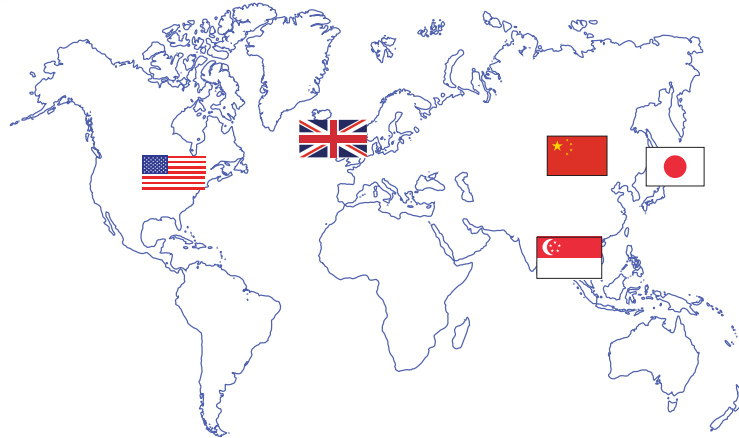
Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)

Per Desember 2025



KPw BI Luar Negeri

- KPw BI London
- KPw BI New York
- KPw BI Singapura
- KPw BI Tokyo
- KPw BI Beijing



**Kantor Koordinator dan
KPw BI Provinsi Bali**

- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Kantor Koordinator dan
KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan**

- KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
- KPw BI Provinsi Papua
- KPw BI Provinsi Maluku
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
- KPw BI Provinsi Gorontalo
- KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
- KPw BI Provinsi Maluku Utara
- KPw BI Provinsi Papua Barat

1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia

Per Desember 2025

KANTOR PUSAT BANK INDONESIA

MONETER

FIRMAN MOCHTAR	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
ERWIN GUNAWAN HUTAPEA	Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
RAHMATULLAH	Departemen Pengelolaan Devisa
AGUSTINA DHARMAYANTI	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
IMAM HARTONO	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

MAKROPRUDENSIAL

SOLIKIN M. JUHRO	Departemen Kebijakan Makroprudensial
MALIS NAINI SRI MEYYANTI	Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
ANTON DARYONO	Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
ANASTUTY K.	Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DICKY KARTIKOYONO	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
DWI SUSLAMANTO	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
M. ANWAR BASHORI	Departemen Pengelolaan Uang
YUDI HARYMUKTI	Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, <i>Data Center</i> , dan <i>Business Resumption Site</i>

PENDUKUNG KEBIJAKAN

YOGA AFFANDI	Departemen Internasional
RIZA TYAS U. H.	Departemen Statistik
SUSSY WANDAYANI S.	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
MUSNI HARDI K. ATMAJA	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
GIRI KOORNIAHARTA P.	Departemen Manajemen Risiko
RAMDAN DENNY PRAKOSO	Departemen Komunikasi

PENDUKUNG ORGANISASI

MARDIANTO JATNA (Pit.)	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
IMAM SUBARKAH	Departemen Hukum
IDAH ROSIDAH A.	Departemen Sumber Daya Manusia
ENDANG TRIANTI	Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
DIAH ROSDIANA	Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data
RETNO PONCO WINDARTI	Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber

J. B. P. SIMANDJUNTAK	Departemen Keuangan
HARUM SETIAWATI	Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan
FERRY B. TAMPUBOLON	Departemen Audit Intern
ARLYANA ABUBAKAR	Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran
BUDIYONO	Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non Perkantoran
EVA ADERIA S.	Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas
CLARITA LIGAYA ISKANDAR	Institut Bank Indonesia

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) DALAM NEGERI

ARIEF HARTAWAN	Departemen Regional
RUDY BRANDO HUTABARAT	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara
IBRAHIM	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur
R. ERWIN SOERADIMADJA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali
FADJAR MAJARDI	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
RIZKI ERNADI WIMANDA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
AGUS CHUSAINI	KPw BI Provinsi Aceh
MOHAMAD ABDUL MAJID IKRAM	KPw BI Provinsi Sumatera Barat
PANJI ACHMAD	KPw BI Provinsi Riau
WARSONO	KPw BI Provinsi Jambi
BAMBANG PRAMONO	KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
WAHYU YUWANA HIDAYAT	KPw BI Provinsi Bengkulu
BIMO EPYANTO	KPw BI Provinsi Lampung
ROMMY SARIU TAMAWIWY	KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
RONY WIDIJARTO P.	KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
IWAN SETIAWAN	KPw BI Provinsi DKI Jakarta
MUHAMAD NUR	KPw BI Provinsi Jawa Barat
MOHAMAD NOOR NUGROHO	KPw BI Provinsi Jawa Tengah
SRI DARMADI SUDIBYO	KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
AMERIZA MA'RUF MUSA	KPw BI Provinsi Banten
HARIO KARTIKO PAMUNGKAS	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
ADIDOYO PRAKOSO	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur
DONI SEPTADIJAYA	KPw BI Provinsi Kalimantan Barat

YULIANSAH ANDRIAS	KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
BUDI WIDIHARTANTO	KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
HASIANDO GINSAR MANIK	KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
JOKO SUPRATIKTO	KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
MUHAMAD IRFAN SUKARNA	KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
EDWIN PERMADI	KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
BAMBANG SATYA PERMANA	KPw BI Provinsi Gorontalo
EKA PUTRA BUDI NUGROHO	KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
WAHYU INDRA SUKMA	KPw BI Provinsi Maluku
DWI PUTRA INDRAWAN	KPw BI Provinsi Maluku Utara
FATURACHMAN	KPw BI Provinsi Papua
SETIAN	KPw BI Provinsi Papua Barat
PRABU DEWANTO	KPw BI Lhokseumawe
AHMADI RAHMAN	KPw BI Pematangsiantar
RIZA PUTERA	KPw BI Sibolga
JAJANG HERMAWAN	KPw BI Cirebon
LAURA RULIDA EKA SARI P.	KPw BI Tasikmalaya
BIMALA	KPw BI Tegal
CHRISTOVENY	KPw BI Purwokerto
DWIYANTO CAHYO SUMIRAT	KPw BI Solo
YAYAT CADARAJAT	KPw BI Kediri
IQBAL REZA NUGRAHA	KPw BI Jember
FEBRINA	KPw BI Malang
ROBI ARIADI	KPw BI Balikpapan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) LUAR NEGERI

WAHYU AGUNG NUGROHO	KPw BI New York
I GEDE PUTU WIRA K.	KPw BI London
IMADUDDIN SAHABAT	KPw BI Tokyo
WIDI AGUSTIN S.	KPw BI Singapura
YULIAN WIHANTORO	KPw BI Beijing



BAB 2

LINGKUNGAN STRATEGIS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA





2.1. Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional

Perubahan yang cepat disertai dengan ketidakpastian yang tinggi mewarnai dinamika perekonomian global dan memberikan tantangan berat pada perekonomian Indonesia. Ketidakpastian perekonomian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kebijakan tarif menurunkan volume dan nilai perdagangan global serta semakin memperparah dampak gangguan rantai pasok dunia. Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada awal April 2025 yang diikuti langkah retaliasi Tiongkok meningkatkan ketidakpastian perekonomian global, meskipun sedikit mereda pada Mei 2025 seiring kesepakatan sementara antara AS dan Tiongkok untuk menurunkan tarif impor selama 90 hari. Ketidakpastian global tersebut kembali meningkat pasca pengumuman kenaikan tarif efektif resiprokal AS ke beberapa negara maju dan berkembang. Sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS meluas dari 44 negara menjadi 70 negara, dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula. Selanjutnya, sejak 1 Oktober 2025, AS kembali mengenakan tambahan tarif kepada sektor farmasi, mebel, dan otomotif, serta mengumumkan rencana pengenaan tarif tambahan sebesar 100% terhadap produk asal Tiongkok. Implementasi tarif resiprokal AS tersebut menimbulkan risiko pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia dengan disparitas pertumbuhan antarnegara yang makin melebar.

Perekonomian global 2025 tumbuh 3,4% dengan fragmentasi antarnegara yang melebar dan diprakirakan melambat pada 2026 dan 2027. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut, dengan ekonomi negara maju tumbuh 1,9% pada 2025, sementara pertumbuhan *Emerging Economies* (EMEs) sebesar 4,4% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi AS menurun dari 2,8% pada 2024 menjadi 2,1% pada 2025, dipengaruhi terutama oleh dampak tarif yang diikuti dengan pelemahan pasar tenaga kerja. *Temporary government shutdown* pada Oktober hingga November 2025 turut memengaruhi melambatnya ekonomi AS pada 2025. Sementara itu, pemulihan ekonomi Kawasan Eropa terus berlangsung, dengan pertumbuhan meningkat dari 0,9% tahun 2024 menjadi 1,4% pada tahun 2025, didukung oleh perbaikan konsumsi seiring pelonggaran kebijakan moneter dan stimulus fiskal, dan *front-loading* ekspor sebagai antisipasi kesepakatan perdagangan dengan AS. Pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2025 juga meningkat dari 0,1% pada 2024 menjadi 1,2% pada 2025, didukung berlanjutnya perbaikan upah. Di negara EMEs, dampak kebijakan tarif AS terhadap perekonomian terutama terjadi di Tiongkok,

meski pertumbuhan ekonomi cukup *resilient*, sebesar 5,0% pada 2025, tidak berbeda dengan pertumbuhan pada 2024. Sementara itu, ekonomi India cukup berdaya tahan dengan pertumbuhan mencapai 7,6% pada 2025, setelah tumbuh 6,5% pada 2024, ditopang oleh berlanjutnya perbaikan konsumsi domestik dan ekspansi manufaktur, didukung oleh belanja fiskal meskipun dengan kecenderungan menurun seiring konsolidasi fiskal yang ditempuh Pemerintah.

Ketidakpastian di pasar keuangan global tetap tinggi akibat melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan arah kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju, terutama bank sentral AS. Kebijakan tarif AS menyebabkan tertahannya penurunan inflasi dan membatasi ruang gerak penurunan Fed Funds Rate (FFR) ke depan. Ketidakpastian global yang tinggi mendorong bank-bank sentral lain untuk cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kecepatan dan waktu penurunan suku bunga kebijakannya. Perbedaan tingkat dan waktu penurunan suku bunga kebijakan juga terjadi di EMEs, seperti di Tiongkok, India, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Tingkat imbal hasil (*yield*) US Treasury tenor 2 tahun cenderung bergerak naik, sementara *yield* US Treasury tenor 10 tahun tetap tinggi sejalan dengan tingginya tingkat utang Pemerintah AS. Perkembangan ini menyebabkan indeks mata uang AS (DXY) masih cenderung tinggi dan aliran masuk modal asing ke *emerging market* (EM) tetap terbatas, bahkan aliran modal keluar dari EM terjadi ke aset-aset investasi yang dianggap aman (*safe-haven assets*), khususnya obligasi AS dan komoditas emas, yang berdampak pada semakin tertekannya mata uang negara-negara EM. Tingginya ketidakpastian perekonomian global sepanjang 2025 memerlukan peningkatan kewaspadaan serta penguatan respons bauran kebijakan guna memperkuat ketahanan ekonomi domestik dari rambatan eksternal, sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beratnya tantangan perekonomian global sepanjang 2025 juga dikonfirmasi oleh pernyataan dari sejumlah tokoh dan lembaga internasional. Pernyataan European Central Bank, International Monetary Fund, OECD, World Economic Forum, serta UN Trade and Development menunjukkan bahwa perekonomian global masih dibayangi tingginya ketidakpastian akibat fragmentasi ekonomi, meningkatnya risiko pasar keuangan, tekanan utang global, serta potensi gangguan perdagangan dan rantai pasok. Di sisi lain, prospek pertumbuhan jangka panjang juga tertahan oleh disrupsi struktural, termasuk realokasi sumber daya yang tidak optimal dan perkembangan teknologi yang belum merata.

Tantangan perekonomian nasional pada 2025 semakin berat di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian

global. Ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap berdaya tahan dan perlu terus didorong agar dapat tumbuh lebih tinggi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Keyakinan pelaku ekonomi baik rumah tangga maupun dunia usaha terus dijaga sehingga tetap dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari eksternal, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap terjaga dan perlu terus diperkuat. Transaksi berjalan tahun 2025 mencatat defisit yang terkendali sebesar 1,5 miliar dolar AS (0,1% dari PDB). Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat defisit sebesar 4,2 miliar dolar AS didorong oleh keluarnya aliran modal asing pada investasi portofolio dan investasi lainnya. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga meningkat akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi, meski pergerakannya relatif tetap stabil dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan bahkan lebih kuat dibandingkan negara maju selain dolar AS. Inflasi tahun 2025 juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% dengan inflasi IHK tercatat rendah sebesar 2,92% (yoy), meski tekanan inflasi kelompok *volatile food* (VF) cukup tinggi sebesar 6,21% (yoy) terutama disebabkan karena gangguan produksi dan distribusi akibat kendala cuaca, peningkatan biaya bahan baku produksi, serta dampak bencana di Sumatra.

Sejumlah lembaga dan pelaku pasar juga memandangi bahwa tekanan terhadap stabilitas eksternal mengalami peningkatan di tahun 2025. Selain itu, penyaluran kredit perbankan perlu terus didorong dan dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, didukung pendalaman pasar keuangan untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan ekonomi, serta transformasi sektor riil untuk memperkuat struktur perekonomian. Seluruh kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Untuk itu, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat guna menjaga permintaan domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia 2025 tetap berkinerja baik dan berdaya tahan dan perlu terus diperkuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II dan III 2025 tetap baik, ditopang oleh permintaan domestik, khususnya investasi swasta dan realisasi sejumlah program prioritas Pemerintah, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) di berbagai daerah. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh baik seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat, meskipun perlu terus diperkuat di tengah menurunnya ekspektasi konsumen, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, serta terbatasnya ketersediaan lapangan kerja. Kinerja ekspor nonmigas juga meningkat dipengaruhi *front-loading* ekspor ke AS sebagai respons antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif AS, di samping kenaikan ekspor produk pertanian dan manufaktur. Momentum pertumbuhan tersebut berlanjut hingga triwulan IV 2025, terutama ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 sebesar 5,03% (yoy) dan diikuti dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan. Ke depan, capaian pertumbuhan ekonomi 2025 dapat terus ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian.

Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Secara umum, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2025 tetap sehat dengan transaksi berjalan tahun 2025 mencatat defisit yang terkendali sebesar 1,5 miliar dolar AS (0,1% dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2024 sebesar 8,6 miliar dolar AS (0,6% dari PDB). Perkembangan ini dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan barang yang meningkat di tengah peningkatan defisit neraca jasa akibat defisit jasa telekomunikasi sejalan dengan peningkatan kinerja sektor informasi dan komunikasi, serta defisit neraca pendapatan primer dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran dividen. Transaksi modal dan finansial tahun 2025 mencatat defisit sebesar 4,2 miliar dolar AS didorong oleh keluarnya aliran modal asing pada investasi portofolio dan investasi lainnya seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi sepanjang tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar yang antara lain direspons dengan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar. Di tengah intervensi yang dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah, kecukupan cadangan devisa tetap terjaga. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 sebesar 156,5 miliar dolar AS, meningkat dari 155,7 miliar dolar AS pada akhir tahun 2024. Posisi cadangan devisa dimaksud setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah besarnya tekanan dari dampak memburuknya kondisi



Konferensi Pers *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta.

global. Kebijakan tarif sepihak oleh Presiden AS telah menyebabkan aliran keluar portofolio asing dan depresiasi nilai tukar negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Rupiah sempat mengalami tekanan tinggi di pasar *forward* luar negeri (*offshore Non-Deliverable Forward*, NDF) setelah pengumuman tarif AS pada awal April 2025. Untuk memperkuat stabilisasi Rupiah, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar *off-shore* NDF secara intensif dan tanpa henti baik di pasar Asia, Eropa, dan AS. Intervensi *off-shore* NDF dimaksudkan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah di pasar domestik yang terus dilakukan dengan strategi *triple intervention* pada transaksi *spot*, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga dioptimalkan, termasuk melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Dengan komitmen kuat Bank Indonesia tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS hingga Agustus 2025 tercatat sekitar Rp16.300 per dolar AS, menguat dibandingkan dengan awal April 2025 sebesar Rp16.865 per dolar AS (tanggal 8 April 2025) setelah pengumuman tarif resiprokal AS. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah kembali besar sejak akhir Agustus 2025, baik karena faktor global seperti penurunan FFR yang dinilai kurang besar (*less dovish*) dan *government shutdown* di AS, maupun faktor domestik seperti kerusuhan sosial dan kekhawatiran pasar atas melebarnya defisit fiskal. Nilai tukar Rupiah hingga akhir Desember 2025 tercatat Rp16.675 per dolar AS, atau melemah 3,48% dari posisi akhir Desember 2024, dengan rerata Rp16.466 per dolar AS selama tahun 2025. Secara umum, perkembangan Rupiah relatif stabil jika dibandingkan dengan kelompok mata uang negara

berkembang dan lebih kuat dibandingkan negara maju selain dolar AS. Selain ditopang oleh konsistensi kebijakan stabilisasi, stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung dengan peningkatan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Stabilitas harga terjaga dengan inflasi yang rendah dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy). Inflasi inti terjaga rendah sebesar 2,38% (yoy), seiring konsistensi kebijakan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi *volatile food* (VF) terkendali meski relatif tinggi sebesar 6,21% (yoy) terutama disebabkan karena gangguan produksi dan distribusi akibat kendala cuaca, peningkatan biaya bahan baku produksi, serta dampak bencana di Sumatra. Tetap terkendalnya inflasi VF didukung eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional di berbagai daerah, termasuk melalui Kantor Pusat dan 46 kantor-kantor perwakilan di berbagai daerah. Capaian ini juga merupakan hasil

dari penguatan kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui koordinasi di pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027, dengan langkah-langkah implementasi yang mencakup (i) memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); (ii) meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah; (iii) menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah, terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit; (iv) memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan; serta (v) memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Sementara itu, inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat sebesar 1,93% (yoy), sejalan dengan terbatasnya kebijakan penyesuaian harga yang diatur oleh Pemerintah.

Kebijakan moneter Bank Indonesia selama tahun 2025 terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Sejalan dengan prospek inflasi 2026-2027 yang terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ serta turut mendukung upaya bersama Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, BI-Rate telah turun sebanyak 5 kali sebesar 125 bps dari 6,00% pada Desember 2024 menjadi 4,75% pada Desember 2025 dan menjadi tingkat BI-Rate terendah sejak 2022. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah besarnya tekanan eksternal dari dampak gejolak global. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh melalui intervensi baik transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Kebijakan ekspansi likuiditas Rupiah juga ditempuh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui: (i) penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp730,90 triliun pada akhir tahun 2025 (atau turun Rp186,07 triliun) dan (ii) pembelian SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp332,14 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* sebesar Rp246,68 triliun. Kebijakan ekspansi likuiditas moneter tersebut juga didukung dengan penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang hingga akhir Desember 2025 telah menambah likuiditas perbankan sebesar Rp388,06 triliun.

Jumlah uang beredar meningkat sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong efektivitas ekspansi

likuiditas moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada Desember 2025, pertumbuhan M0 tercatat sebesar 11,4% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,5% (yoy) maupun tahun sebelumnya sebesar 5,0% (yoy). Bahkan, pertumbuhan uang Primer (M0) *Adjusted*, yaitu uang primer yang telah menetralkan dampak KLM, tercatat lebih tinggi, yaitu 16,8% (yoy) dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,3% (yoy). Sementara itu, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2025 tumbuh sebesar 9,6% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada November 2025 sebesar 8,3% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 yang lebih tinggi dipengaruhi oleh ekspansi keuangan Pemerintah dan meningkatnya penyaluran kredit. Pertumbuhan uang yang beredar akan terus dikelola melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga didukung permodalan perbankan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Desember 2025 tercatat tinggi sebesar 25,89%, sementara rasio NPL tetap rendah sebesar 2,05% bruto dan 0,79% neto. Risiko kredit juga terus membaik tecermin dari penurunan rasio *Loan at Risk* (LAR) serta kecukupan CKPN perbankan. Hasil *stress test* menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dengan CAR industri masih di atas 25% pada berbagai skenario. Pertumbuhan kredit pada 2025 mencapai 9,69% (yoy), berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 8–11% (yoy). Kinerja tersebut didukung penguatan KLM, penurunan suku bunga, dan realisasi program prioritas Pemerintah di tengah kondisi makroekonomi yang terjaga. Ke depan, stabilitas sistem keuangan diprakirakan tetap terjaga melalui penguatan sinergi kebijakan Bank Indonesia bersama KSSK.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2025 meningkat 31,04% (yoy) sehingga mencapai Rp65.069,78 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 30,44% (yoy) mencapai 1.358,65 juta transaksi. Transaksi *digital payment* tercatat 14,26 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 39,21% (yoy). Transaksi QRIS terus tumbuh pesat sebesar 139,99% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 59,53 juta dan jumlah *merchant* 42,75 juta. Sementara dari pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,90% (yoy) menjadi Rp1.359,94 triliun. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang berdaya tahan dan struktur yang membaik. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan

Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) tetap terjaga dengan baik. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan adopsi SNAP yang meluas. Sejalan dengan nontunai, Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, serta dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk menjangkau daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebagai wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI serta mendukung kelancaran sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

2.2. Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan

Selain dinamika perekonomian global dan nasional di atas, Bank Indonesia juga terus mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga publik. UU P2SK telah mendorong penguatan peran dan kewenangan Bank Indonesia dalam perekonomian, sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas kelembagaan sebagai wujud pelaksanaan tata kelola yang baik dan profesional. Perspektif ini menegaskan bahwa peluang transformasi ekonomi berjalan beriringan dengan tantangan lingkungan strategis yang menuntut respons kebijakan yang semakin kredibel, terintegrasi, dan adaptif. Lingkungan strategis yang memerlukan penguatan respons dan transformasi kebijakan dan kelembagaan dimaksud termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK dan perlunya menjaga kecermatan, kepatuhan hukum, dan kepentingan Bank Indonesia dalam berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh K/L lain, meningkatnya dampak ketidakpastian global, serta perubahan demografi pegawai yang perlu diimbangi dengan digitalisasi dan otomasi dengan sejumlah manfaat dan risikonya.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis tersebut, UU P2SK telah memperkuat landasan hukum bagi tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia telah menyelesaikan seluruh ketentuan yang diamanatkan oleh UU tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan pada awal Januari 2025. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penyempurnaan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia, termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK. Di samping itu, Bank Indonesia juga perlu menjaga

kecermatan dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk keterlibatan aktif dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi kementerian/lembaga lain guna melindungi kepentingan Bank Indonesia. Upaya tersebut memerlukan koordinasi lintas fungsi, penguatan kapasitas analisis hukum, dan advokasi regulasi yang responsif agar setiap kebijakan dan regulasi baru tetap selaras dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia sesuai mandat UU.

Dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi, penguatan bauran kebijakan bank sentral diperlukan untuk memitigasi dampak rambatan gejolak global, menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti dikemukakan di atas, perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Ketidakpastian pasar keuangan juga tinggi dengan ruang penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang berkurang dan disertai masih tingginya *yield* UST sejalan defisit fiskal AS yang masih besar. Dampak kebijakan tarif resiprokal AS dan meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik juga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini mendorong penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan mengakibatkan peningkatan aliran modal ke *emerging market* (EM) tertahan, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menuntut penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia fokus pada penguatan stabilitas dengan tetap turut mendukung pertumbuhan. Di sinilah pentingnya bauran kebijakan bank sentral, khususnya antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Dari sisi kebijakan moneter, kebijakan suku bunga untuk pencapaian sasaran inflasi perlu didukung dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing. Hal ini agar stabilitas Rupiah tetap terjaga dan berdampak positif pada pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan fiskal di dalam negeri. Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi serta tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan bank sentral tersebut perlu dirumuskan ke dalam kerangka kerja dan pengaturan sebagai acuan dalam merumuskan respon yang diperlukan sesuai dengan dinamika perekonomian global dan nasional yang berkembang.

Di tengah tingginya ketidakpastian, bauran kebijakan ekonomi nasional juga perlu terus diperkuat untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan di atas, ketidakpastian global meningkat disertai dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Di sinilah pentingnya bauran kebijakan ekonomi nasional yang mencakup kebijakan fiskal dan sektor riil sejalan dengan program Asta Cita

Pemerintah, kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia, kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam KSSK, serta kebijakan transformasi sektor riil. Koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ditempuh melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan, serta pengelolaan defisit dan pembiayaan fiskal yang terjaga. Sementara itu, koordinasi dalam mendorong pertumbuhan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal dari Pemerintah dan insentif likuiditas makroprudensial dari Bank Indonesia pada sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kebijakan transformasi sektor riil juga penting untuk makin diperkuat, yakni mencakup kebijakan reformasi struktural dan kebijakan industrialisasi. Penguatan kebijakan reformasi struktural ditempuh melalui perbaikan iklim investasi, penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan keandalan infrastruktur, serta penguatan kerja sama perdagangan dan investasi. Sementara kebijakan industrialisasi diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, memperkuat basis manufaktur, dan memperbaiki ketahanan eksternal.

Selain itu, cepatnya perkembangan teknologi digital dan pergeseran demografi pegawai ke generasi milenial dan generasi Z yang semakin besar menuntut Bank Indonesia untuk mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan profesional. Transformasi digital dimaksud ditempuh secara terintegrasi, yang dikenal dengan *Integrated Digital Central Bank* (IDCB). Dalam kaitan ini, digitalisasi proses bisnis dimulai untuk proses bisnis perumusan bauran kebijakan moneter, makroprudensial,

dan sistem pembayaran dari satuan kerja ke komite dan kemudian ke RDG Bulanan. Proses bisnis perumusan bauran kebijakan yang semula 8 (delapan) tahap dikurangi menjadi hanya 3 (tiga) tahap. Hal ini didukung dengan penguatan proses bisnis di dalam satuan kerja melalui *Collaborative Digital Work Process* (DWP), dimana para pegawai dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam mempersiapkan bahan yang akan disampaikan ke Komite dan RDG secara digital. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) telah dilakukan untuk analisis dan proyeksi sejumlah indikator kunci perekonomian, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kredit perbankan, dan lainnya. Digitalisasi proses bisnis dilakukan secara *end-to-end*, yaitu dari *input* metadata dan penggunaan AI untuk analisis dan proyeksi sejumlah indikator ekonomi kunci, penyusunan bahan hingga pembahasan di Komite dan RDG. Digitalisasi proses bisnis secara bertahap akan terus diperluas ke area kebijakan dan kelembagaan lainnya sebagai bagian dari transformasi digital secara menyeluruh.

Di sisi lain, perkembangan digital dan adopsi teknologi tersebut juga disertai berbagai risiko termasuk potensi ancaman dan serangan siber terhadap sistem dan informasi strategis Bank Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kerangka manajemen risiko teknologi informasi dan ketahanan siber, serta mekanisme respons insiden menjadi prioritas untuk menjaga keberlangsungan layanan dan integritas proses bisnis. Langkah-langkah ini memastikan bahwa inovasi kelembagaan dapat berjalan dengan tetap mengedepankan pengelolaan informasi yang transparan dan bertanggung jawab serta menjaga reputasi Bank Indonesia dalam mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan.

BAB 3

RESPONS KEBIJAKAN BANK INDONESIA






BANK INDONESIA



Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan di Jakarta.

3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2025 diarahkan pada keseimbangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik (*"pro-growth and stability"*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*"pro-growth"*). Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi sesuai BSPI 2030 untuk memperkuat industri jasa pembayaran dan mendorong Ekonomi Keuangan Digital (EKD) nasional, di samping memperluas kerja sama sistem pembayaran antarnegara dan melanjutkan pengembangan Rupiah Digital. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung oleh akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, membangun pasar sekunder yang modern dan dengan standar internasional, serta mengembangkan

instrumen pembiayaan perekonomian. Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk melalui digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bauran kebijakan tersebut sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat UU P2SK yang memperkuat tujuan dan tugas Bank Indonesia. Sesuai UU P2SK, tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tujuan ini dicapai dengan 3 (tiga) tugas, yaitu: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Lebih lanjut, dukungan Bank Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ditempuh melalui 3 (tiga) hal sebagai berikut. Pertama, melalui kebijakan moneter, untuk mencapai inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terkendali sebagai prasyarat bagi berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, baik oleh Pemerintah, perbankan, dunia usaha, investor, maupun masyarakat. Kedua, melalui digitalisasi sistem pembayaran, untuk meningkatkan nilai dan volume transaksi Ekonomi-Keuangan Digital (EKD), mendorong

perputaran (velositas) dan efisiensi pembayaran, serta meningkatkan produktivitas berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, dan didukung pula oleh berkembang sehatnya industri jasa pembayaran nasional. Ketiga, melalui peningkatan kredit/pembiayaan perbankan, yang sangat diperlukan untuk mendorong pembiayaan perekonomian, dan didukung oleh terpeliharanya stabilitas sistem keuangan (SSK). Untuk mendukung ketiga kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan untuk pendalaman PUVA, kebijakan internasional, serta kebijakan untuk mendukung program UMKM dan ekonomi-keuangan syariah.

3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia selama tahun 2025 memperkuat respons bauran kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas perekonomian domestik di tengah dampak rambatan gejala global. Di bidang kebijakan moneter, kebijakan Bank Indonesia ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Langkah ini ditempuh untuk optimalisasi trilema kebijakan moneter, yakni menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan kecukupan cadangan devisa. Sejalan dengan prospek inflasi 2026-2027 yang terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ serta turut mendukung upaya bersama Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, BI-Rate telah diturunkan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps dari 6,00% pada Desember 2024 menjadi 4,75% pada Desember 2025 yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat di tengah besarnya tekanan eksternal dari dampak gejala global. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh melalui intervensi di pasar *off-shore* melalui *Non-Deliverable Forward* (NDF) dan intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Ekspansi likuiditas Rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp186,07 triliun dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp730,90 triliun pada akhir tahun 2025. Selain itu, pembelian SBN yang mencapai Rp332,14 triliun juga dilakukan sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah. Pembelian ini termasuk pembelian SBN di pasar sekunder dan program *debt switching* sebesar Rp246,68 triliun. Kebijakan moneter juga didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan

akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekspansi likuiditas moneter tersebut juga didukung dengan penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang hingga akhir Desember 2025 telah menambah likuiditas perbankan sebesar Rp388,06 triliun.

Kebijakan makroprudensial longgar dan akomodatif terus diperkuat dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan menuju level optimalnya (*pro-growth*) dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Sepanjang 2025, respons kebijakan makroprudensial Bank Indonesia antara lain:

- a) Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar, dengan:
 - i) Memperkuat instrumen KLM pada awal tahun 2025 untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang tersinergi dengan program Asta Cita Pemerintah, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut, pada akhir 2025, Bank Indonesia kembali memperkuat KLM menjadi berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (*forward looking*) sehingga dapat mendorong kredit/pembiayaan baik dari sisi *lending channel* untuk mendukung pembiayaan di sektor-sektor yang selaras dengan kebijakan Pemerintah maupun *interest rate channel* untuk meningkatkan efektivitas transmisi penurunan BI-Rate terhadap suku bunga perbankan, khususnya suku bunga kredit.
 - ii) Mempertahankan instrumen kebijakan makroprudensial lainnya sejak awal tahun 2025 s.d akhir tahun 2025, seperti: (i) Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84%-94%; (iii) Rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) untuk Kredit/Pembiayaan Properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka untuk Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor juga dipertahankan akomodatif dengan nilai paling rendah sebesar 0% untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan;
 - iii) Melonggarkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk memperkuat fleksibilitas likuiditas perbankan dengan menurunkan rasio PLM dari 5% menjadi 4% untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan rasio PLM Syariah dari 3,5% menjadi 2,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS). Selaras dengan itu, fleksibilitas



Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2025 di Jakarta.

repo surat berharga turut disesuaikan, yaitu dari 5% menjadi 4% untuk BUK dan dari 3,5% menjadi 2,5% untuk BUS.

- iv) Meningkatkan batasan rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) melalui penyesuaian besaran parameter kontrasiklikal dari 0% menjadi positif 5% sehingga batasan RPLN yang semula sebesar 30% meningkat menjadi 35% untuk memperkuat pendanaan Bank untuk manajemen likuiditas dan mengoptimalkan penyaluran kredit atau pembiayaan.
- v) Memperkuat aspek inklusif dan berkelanjutan dengan mempertahankan RPIM, memperkuat KLM untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan pembiayaan berbasis syariah.
- b) Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia diarahkan untuk mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan kecukupan pengedaran uang untuk mendukung kelancaran, efisiensi, dan produktivitas berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Pada 2025, respons kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia yang ditempuh antara lain:

- a) Akselerasi digitalisasi ditempuh dengan inovasi instrumen dan perluasan layanan pembayaran digital, penguatan struktur industri dan stabilitas

infrastruktur sistem pembayaran, serta integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional. Hal ini termasuk dalam rangka mendukung inklusi ekonomi dan keuangan UMKM termasuk literasi dan perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia *Fintech Summit and Expo* (FEKDI X IFSE) 2025, BI-OJK Hackathon 2025, QRIS Jelajah Budaya Indonesia 2025, serta Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD).

- b) Perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 31 Desember 2025, yang terdiri dari: i) tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah; dan ii) kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000;
- c) Memperluas akseptasi pembayaran digital melalui kebijakan skema harga QRIS yang lebih murah untuk merchant Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO). Dari sisi inovasi, fitur QRIS telah diperluas melalui peluncuran QRIS TAP (tanpa pindai) berbasis teknologi *Near Field Communication* (NFC);
- d) Pelaksanaan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang berfokus pada aspek pengembangan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri,

termasuk penguatan struktur industri melalui peningkatan implementasi sertifikasi kompetensi di bidang sistem pembayaran serta penerbitan pengaturan industri SP

- e) Penguatan struktur industri sistem pembayaran ditempuh melalui perluasan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Sedangkan, dari sisi kelembagaan industri sistem pembayaran, penguatan dilakukan melalui fungsi surveilans dan manajemen risiko, termasuk terhadap transaksi ilegal dan ancaman siber;
- f) Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran terus dijaga melalui optimalisasi pemanfaatan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 yang mencakup layanan transfer secara kolektif, pembayaran atas dasar permintaan, dan transfer debit secara langsung. Elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah juga diperkuat melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta peningkatan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI);
- g) Sinergi internasional diperluas melalui implementasi *Regional Payment Connectivity* (RPC) di kawasan ASEAN dan pembukaan koridor kerja sama QRIS Antarnegara sepanjang 2025 a.l dengan negara mitra baru yaitu Indonesia-Jepang, serta inisiasi uji coba terbatas (*sandbox*) QRIS Antarnegara Indonesia – Korea Selatan dan Indonesia-Tiongkok.
- h) Penyediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain dengan melanjutkan kerja sama kelembagaan dalam

pengedaran uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil) melalui kegiatan kas keliling, kas titipan, dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat;

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarannya. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB 4

TRANSFORMASI BANK INDONESIA





Bank Indonesia terus melanjutkan inisiatif transformasi yang telah ditempuh sejak tahun 2018 guna memperkuat kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia dalam merespons lingkungan strategis yang berkembang. Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, Bank Indonesia memperkuat sinergi bauran kebijakan guna mendukung transformasi ekonomi nasional sejalan dengan program Asta Cita. Selain dinamika perekonomian global dan nasional yang terjadi sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia juga perlu mencermati perubahan lingkungan strategis yang berasal dari pesatnya digitalisasi serta perubahan demografi pegawai yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Perkembangan ini menjadi beberapa faktor yang mendorong Bank Indonesia untuk mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan profesional. Bank Indonesia juga menegaskan komitmen untuk menjaga kecermatan, kepatuhan hukum, serta kepentingan institusi melalui keterlibatan aktif dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan lintas kelembagaan. Selain itu, dinamika kebutuhan dan proses bisnis yang terus berkembang berdampak pada kebutuhan Bank Indonesia untuk melakukan reprioritasi program kerja, serta memastikan implementasi yang senantiasa memenuhi standar mutu nasional dan internasional. Mencermati berbagai lingkungan strategis tersebut, selain melakukan penguatan respons kebijakan dan prioritas program kerja, Bank Indonesia mempertajam sejumlah agenda transformasi dan mengimplementasikannya secara bertahap.

Sepanjang 2025, inisiatif transformasi Bank Indonesia mencakup area kebijakan dan area kelembagaan. Pada area kebijakan, transformasi diarahkan pada penguatan kerangka kerja dan pengaturan yang selaras dengan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Transformasi kelembagaan juga terus diperkuat dan dipertajam, terutama dalam rangka mengimplementasikan mandat UU P2SK. Pada area organisasi dan proses kerja, transformasi diarahkan pada penguatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi, selaras, dan lengkap. Sementara itu, area transformasi SDM dan budaya kerja ditempuh untuk mendukung pelaksanaan digital *Business Process Reengineering* (BPR) melalui penguatan sumber daya manusia melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan kapabilitas baru, dan penguatan *Employee Value Proposition* (EVP). Selanjutnya, area transformasi digital difokuskan pada penguatan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan melalui penyempurnaan *business process re-engineering* berbasis digital yang mengutamakan

collaborative work dan didukung pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI).

4.1. Transformasi Kebijakan

Bank Indonesia melanjutkan penguatan bauran kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UU. Sepanjang 2025, di tengah tantangan lingkungan strategis yang semakin berat, Bank Indonesia memperkuat pengaturan terkait implementasi dari integrasi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran sebagai bagian dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang telah diterbitkan pada pertengahan 2024. BKBI dimaksudkan untuk memperkuat integrasi kerangka kerja perumusan dan pelaksanaan antarkebijakan utama, yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung. Integrasi ini konsisten dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia, yakni mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah menetapkan pengaturan internal BKBI sebagai ketentuan turunan dari PBI BKBI yang diterbitkan pada tahun 2024. Langkah ini mencerminkan penguatan bauran kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, yang didukung oleh kebijakan pendukung guna mencapai tujuan Bank Indonesia. Transformasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembentukan dan penyempurnaan ketentuan Bank Indonesia, baik dalam bentuk PBI maupun ketentuan internal, pada area Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, dan Kebijakan Sistem Pembayaran. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga menetapkan berbagai ketentuan eksternal dan internal untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, baik pada area kebijakan utama maupun pendukung. Penerbitan ketentuan tersebut didasarkan pada penyempurnaan konsepsi dan kerangka kerja kebijakan, yang diikuti dengan penguatan landasan hukum yang selaras dengan kerangka BKBI. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat proses bisnis statistik melalui digitalisasi dan peningkatan sinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam membangun integrasi data perizinan sektor keuangan. Upaya transformasi juga diarahkan untuk memperkuat transmisi kebijakan, antara lain melalui penerbitan *BI Floating Rate Note* (FRN) serta pendalaman infrastruktur pasar keuangan melalui penguatan interkoneksi sistem

FMI BI dan perluasan layanan CCP PUVA. Keseluruhan langkah tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan tata kelola kebijakan yang semakin modern, terintegrasi, dan berbasis data guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.1.1. Transformasi di Bidang Moneter

1) Reformasi Regulasi Area Moneter

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter melalui penyempurnaan pengaturan yang selaras dengan BKBI. Penyempurnaan ini menjadi landasan hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang moneter sesuai amanat UU BI jo. UU P2SK.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI dan ketentuan internal tentang Kebijakan Moneter. Pengaturan ini ditujukan sebagai pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sebagai acuan bagi Bank Indonesia untuk pembentukan ketentuan terkait pelaksanaan kebijakan moneter, serta acuan utama bagi publik terkait pelaksanaan kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan-ketentuan terkait untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yakni ketentuan internal tentang Pengendalian Moneter dan ketentuan internal tentang Pengelolaan Cadangan Devisa Negara. Pengkinian pengaturan tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola sekaligus merupakan tindak lanjut implementasi kerangka kerja pengelolaan cadangan devisa negara dalam rangka mencapai kecukupan cadangan devisa pada jangka menengah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan jangka pendek untuk melaksanakan kebijakan moneter dan kewajiban internasional.

Pada 2025, Bank Indonesia juga tengah menyusun rancangan ketentuan internal tentang Pengelolaan Aset Sekuritas yang selaras dengan PBI BKBI. Peraturan tersebut ditujukan untuk memastikan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan aset sekuritas sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan Undang-Undang, sekaligus menjadi acuan utama bagi peraturan pelaksanaan lebih lanjut serta pedoman umum dalam pelaksanaannya. Penerbitan ketentuan terkait Pengelolaan Aset Sekuritas tersebut direncanakan terbit pada triwulan I 2026.

2) Digitalisasi Proses Bisnis Statistik

Kebutuhan akan data dan informasi yang berkualitas semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan yang dinamis disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Bank Indonesia telah menginisiasi digitalisasi proses bisnis statistik guna meningkatkan kualitas data, mengoptimalkan pemanfaatan data, serta memastikan penyediaan data yang komprehensif, tepercaya, akurat, terkini, hingga mudah diakses oleh pengguna yang selaras dengan *best practices*. Inisiasi tersebut didorong oleh kebutuhan data yang responsif dan adaptif sehingga dapat mendukung perumusan dan pelaksanaan BKBI serta memenuhi komitmen penyediaan data dan informasi pada tingkat nasional dan internasional, termasuk data dan informasi yang akurat bagi publik.

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah mengembangkan proses bisnis statistik, yang mencakup perolehan data, integrasi input ke Pusat Data, serta pemrosesan dan diseminasi statistik. Pengembangan tersebut menjadi kerangka dasar integrasi proses bisnis statistik secara *end-to-end*, baik dari sisi teknologi maupun nonteknologi, sebagai upaya memperkuat peran data dalam mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan. Penguatan ini diarahkan untuk mewujudkan proses bisnis statistik yang lebih terstandar, efisien, adaptif terhadap kebutuhan kebijakan, serta selaras dengan *best practices*.

Dari sisi perolehan data, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya antara lain penguatan aplikasi pelaporan, modernisasi survei, serta sarana pertukaran data antar lembaga. Bank Indonesia telah menyusun standarisasi dan otomasi proses validasi serta verifikasi sehingga setiap data yang diterima dapat diproses secara cepat, akurat, konsisten, dan berkelanjutan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, Bank Indonesia juga menginisiasi pengembangan konsep *helpdesk* terintegrasi yang dirancang untuk memberikan layanan publik yang lebih responsif, dengan dukungan *knowledge management* yang komprehensif. Inisiatif ini sejalan dengan arah transformasi digital Bank Indonesia untuk membangun ekosistem pelaporan yang lebih efisien, modern, dan akuntabel, serta sekaligus memperkuat kepercayaan para pelapor dan mendukung penyediaan data yang berkualitas.

Dalam memperkuat sarana pertukaran data antar lembaga, Bank Indonesia telah mengembangkan

Central Bank Service Excellence Achievement

"Driving Service Excellence through Digitalization:
Agile Central Banking Services Journey in a Dynamic Global Landscape"

JAKARTA, 26 NOVEMBER 2025



Peluncuran Central Bank Service Excellence Achievement (CBSEA) di Jakarta.

Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) serta Laporan Lalu Lintas Devisa–Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (LLD–KPPK) untuk mendorong *straight through process*. Pengembangan tersebut juga ditujukan untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia serta mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Bank Indonesia juga berkolaborasi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Kemeninveshil) dalam membangun integrasi data terkait perizinan sektor keuangan melalui integrasi sistem aplikasi layanan perizinan sektor keuangan Bank Indonesia (*e-Licensing* Bank Indonesia yang Agile, Simple, dan Effective atau EASE) dengan *One Single Submission* (OSS) Kemeninveshil. Hal ini diluncurkan melalui forum Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) sebagai salah satu forum strategis tahunan Bank Indonesia untuk mengapresiasi sekaligus mengomunikasikan berbagai capaian kinerja dan inovasi layanan kebanksentralan kepada para pemangku kepentingan pada 26 November 2025.

Pada aspek integrasi *input* ke pusat data, Bank Indonesia telah mengakselerasi pengaliran data secara terotomasi dari aplikasi sumber data ke pusat data sebagai fondasi digitalisasi pemrosesan dan diseminasi yang andal dan *straight through*. Inisiatif ini berdampak pada peningkatan efisiensi alur kerja, penurunan potensi kesalahan, dan peningkatan pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan. Pada aspek pemrosesan dan diseminasi, Bank

Indonesia telah menuntaskan digitalisasi pengolahan data serta digitalisasi diseminasi statistik sebagai penutup rantai transformasi digital proses bisnis statistik dari hulu ke hilir. Penuntasan ini memastikan hasil statistik dapat diproses dan didiseminasikan secara lebih efisien, terstandar, dan tepat waktu untuk mendukung perumusan kebijakan.

Penguatan proses bisnis statistik dari sisi nonteknologi dilakukan melalui *overarching activities*, antara lain *revisiting* relevansi produk statistik, penyempurnaan metodologi survei, pengembangan indikator baru, serta penguatan *data quality* dan *metadata management*. Proses ini dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan arah kebijakan data dan informasi Bank Indonesia serta keterpaduan dengan statistik lembaga lain yang tersedia secara publik. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data serta memastikan penyediaan data yang komprehensif, tepercaya, akurat dan terkini. *Revisiting* relevansi ini merupakan bagian dari strategi transformasi digital yang bersifat berkelanjutan, sehingga penyediaan data dan informasi statistik dapat terus menunjang perumusan bauran kebijakan berbasis data. Selain itu, penyempurnaan metodologi survei juga dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan efisiensi pelaksanaan survei secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung penguatan proses bisnis statistik secara keseluruhan, Bank Indonesia juga memperkuat tata kelola data dan informasi statistik. Hal ini dilakukan melalui penyelesaian digitalisasi pengelolaan hak akses, penguatan *quality assurance*

(QA), dan perlindungan data dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah mengeksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence-AI*) melalui pengembangan data sintetik untuk mendukung proses bisnis statistik. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa metodologi data sintetik efektif sebagai instrumen ganda, yaitu dalam memperkuat perlindungan data nonpublik (*privacy-enhancing technologies/PETs*) serta sebagai alat augmentasi untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas statistik dan analisis. Di samping itu, Bank Indonesia juga memperkuat penerapan metodologi QA publikasi statistik berbasis standar metadata *Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)*-like guna memastikan kualitas proses dan hasil statistik yang lebih terjaga.

3) Pengembangan Instrumen Moneter

Bank Indonesia mengembangkan instrumen **OM Pro-Market** dalam rangka mendukung tercapainya **Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) yang modern dan maju, guna memperkuat transmisi BKBI serta mendukung pembiayaan pembangunan**. Instrumen OM *Pro-Market* di pasar Rupiah saat ini mencakup SRBI, SUKBI, dan Repo. Sementara itu, instrumen kebijakan moneter di pasar valas mencakup SVBI, SUVBI, dan DNDF. Dalam rangka memperkuat instrumen operasi moneter untuk mendukung pendalaman pasar uang domestik agar mendorong *Overnight Index Swap (OIS) market* berbasis *INDONIA*, Bank Indonesia mengembangkan Bank Indonesia *Floating Rate Notes (BI-FRN)*. Penerbitan BI-FRN telah dimulai sejak 17 November 2025 melalui *Dealer Utama PUVA*.

Penyempurnaan instrumen bertujuan untuk menciptakan produk PUVA yang lebih variatif, likuid, efisien, dan kredibel, antara lain melalui pengembangan ragam, tenor, dan nominal transaksi, serta pembagian tahap implementasinya dalam OM melalui *Dealer Utama PUVA*. Selain itu, untuk mendukung efektivitas penggunaan BI-FRN oleh para pelaku pasar, Bank Indonesia juga melaksanakan sosialisasi bersama *National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR)* pada 11 Desember 2025. Ke depan, penerbitan BI-FRN akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan *OIS market* serta inisiatif pengembangan instrumen *floating rate* oleh market. Selain itu, untuk mengakselerasi pengembangan pasar valas domestik, Bank Indonesia juga telah melakukan perluasan *currency* dalam OM Valas melalui instrumen swap dan spot non USD dalam mata uang RMB (mata uang

Tiongkok) dan JPY (mata uang Jepang) yang telah di implementasikan sejak 23 Desember 2025.

4.1.2. Transformasi di Bidang Makroprudensial

1) Reformasi Regulasi Area Makroprudensial

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja kebijakan makroprudensial melalui penyempurnaan pengaturan yang selaras dengan BKBI. Penyempurnaan ini menjadi landasan hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang makroprudensial sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang P2SK (UU BI jo. UU P2SK). Sebagai bagian dari pelaksanaan BKBI, Bank Indonesia juga terus memperkuat pengaturan terkait pengelolaan likuiditas perbankan dan perekonomian sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Reformasi regulasi makroprudensial dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam UU BI jo. UU P2SK. Penguatan ini mencakup penyempurnaan kerangka kebijakan, penguatan instrumen, serta pengembangan mekanisme implementasi yang lebih efektif dan *forward-looking*.

Pada 2025, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan internal mengenai Kebijakan Makroprudensial (KMP) sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial agar konsisten dengan mandat Bank Indonesia. Ketentuan dimaksud sekaligus menjadi acuan utama dalam penyusunan ketentuan pelaksanaan kebijakan makroprudensial di lingkungan internal Bank Indonesia. Sebagai bagian dari pelaksanaan BKBI, ketentuan eksternal dan/atau internal untuk mendukung pengelolaan likuiditas perbankan dalam rangka mendorong penyaluran kredit/pembiayaan diterbitkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjadi acuan bagi satuan kerja di Bank Indonesia. Dalam hal ini, implementasi kebijakan makroprudensial juga diperkuat melalui skema pemberian insentif yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan untuk mendorong optimalisasi penyaluran kredit/pembiayaan. Pelaksanaan kebijakan ini didasarkan atas komitmen penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (*lending channel*), serta penetapan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*). Insentif tersebut diberikan dalam bentuk pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan

giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah secara rata-rata. Kebijakan KLM selanjutnya diperkuat melalui penerbitan PBI dan PADG mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), dengan peningkatan insentif yang berasal dari transmisi suku bunga (*interest rate channel*) menjadi paling tinggi sebesar 1% dan insentif yang berasal dari penyaluran kredit/pembiayaan (*lending channel*) menjadi paling tinggi sebesar 4,5%, sehingga total insentif KLM tetap paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK, yang mulai berlaku sejak 16 Desember 2025. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan yang sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyempurnakan berbagai ketentuan makroprudensial. Ketentuan dimaksud antara lain terkait Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (RIM-PLM), Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP), Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka kendaraan bermotor, serta Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN). Penyempurnaan ketentuan RIM-PLM dan PLJP dilakukan untuk mendukung perluasan instrumen operasi moneter (OM), termasuk mengakomodasi obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi sebagai *underlying* transaksi repo yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM dan agunan PLJP. Sementara itu, kebijakan pelonggaran LTV/FTV dan uang muka yang telah diterapkan sejak tahun 2021 diperpanjang hingga akhir Desember 2026 guna menjaga momentum pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang optimal. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pendanaan bank untuk manajemen likuiditas dan mengoptimalkan penyaluran kredit atau pembiayaan, Bank Indonesia menyesuaikan parameter kontrasiklikal dalam formula RPLN dari 0% menjadi 5% sehingga batasan rasio RPLN meningkat dari 30% menjadi 35% yang berlaku mulai 1 Juni 2025.

Selanjutnya, sejalan dengan penguatan mandat Bank Indonesia dalam UU P2SK, pada 29 Desember 2025 telah diterbitkan ketentuan internal terkait Protokol Manajemen Krisis (PMK) Terintegrasi. Ketentuan dimaksud menjadi landasan dalam penerapan protokol manajemen krisis yang terintegrasi dengan kerangka nasional. Integrasi difokuskan pada area kebijakan dan kelembagaan dalam merespons dinamika lingkungan strategis, termasuk akselerasi digitalisasi dan karakteristik krisis yang semakin kompleks, cepat menyebar, serta bersumber dari

berbagai pemicu. Dalam implementasinya, PMK Terintegrasi diperkaya dengan indikator yang lebih komprehensif yang mencakup risiko, ketahanan, dan pemicu krisis, dengan mempertimbangkan dimensi Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, serta Infrastruktur Teknologi (TIKMI), guna meningkatkan efektivitas deteksi dini dan respons kebijakan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

2) Pengembangan Kerangka Kerja Makroprudensial

Bank Indonesia terus memperkuat perumusan kebijakan makroprudensial melalui penyusunan kerangka kerja yang komprehensif guna mendukung pelaksanaan kebijakan yang selaras dengan BKBI. Penguatan ini diarahkan untuk membangun fondasi kebijakan yang lebih terintegrasi, mencakup kejelasan model bisnis, kebutuhan layanan, model operasional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi kebijakan makroprudensial.

Sepanjang 2025, penguatan tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penerbitan berbagai ketentuan sebagai bagian dari kerangka kebijakan makroprudensial. Kerangka kerja ini disusun sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi perumusan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial, sehingga tetap sejalan dengan mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka pengelolaan likuiditas perbankan dan perekonomian melalui penyempurnaan ketentuan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan makroprudensial. Penguatan ini diwujudkan antara lain melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor prioritas serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia. KLM memberikan insentif likuiditas berbasis kinerja, baik melalui penyaluran kredit pada sektor tertentu maupun penyesuaian suku bunga kredit agar lebih selaras dengan arah kebijakan moneter. Dengan demikian, pengelolaan likuiditas tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memperkuat intermediasi perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia juga telah merumuskan kerangka kerja kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB). Kerangka tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai inisiatif strategis Bank Indonesia untuk

mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta mendukung keuangan berkelanjutan.

4.1.3. Transformasi di Bidang Sistem Pembayaran

1) Reformasi Regulasi Area Sistem Pembayaran

Dalam rangka mendukung implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia telah memperkuat aspek pengaturan. Penguatan aspek pengaturan dimaksud dilakukan melalui penerbitan ketentuan yang relevan guna mendukung stabilitas, efisiensi, dan integrasi sistem pembayaran nasional, serta diselaraskan dengan ketentuan BKBI.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 4 Tahun 2025 dan ketentuan internal tentang Kebijakan Sistem Pembayaran (KSP). Penerbitan peraturan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran dan memperkuat kerangka kerja kebijakan sistem pembayaran sebagai bagian dari BKBI. Pengaturan KSP akan menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan sistem pembayaran agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia maupun bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Pembayaran. Kebijakan sistem pembayaran merupakan bagian dari BKBI yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan kebijakan utama lainnya serta kebijakan pendukung. Adapun sasaran kebijakan sistem pembayaran meliputi: i) velositas yang cepat, mudah, dan murah; ii) struktur industri penyelenggara jasa sistem pembayaran yang sehat dan efisien; iii) infrastruktur sistem pembayaran yang aman dan stabil; serta iv) ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip independensi dalam interdependensi kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan sistem pembayaran di industri ditengah pesatnya arus digitalisasi, Bank Indonesia juga telah menetapkan pokok pengaturan PBI Industri Sistem Pembayaran. Penguatan penataan struktur industri melalui peraturan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan industri sistem pembayaran yang konsolidatif dan berdaya tahan di tengah prospek peningkatan transaksi Elektronifikasi Keuangan Daerah (EKD) dan

interkonektivitas antarpelaku. Selanjutnya, dalam rangka persiapan implementasi serta memperoleh masukan terhadap pengaturan, Bank Indonesia telah melakukan uji empiris pokok pengaturan PBI dimaksud bersama asosiasi dan industri. Uji empiris ditujukan untuk mengetahui tingkat kesiapan industri sekaligus memperoleh masukan dalam proses pengawasan, pemrosesan perizinan, dan/ atau persetujuan. Berdasarkan hasil pelaksanaan uji empiris, ketentuan dimaksud dinilai telah memenuhi aspek kesiapan untuk diterbitkan dan diberlakukan sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan penerapan mekanisme masa transisi guna mendukung proses penyesuaian para pihak terkait.

Bank Indonesia juga menerbitkan PBI No. 10 Tahun 2025 dan PADG tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran sebagai wujud implementasi inisiatif regulasi pada tanggal 24 Desember 2025. Pengaturan tersebut akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan SP ke depan sehingga dapat meningkatkan daya tahan struktur industri SP di tengah pesatnya arus digitalisasi. Penguatan penataan struktur industri pada peraturan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan industri SP yang konsolidatif dan berdaya tahan sesuai dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Ke depan, Bank Indonesia tengah mempersiapkan implementasi PBI tersebut terhadap seluruh PJP guna memastikan kepatuhan yang seragam dan menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang lebih sehat.

Lebih lanjut, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan internal tentang Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam pada tanggal 31 Desember 2025. Sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Rupiah memiliki kedudukan yang penting sebagai simbol kedaulatan negara dan kekuatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan internal disusun sebagai acuan Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan uang Rupiah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan menjaga tata kelola yang baik agar uang Rupiah tetap berperan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang ekonomi dan stabilitas sistem pembayaran.

2) Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran

Bank Indonesia secara berkelanjutan memperkuat infrastruktur SP yang tangguh dan terintegrasi guna mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Pengembangan infrastruktur SP terus dilanjutkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, secara lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Infrastruktur SP diimplementasikan melalui penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur SP ritel dan *wholesale*; antara lain mencakup *new BI-FAST*, *Fast Payment Industri*, pengembangan *BI-Payment Clear*, *BI-RTGS* Generasi III, serta standardisasi ISO 20022.

Sepanjang 2025, Bank Indonesia melakukan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran (SP) ritel dan *wholesale* secara menyeluruh, mulai dari tahap penyusunan hingga finalisasi konsepsi. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia mulai mengembangkan berbagai fitur infrastruktur SP yang mencakup penguatan *Fast Payment Industry* serta pengembangan *BI-RTGS* Generasi III, dengan karakteristik kepesertaan yang terbuka serta opsi penyediaan infrastruktur baik secara independen maupun berbasis *sharing*. Upaya ini terus diperkuat melalui pendalaman asesmen untuk menghasilkan konsepsi yang komprehensif, serta didukung oleh komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan dan pelaku industri guna memastikan arah kebijakan yang berkelanjutan, andal, dan inovatif.

Dukungan penyediaan dan pengembangan infrastruktur untuk memberikan kemudahan bagi pengguna berdampak pada transaksi pembayaran ritel yang terus tumbuh positif. Volume transaksi ritel melalui *BI-FAST* pada tahun 2025 tercatat mencapai 4,77 miliar transaksi atau tumbuh 39,13% (yoy), dengan nominal transaksi mencapai Rp 11.960 triliun. Capaian tersebut menegaskan peran strategis infrastruktur ritel sebagai tulang punggung akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, sekaligus memperkuat efektivitas transmisi kebijakan dan inklusi ekonomi keuangan secara lebih luas.

3) Pengembangan Inovasi dan Perluasan Akseptasi

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendukung inovasi dan akseptasi di industri sistem pembayaran. Melalui BSPI 2030, Bank Indonesia menginisiasi pembentukan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), sebelumnya disebut Bank Indonesia-Digital Innovation Center (BIDIC), yang dikembangkan untuk mendorong inovasi dan akseptasi digital secara seimbang dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Tujuan

ini akan dicapai melalui tiga kebijakan utama, yaitu: (i) mendorong inovasi layanan pembayaran; (ii) memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat; dan (iii) memperkuat aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Ketiga besaran strategi tersebut akan diimplementasikan dalam wadah yang kolaboratif antara Bank Indonesia dan industri. Inisiatif tersebut merupakan upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan inovasi layanan pembayaran yang diarahkan untuk dapat berlangsung di dalam koridor persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif dengan industri.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah menyusun konsepsi dan kerangka kerja sampai dengan tahap eksplorasi. Cakupan inovasi PIDI akan berfokus pada 3 (tiga) area utama, yaitu memperkuat manajemen risiko untuk membangun daya resiliensi yang kuat, mendorong inovasi keuangan, dan memperkuat *global service export*. Ketiga cakupan inovasi tersebut akan menjadi fokus eksplorasi yang akan dilakukan pada setiap proses bisnis utama PIDI, yakni: (i) *in-depth sandboxing* yang berfungsi sebagai ruang uji coba inovasi secara efektif, memungkinkan pengujian berbagai teknologi dan model bisnis baru dalam ekosistem sistem pembayaran; (ii) *market intelligence*, yang berperan dalam memantau dan menganalisis dinamika serta tren perkembangan industri ekonomi digital secara menyeluruh; (iii) *design thinking*, yaitu proses iteratif yang mencakup kegiatan riset dan asesmen, dilakukan secara kolaboratif bersama pelaku industri, serta melibatkan pakar di bidangnya.

Lebih lanjut, Bank Indonesia juga telah melaksanakan eksplorasi ide inovatif PIDI melalui Hackathon. Cakupan eksplorasi pada Hackathon 2025 berfokus pada 3 (tiga) area, yaitu: (i) *AI as a Service (AlaaS) for digital-delivered service export*; (ii) inovasi keuangan dan layanan publik; serta (iii) manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Ketiga cakupan inovasi tersebut akan menjadi fokus eksplorasi yang akan dilakukan pada setiap proses bisnis utama BIDIC, yakni *market intelligence*, *innovation experimentation*, dan *in-depth sandboxing*. Pemenang *BI-OJK Hackathon 2025* diumumkan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan *Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2025* yang terpilih dari 2.336 orang pendaftar dan 743 proposal inovasi. Pelaksanaan Hackathon bukan hanya perlombaan, namun menjadi upaya pengembangan talenta digital Tanah Air yang inovatif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ke depan, PIDI diharapkan menjalankan peran strategis sebagai pusat pengembangan dan penelitian



Opening Ceremony High Level Campaign (HLC) Local Currency Transaction & Cross-Border QR Payment Linkage Indonesia-China di Jakarta.

teknologi dalam sistem pembayaran terkini, yang diharapkan mampu menciptakan *positive feedback loop* dalam mempercepat laju inovasi ekonomi digital, khususnya pada penguatan layanan pembayaran digital nasional.

4) Pengembangan Konektivitas Sistem Pembayaran Lintas Negara

Bank Indonesia terus melanjutkan komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas melalui kesepakatan kerja sama dengan beberapa bank sentral. Kerja sama dilakukan dalam rangka mewujudkan konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia ke kawasan. Ke depan, Bank Indonesia akan terus melakukan perluasan kerja sama *Regional Payment Connectivity* (RPC) dengan negara lainnya. Arah strategis inisiatif internasional tersebut ditujukan untuk mendorong interkoneksi lintas negara serta perluasannya dalam koridor yang menjamin kepentingan nasional. Inisiatif ini akan diwujudkan melalui dua besaran kebijakan, yaitu: (i) memperluas cakupan kerjasama pembayaran antarnegara; dan (ii) mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antarnegara. Prinsip yang terkandung dalam kerangka RPC akan menjadi landasan bagi inisiatif ini dalam mengimplementasikan kedua besaran kebijakan tersebut.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia turut terlibat aktif dalam proyek Nexus dengan mempersiapkan proses

onboarding pada Nexus. Akselerasi proses *onboarding* tersebut diawali dengan ditandatanganinya *letter of intent* keikutsertaan Bank Indonesia pada Nexus. Proyek Nexus ini merupakan inisiatif pengembangan konektivitas SP lintas negara untuk memperkuat integrasi SP domestik dan antarnegara yang lebih cepat, murah, mudah, transparan, dan inklusif. Proyek Nexus merupakan inisiatif *Bank for International Settlements* (BIS) melalui *BIS Innovation Hub* yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran antarnegara dengan menghubungkan berbagai pembayaran instan domestik (*instant payment systems/IPS*) secara global. Nexus dirancang untuk melakukan standarisasi metode konektivitas agar IPS domestik dapat terhubung satu sama lain, sehingga memberikan solusi pembayaran antarnegara yang efisien dan terjangkau bagi individu dan pelaku usaha guna meningkatkan partisipasi ekonomi global. Pada akhir tahun 2025, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Nexus Global Payment, entitas yang dibentuk untuk mengelola implementasi Proyek Nexus, untuk mengeksplorasi bisnis dan *scheme* Nexus sebagai tindak lanjut penerimaan Bank Indonesia sebagai anggota yang berpartisipasi dalam Proyek Nexus.

5) Pengembangan Infrastruktur Data

Bank Indonesia terus melanjutkan eksplorasi dan eksperimentasi terkait pengembangan infrastruktur data SP untuk memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan. Upaya pengembangan pusat data sistem pembayaran pada tahun 2025 difokuskan pada tindak lanjut

konsep pengembangan infrastruktur data yang telah final untuk memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan.

Arah strategis ini ditempuh melalui pengembangan *Payment Info* serta *BI-Payment Clear* sebagai infrastruktur publik untuk pemberian layanan pada berbagai *usecase*. Pengembangan *BI-Payment Info* diarahkan sebagai infrastruktur publik yang menyediakan antarmuka dalam pengolahan data granular (*data as a services*). Sedangkan, pengembangan *BI-Payment Clear* diarahkan untuk memperkuat integritas transaksi *retail fast payment* dan menjadi acuan untuk pengembangan infrastruktur data. Penguatan integritas transaksi juga akan didukung oleh pengembangan modul *fraud detection system* (FDS) yang tersedia pada *payment clear*. Selanjutnya, perolehan data profil dan transaksi granular dilakukan melalui sistem *capturing* yang akan dibangun melalui mekanisme *push* untuk perolehan data periodik serta mekanisme *pull* untuk perolehan data insidental.

Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mendukung integrasi dan konsolidasi data transaksi secara nasional, sekaligus memperkuat pengawasan dan keamanan sistem pembayaran di era digital. Dengan identifikasi transaksi yang lebih presisi, otoritas dapat melakukan deteksi lebih dini terhadap potensi *fraud*, mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar, serta memitigasi risiko sistemik secara lebih efektif.

4.1.4. Transformasi di Bidang Kebijakan Pendukung

1) Reformasi Regulasi Area Kebijakan Pendukung

a) Ketentuan internal tentang Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)

Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA melalui reformasi pengaturan di PUVA yang sejalan dengan amanat UU P2SK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penguatan kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA sejalan dengan upaya Bank Indonesia mewujudkan PUVA yang modern dan maju sebagaimana dimuat dalam BPPU 2030. PUVA yang modern dan maju akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, yang selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia menetapkan arah baru pendalaman pasar uang dan pasar valas melalui penguatan kerangka *regulatory reform* dengan menerbitkan ketentuan internal berupa Peraturan Dewan Gubernur (PDG) tentang Kebijakan PUVA. PDG ini mengatur kerangka kerja kebijakan PUVA secara menyeluruh dengan pendekatan *principle-based*, sehingga lebih adaptif (*agile*) terhadap dinamika pasar, selaras dengan kebutuhan industri (*industry friendly*), serta mampu mengakomodasi inovasi dengan tetap memperhatikan aspek digitalisasi, inklusivitas, dukungan terhadap keuangan berkelanjutan, serta memenuhi *international best practices*. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan 5 (lima) ketentuan internal teknis atau Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern) terkait PUVA sebagai ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 6 Tahun 2024 tentang PUVA. Ketentuan pelaksanaan tersebut mencakup ketentuan terkait *dealer* utama pasar uang dan pasar valuta asing, transaksi pasar uang, penyelenggara sarana transaksi, penyelesaian transaksi bilateral dalam mata uang lokal, serta lembaga pendukung dan profesi penunjang pasar uang dan pasar valuta asing.

b) Ketentuan internal tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia (DIBI)

Perumusan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel menuntut ketersediaan data dan informasi yang komprehensif, tepercaya, akurat, mutakhir, serta mudah diakses. Untuk itu, pada 2025 Bank Indonesia menerbitkan ketentuan internal mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia (DIBI) sebagai tindak lanjut PBI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia (PBI DIBI). Ketentuan ini memperkuat kerangka tata kelola data dan informasi yang baik dan profesional, sekaligus menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan DIBI di seluruh satuan kerja. Kebijakan DIBI diarahkan untuk memastikan ketersediaan data yang berkualitas guna mendukung perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan bank sentral, memenuhi komitmen nasional dan internasional, serta mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi bagi publik. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada prinsip relevansi, standar profesional dan praktik terbaik, pemanfaatan

teknologi yang tepat, perlindungan data, serta penguatan koordinasi dan sinergi.

c) Ketentuan mengenai Ekonomi Syariah

Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan dan pengembangan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar). Hal ini bertujuan untuk memperkuat proses kerja dan tata kelola kebijakan eksyar dalam mendukung kebijakan utama Bank Indonesia, sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mendorong pencapaian Indonesia sebagai pusat eksyar dunia. Penguatan kebijakan eksyar dilakukan dengan *revisit blueprint* kebijakan eksyar yang akan menjadi dasar penyempurnaan ketentuan internal terkait pengembangan ekonomi syariah.

Sejalan dengan upaya memperkuat visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global serta merespons dinamika lingkungan strategis, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan internal tentang kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Ketentuan yang diterbitkan pada September 2025 tersebut disusun secara *principle-based* agar lebih adaptif dan dilakukan sejumlah penajaman substansi agar lebih selaras dengan *Blueprint* Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030. Penajaman substansi yang dilakukan antara lain mencakup: (i) penajaman tujuan, sasaran, dan instrumen kebijakan eksyar untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia; (ii) penguatan proses kerja dan tata kelola kebijakan eksyar terutama melalui inovasi dan digitalisasi; dan (iii) penguatan implementasi kebijakan eksyar melalui penguatan sinergi lintas satker, otoritas, dan mitra strategis terkait.

d) Ketentuan tentang Kebijakan Internasional

Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan dan pengembangan terkait kebijakan internasional. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dan memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui kebijakan internasional yang produktif, proaktif, dan integratif. Hal tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian mandat Bank Indonesia, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan kebijakan internasional dilakukan dengan *revisit* kerangka kerja kebijakan internasional yang menjadi

dasar penyempurnaan ketentuan internal terkait kebijakan internasional dan menjadi bagian pengaturan lebih lanjut dari BKBI.

Pada 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal mengenai kebijakan internasional pada 26 September 2025. Ketentuan disusun sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis global yang sarat ketidakpastian dan menyebabkan instabilitas ekonomi. Di tengah kondisi tersebut, terdapat peluang kerja sama internasional baru seiring meningkatnya adopsi teknologi dan peran strategis bank sentral. Perubahan lingkungan global tersebut menuntut pembaruan kebijakan internasional Bank Indonesia agar tetap relevan dan adaptif.

Ketentuan internal mengenai kebijakan internasional merupakan salah satu bentuk penguatan mandat Bank Indonesia sesuai UU P2SK. Rancangan ketentuan kebijakan internasional disusun dengan memperhatikan Penjelasan Umum UU Bank Indonesia jo. UU P2SK yang menegaskan bahwa perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar, menuju sistem ekonomi global yang semakin terintegrasi. Kondisi tersebut memudahkan pergerakan arus modal lintas negara serta memperketat persaingan global. Di sisi lain, dinamika perekonomian nasional juga memerlukan penegasan tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan landasan hukum yang semakin kuat, ketentuan internal tentang kebijakan internasional diharapkan mampu menjadi instrumen pendukung bagi Bank Indonesia dalam merespons tantangan global sekaligus mengoptimalkan peluang kerja sama internasional demi mendukung pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

e) Ketentuan Internal mengenai Ekonomi dan Keuangan Daerah

Implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah didukung oleh Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA). KEKDA berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan utama Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas

sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan terkait KEKDA agar pelaksanaannya senantiasa berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia menyusun penyempurnaan terhadap acuan dan pedoman umum terkait KEKDA dalam bentuk ketentuan internal. Penyempurnaan yang dilakukan mencakup kerangka kerja (*framework*) KEKDA, yaitu tujuan, sasaran, strategi, proses, dan tata kelola. Secara khusus, tujuan, sasaran, strategi, dan proses KEKDA dilakukan berdasarkan prinsip sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi. Mengacu pada prinsip sistem tata kelola tersebut, pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia terkait KEKDA didasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu: (i) bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; (ii) sejalan dengan mandat dan norma pada peraturan perundang-undangan dan/atau prosedur; (iii) merupakan bagian dari bauran kebijakan nasional; dan (iv) menerapkan transparansi kebijakan.

f) **Kerangka Kerja Kebijakan Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB)**

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia juga memperkuat kerangka kerja untuk meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan (IEKB). Kerangka kebijakan IEKB mengacu pada mandat UU P2SK No.4 Tahun 2023 kepada Bank Indonesia Pasal 35A, yang disusun untuk mencapai 3 (tiga) sasaran/pilar utama.

Pertama, ekosistem ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing, yang merefleksikan peran Bank Indonesia dalam mengembangkan ekosistem ekonomi inklusif yang terintegrasi, berdaya saing, serta berdaya tahan terhadap risiko perubahan iklim guna mendukung stabilitas sistem keuangan. Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain peningkatan daya saing UMKM dan kelompok

subsisten dari hulu ke hilir, perluasan akses pasar produk UMKM di pasar domestik maupun global (ekspor), serta pengembangan infrastruktur dan digitalisasi untuk menopang proses bisnis UMKM yang berdaya saing.

Kedua, pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan yang optimal, yang mencerminkan upaya Bank Indonesia dalam mendorong alokasi dan akses pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju ekonomi yang inklusif dan rendah karbon. Adapun strategi yang ditempuh meliputi penguatan kebijakan keuangan inklusif dan berkelanjutan, asesmen riset dan kajian keuangan inklusif dan berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur pembiayaan.

Ketiga, literasi dan sinergi ekonomi-keuangan yang meluas, yang merefleksikan peran Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi pelaku perbankan, dunia usaha termasuk UMKM, serta masyarakat terhadap konsep dan praktik ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi Bank Indonesia dengan kementerian/lembaga dalam pengembangan ekonomi-keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

2) **Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan**

Bank Indonesia terus mendukung pengembangan dan penguatan *Central Counterparty* (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pasar keuangan. CCP berperan dalam menyediakan jasa kliring, penjaminan, dan manajemen risiko untuk transaksi antar bank di PUVA. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia berkoordinasi dengan penyelenggara CCP, yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), untuk memastikan pengembangan dan penguatan CCP sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia dan standar internasional *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang dikeluarkan *Committee on Payments and Market Infrastructures-International Organization of Securities Commissions* (CPMI-IOSCO). Penguatan ini diarahkan untuk memastikan tata kelola dan manajemen risiko CCP yang komprehensif.

Selain itu, pengembangan CCP memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3i) dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya.

Peluncuran *Tri-Party Agent Repo* dan Penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* untuk Pengembangan Pasar Keuangan Indonesia

Jakarta, 6 Oktober 2025



Peluncuran *Tri-Party Agent Repo* dan Perluasan Penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) di Jakarta.

Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dengan penyelenggara CCP, perbankan, dan penyedia *electronic trading platform* (ETP) untuk mengembangkan konektivitas sistem CCP yang *straight through processing* (STP), termasuk dengan BI-RTGS dan BI-SSSS yang merupakan sistem setelmen dana dan surat berharga. Bank Indonesia juga bersinergi dengan OJK dalam implementasi pengaturan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar antarbank yang tidak dikliringkan melalui CCP (Non-Centrally Cleared Derivative-NCCD) dan *capital requirement* atas eksposur bank terhadap CCP yang diterbitkan oleh OJK.

Sepanjang 2025, Bank Indonesia menempuh berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan CCP. Upaya tersebut antara lain melalui penyelenggaraan seminar nasional bersama otoritas dan pelaku pasar untuk memperkuat pemahaman terkait mitigasi risiko transaksi derivatif, ketentuan OJK tentang *capital* dan *margin requirement* untuk NCCD, serta aspek *netting jurisdiction* dan implikasinya terhadap keberlakuan *close-out netting* secara penuh. Kegiatan yang berlangsung pada 4 Agustus 2025 tersebut diikuti oleh perbankan, asosiasi, penyelenggara infrastruktur pasar keuangan, dan korporasi, serta otoritas terkait seperti BI, OJK, Kemenkeu, dan LPS. Selain itu, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) sebagai asosiasi yang mewakili pelaku pasar uang dan pasar valuta asing di Indonesia. Kolaborasi dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan

diskusi kepada pelaku industri perbankan dengan menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, APUVINDO, dan PT KPEI sebagai penyelenggara CCP. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman perbankan mengenai peran, manfaat, dan risiko implementasi CCP, mendukung kesiapan industri dalam mengantisipasi implikasi prudensial dan operasional, serta menyelaraskannya dengan arah regulasi nasional dan standar internasional. Kegiatan diadakan pada 3 Oktober 2025 dan diikuti oleh peserta dari 105 (seratus lima) bank, khususnya unit *treasury*, *finance*, manajemen risiko, dan operasional.

Bank Indonesia juga mendorong perluasan fungsi CCP sebagai *tri-party agent* (TPA) dalam transaksi repo. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala pelaksanaan transaksi repo antarbank sebagai bentuk optimalisasi instrumen pengelolaan likuiditas. Layanan TPA Repo oleh CCP resmi beroperasi pada 29 September 2025 melalui kerja sama dan kolaborasi erat antara Bank Indonesia, OJK, KPEI, serta 8 (delapan) *pilot bank* selaku penyelenggara CCP. Operasionalisasi layanan ini menandai tonggak penting dalam pengembangan ekosistem repo nasional yang terintegrasi, aman, dan efisien. Melalui penatausahaan dan pengelolaan agunan dari pengguna layanan TPA secara terpusat dan sistematis, TPA Repo berperan mendukung efisiensi transaksi serta meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dalam memanfaatkan instrumen repo sebagai sarana pengelolaan likuiditas. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk

mengakselerasi pendalaman PUVA, serta mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter guna meningkatkan kapasitas pembiayaan perekonomian nasional. r Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUV

4.2 Transformasi Kelembagaan

Pada tahun 2025, Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) sebagai bentuk penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, serta dukungan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sesuai mandat UU P2SK. Penguatan kerangka BKK adalah langkah strategis untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan. Penerapan BKK menggunakan strategi 3P, yaitu perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi di setiap area kelembagaan. Penguatan tersebut diwujudkan melalui reformasi regulasi berupa penyusunan ketentuan internal mengenai BKK beserta ketentuan turunan di area kelembagaan. Ketentuan internal dimaksud juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan BKK sekaligus sebagai acuan untuk mengintegrasikan keseluruhan proses BKK dengan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI), sehingga dapat menyelaraskan strategi jangka menengah dan tahunan antara area kelembagaan dan area kebijakan.

Sejalan dengan penguatan kerangka BKK, Bank Indonesia juga memperkuat integrasi tata kelola pada lima area utama, yaitu pengendalian moneter, pengadaan, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (EPML), pengelolaan cadangan devisa, serta pengelolaan uang rupiah. Penguatan ini dilakukan melalui asesmen kecukupan pengaturan yang mengintegrasikan fungsi hukum, manajemen risiko, dan audit internal. Integrasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan kredibel dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Upaya ini ditempuh melalui penguatan koordinasi antar fungsi serta penyelarasan proses pengambilan keputusan sehingga semakin memperkuat ketahanan kelembagaan (*institutional strength*) Bank Indonesia. Secara umum, kelima area tersebut dinilai telah memadai dari aspek kecukupan ketentuan, keandalan manajemen risiko, dan kecukupan pengendalian internal.

4.2.1. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja

Pada area organisasi dan proses kerja, transformasi diarahkan pada penguatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi, selaras, dan lengkap, termasuk penguatan kerangka kerja dan berbagai ketentuan

kelembagaan sebagai tindak lanjut atas implementasi UU P2SK. Upaya ini didukung oleh *streamlining* proses bisnis dan proses kerja berbasis digital. Hal ini ditempuh guna mewujudkan organisasi dengan proses bisnis yang lebih sederhana, ringkas, dan standar, serta proses kerja yang *agile* dan sejalan dengan kebutuhan di era digital.

1) Reformasi Regulasi di area Organisasi dan Proses Kerja

Reformasi regulasi pada area organisasi dan proses kerja merupakan langkah transformatif yang dilakukan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan efisiensi proses bisnis di Bank Indonesia. Langkah ini ditempuh untuk memastikan organisasi dan proses kerja di Bank Indonesia senantiasa dapat beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Reformasi regulasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan maupun pelaksanaan tugas pada area organisasi dan proses kerja dapat berjalan secara optimal. Sepanjang tahun 2025, telah diterbitkan ketentuan sbb.:

a) Ketentuan Internal turunan Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK)

Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan turunan BKK. Ketentuan turunan dimaksud terdiri dari ketentuan internal terkait: (i) manajemen strategis dan program kerja; (ii) manajemen proses bisnis dan fungsi organisasi; (iii) manajemen risiko; (iv) manajemen audit intern; dan (v) manajemen fungsi hukum. Penerbitan ketentuan ini melengkapi penguatan ketentuan terkait sumber daya, yang mencakup manajemen sumber daya keuangan dan pengelolaan kekayaan, yang telah diterbitkan pada 2024. Penguatan landasan hukum di area kelembagaan ditujukan untuk memastikan integrasi antarfungsi di area kelembagaan guna mencapai sasaran BKK dengan dukungan organisasi yang efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, dan tata kelola kelembagaan yang berkepatuhan.

b) Ketentuan Internal terkait Sistem Pengambilan Keputusan (SPK)

Pada 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal terkait sistem pengambilan keputusan di Bank Indonesia sebagai penyempurnaan atas ketentuan sebelumnya. Sesuai UU BI sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU P2SK, Rapat Dewan Gubernur (RDG) adalah

forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis, yang dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial. Selanjutnya, UU mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang Anggota Dewan Gubernur serta tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur (PDG). Untuk memenuhi delegasi UU BI dimaksud, pada 2025 Bank Indonesia menerbitkan ketentuan internal mengenai sistem pengambilan keputusan (SPK) di Bank Indonesia dan peran Anggota Dewan Gubernur, sebagai penyempurnaan atas ketentuan internal mengenai pengambilan keputusan di Bank Indonesia dalam era digital yang terbit pada tahun 2022.

Berdasarkan pengaturan terbaru tersebut, kebijakan Bank Indonesia terdiri atas kebijakan bank sentral dan kebijakan kelembagaan. Adapun sifat kebijakan Bank Indonesia meliputi: (i) Kebijakan Prinsipil dan Strategis; (ii) Implementasi Kebijakan Prinsipil dan Strategis; dan (iii) Kebijakan yang Tidak Dinyatakan Prinsipil dan Strategis. Adapun proses pengambilan keputusan dilakukan secara adaptif dan *streamlined* melalui penerapan prinsip 3S (Simplifikasi, Standarisasi, dan Sistemisasi). Selanjutnya, ketentuan juga mengatur mengenai peran Anggota Dewan Gubernur dalam kebijakan bank sentral dan kelembagaan Bank Indonesia mencakup 4 (empat) aspek, yaitu peran i) dalam RDG; ii) dalam Komite; iii) sebagai pengarah program strategis dan program transformasi; dan iv) sebagai koordinator pelaksanaan tugas operasional satuan kerja. Peran Anggota Dewan Gubernur tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, keahlian, pengalaman, kapasitas, dan keseimbangan beban tugas dan wewenang antar Anggota Dewan Gubernur.

c) Ketentuan Internal terkait Manajemen Informasi Kebijakan dan Kelembagaan (MIKK)

Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal mengenai manajemen informasi kebijakan dan kelembagaan sebagai penyempurnaan atas ketentuan tentang manajemen informasi Bank Indonesia. Ketentuan terbaru yang diterbitkan pada 30 Juni 2025 dimaksud merupakan tindak lanjut

atas pengaturan internal mengenai pengelolaan informasi Bank Indonesia (PIBI) yang terbit pada akhir 2024. Penerbitan ketentuan internal mengenai manajemen informasi kebijakan dan kelembagaan (MIKK) diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi yang akurat, relevan, dan aman melalui manajemen informasi yang efektif, efisien dan bertata kelola. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan menyeimbangkan aspek (i) efektifitas informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia; (ii) inovasi dalam penyediaan informasi di Bank Indonesia; serta (iii) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain UU Pelindungan Data Pribadi dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

d) Ketentuan Internal terkait Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia (PERBI)

Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik dan profesional dalam proses pembentukan peraturan, Bank Indonesia menerbitkan PBI dan ketentuan internal mengenai pembentukan peraturan di Bank Indonesia. Penyusunan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penerapan tata kelola yang baik dan profesional serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU PUU), khususnya terkait penguatan aspek teknik penyusunan peraturan melalui metode omnibus, partisipasi masyarakat (*meaningful participation*), serta penyusunan peraturan secara elektronik. Penyusunan ketentuan dimaksud ditujukan untuk (i) memastikan proses pembentukan peraturan di Bank Indonesia berlangsung sesuai tugas dan wewenang Bank Indonesia serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta (ii) menyediakan landasan hukum serta pedoman yang komprehensif dalam pembentukan peraturan di Bank Indonesia.

2) Penguatan dan Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia

Penguatan dan penyempurnaan organisasi Bank Indonesia dilakukan selaras dengan strategi organisasi dalam rangka menjalankan mandat UU Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan UU P2SK. Upaya tersebut berbasis strategi (*strategy-driven*), dengan memperhatikan kerangka

kerja pada masing-masing area serta memastikan kesinambungan antara struktur organisasi dan proses bisnis. Penguatan organisasi juga mencakup penerapan praktik terbaik (*best practices*) serta pemanfaatan infrastruktur dan teknologi secara adaptif sesuai kebutuhan. Seluruh inisiatif penguatan dan penyempurnaan organisasi dimaksud dilandasi oleh prinsip 3S, yaitu Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia secara efektif, efisien, dan berkepatuhan.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan organisasi satuan kerja fungsi tata kelola yang mencakup fungsi hukum, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit intern. Sebagai tindak lanjut atas penguatan kerangka integrasi tata kelola, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan pada fungsi organisasi hukum, manajemen risiko, dan audit intern. Penyempurnaan fungsi 3 satuan kerja dimaksud ditujukan untuk penguatan koordinasi antar fungsi serta penyelarasan proses pengambilan keputusan sehingga semakin memperkuat ketahanan kelembagaan (*institutional strength*) Bank Indonesia. Hal tersebut juga sebagai wujud komitmen Bank Indonesia untuk terus memperkuat sistem tata kelola yang selama ini telah berjalan baik sehingga lebih efisien, transparan, dan kredibel dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Mengacu pada *best practices* tata kelola di berbagai bank sentral di dunia, penguatan integrasi tata kelola di Bank Indonesia meliputi kerangka pengendalian untuk memastikan kecukupan ketentuan, pengambilan keputusan yang jelas dan sesuai kewenangan (*check and balance*), tersedianya mekanisme pengendalian risiko, serta kepatuhan atas implementasi ketentuan (*compliance*). Penyempurnaan fungsi tata kelola tersebut juga ditegaskan melalui penerbitan perubahan ketiga atas ketentuan internal mengenai Organisasi Bank Indonesia beserta pengaturan turunannya pada masing-masing satuan kerja.

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan organisasi pada fungsi pengembangan pasar keuangan. Pasal 312 UU P2SK mengamanatkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bappebti kepada Bank Indonesia untuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang terkait dengan derivatif PUVA. Dalam kaitan itu, penyempurnaan organisasi dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan pengaturan dan pengembangan kebijakan derivatif

PUVA serta pengelolaan derivatif PUVA, termasuk aspek perizinan dan koordinasi dengan otoritas terkait. Penguatan ini dilakukan selaras dengan visi BPPU 2030 yang mencakup penguatan *product, pricing, participant*, dan infrastruktur (3P+I), sehingga fungsi pengembangan pasar keuangan menjadi lebih responsif terhadap dinamika pasar, memperkuat efektivitas strategi operasi moneter pro-market, serta mendorong pendalaman pasar keuangan domestik.

Pada 2025, Bank Indonesia juga memperkuat fungsi organisasi di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) Ibu Kota Nusantara (IKN). Penguatan dilakukan untuk mendukung koordinasi dan dukungan operasional pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia di tingkat nasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengamanatkan Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang termasuk dalam proses perpindahan ke IKN. Optimalisasi mekanisme koordinasi pelaksanaan tugas unit kerja Bank Indonesia di KOPERBI IKN terus dilakukan. Bank Indonesia telah membentuk unit kerja yang bertugas di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) IKN sebagai wujud perwakilan kehadiran Bank Indonesia di IKN. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan penugasan SDM yang berkantor di KOPERBI IKN secara berkala dan menyelaraskan *timeline* pemindahan SDM sesuai dengan rencana persiapan pemindahan Ibu Kota Negara serta memperhatikan kesiapan infrastruktur dasar yang diperlukan. Seluruh langkah penguatan fungsi organisasi Bank Indonesia dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, serta *check and balance* guna menjamin pelaksanaan tugas yang akuntabel dan transparan.

Selanjutnya, Bank Indonesia melanjutkan agenda transformasi kelembagaan melalui penyempurnaan organisasi pada fungsi pengelolaan cadangan devisa. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penguatan kerangka kerja pengelolaan cadangan devisa, antara lain melalui penguatan fungsi analisis dan proyeksi likuiditas, serta optimalisasi pengelolaan pinjaman dan kerjasama keuangan internasional (KKI). Dengan langkah ini, fungsi pengelolaan cadangan devisa diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam memastikan kecukupan cadangan devisa jangka menengah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan

jangka pendek dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan kewajiban internasional.

3) Business Process Re-engineering (BPR)

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan *Digital Work Process-Digital Decision Making (DWP-DDM)* secara berkelanjutan sejalan dengan visi organisasi sebagai bank sentral digital terdepan. Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan melalui eliminasi redundansi dan digitalisasi proses dengan tetap mengedepankan tata kelola, serta kolaborasi proses kerja antar satuan kerja atau unit kerja sejalan dengan prinsip *one input, one process, dan multi purposes*. Proses dimaksud dilakukan melalui penajaman proses bisnis, evaluasi kebutuhan, pengembangan *platform*, pengujian, uji coba dan sosialisasi internal.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan *Digital Workplace (DWP)* sebagai bagian dari implementasi konsepsi *Integrated Digital Central Bank (IDCB)* dalam rangka mendukung digitalisasi proses kerja dan penguatan tata kelola pengambilan keputusan. Pengembangan DWP diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam penyusunan materi kebijakan serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis data. Sebagai bagian dari pengembangan tersebut, Bank Indonesia mengimplementasikan konsepsi *Digital Workplace* terbaru (*New DWP*) pada proses Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan. Implementasi ini dilakukan untuk memfasilitasi kolaborasi penyusunan materi pada berbagai tahapan proses perumusan bauran kebijakan serta mendukung pemanfaatan data dan informasi dari pusat data secara lebih optimal. Evaluasi terhadap implementasi *New DWP* dilakukan secara berkala dan iteratif guna memastikan bahwa pengembangan sistem dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis perumusan kebijakan serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas tata kelola dalam proses pengambilan keputusan.

Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, Bank Indonesia melakukan berbagai penyempurnaan pada kapabilitas *DWP-DDM*. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan kapabilitas *straight-through processing*, penguatan pengaturan hak akses yang lebih *prudent* dan bertata kelola, serta pengembangan fitur *meeting management* yang terintegrasi secara lebih *seamless* dengan *Microsoft Outlook*. Selain itu, dilakukan pula pengembangan kapabilitas *data analytics* pada beberapa indikator

utama guna mendukung digitalisasi proses bisnis pelaksanaan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI). Pengembangan DWP juga diselaraskan dengan penyempurnaan berbagai ketentuan terkait, termasuk ketentuan mengenai Bauran Kebijakan Bank Indonesia dan Sistem Pengambilan Keputusan, guna memastikan konsistensi antara digitalisasi proses kerja dengan kerangka tata kelola kelembagaan. Ke depan, Bank Indonesia akan terus melanjutkan pengembangan dan perluasan implementasi *DWP-DDM* ke berbagai area proses pengambilan keputusan lainnya. Selain itu, pada area Operasi Moneter *Pro-Market*, pendalaman kerangka kerja serta pengembangan lanjutan *DWP-DDM* Pelaksanaan Bauran Kebijakan terus dilakukan untuk semakin memperkuat digitalisasi proses kebijakan yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data.

4.2.2. Transformasi SDM dan Budaya Kerja

Pelaksanaan digital BPR juga didukung penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui penyempurnaan ketentuan terkait SDM, penguatan kepemimpinan, pengembangan *new capabilities*, serta penguatan *employee value proposition (EVP)*. Transformasi SDM dilakukan melalui pendekatan yang lebih terencana dan berbasis data, dengan menempatkan analisis kebutuhan SDM sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data terkait profil pegawai, kompetensi, kinerja, serta proyeksi kebutuhan organisasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan SDM yang diambil bersifat tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan SDM yang terencana tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan struktural ketenagakerjaan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh, memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan, serta memastikan keberlanjutan kinerja di tengah dinamika lingkungan yang terus berkembang.

1) Reformasi Regulasi di Area SDM dan Budaya Kerja

Reformasi regulasi pada area SDM dan budaya kerja merupakan langkah penting untuk memperkuat pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan berintegritas di Bank Indonesia. Transformasi ini ditempuh untuk memastikan kebijakan dan pengelolaan SDM mampu menjawab dinamika kebutuhan organisasi dan tantangan lingkungan strategis yang berkembang, termasuk perubahan demografi pegawai dan pesatnya digitalisasi. Reformasi regulasi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola SDM dan budaya kerja agar

mendukung kinerja organisasi yang optimal serta berkelanjutan.

Pada 2025, Bank Indonesia terus melakukan penguatan kerangka kebijakan SDM sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan organisasi yang semakin adaptif, profesional, dan bertata kelola baik. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan berbagai ketentuan yang mencakup aspek organisasi, pemenuhan, pemeliharaan, serta penguatan tata kelola (*governance*). Penerbitan ketentuan internal mengenai organisasi Bank Indonesia, mencakup pengaturan terkait beberapa jabatan strategis di Bank Indonesia guna memperkuat dukungan terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas organisasi. Selain itu, telah diterbitkan ketentuan internal mengenai serah terima jabatan pemimpin satuan kerja yang mencakup penyalarsan pengaturan mengenai mekanisme Penunjukan, Penugasan Tetap (Pj.), dan Penugasan Sementara (Plt. dan Plh.), serta penyesuaian mekanisme dan kewenangan penunjukan pegawai pengganti pemimpin satuan kerja yang berhalangan.

Pada aspek tata Kelola (*governance*), telah diterbitkan ketentuan internal mengenai kode etik dan pedoman perilaku di Bank Indonesia serta beberapa ketentuan internal lainnya. Dari sisi pengelolaan SDM, telah diterbitkan ketentuan internal mengenai manajemen karier, pemenuhan internal, dan pengelolaan tenaga kerja PKWT, serta ketentuan mengenai manfaat pensiun pegawai Bank Indonesia. Untuk semakin memperkuat tata kelola pelaksanaan, telah dilakukan penyusunan pedoman pelaksanaan implementasi pemenuhan internal dan manajemen karier pegawai Bank Indonesia. Berbagai penyempurnaan pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerangka kebijakan SDM agar semakin adaptif terhadap kebutuhan organisasi, sekaligus mampu mendukung pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.

2) Penguatan Strategi Perencanaan SDM dan Sukses Kepemimpinan

Bank Indonesia terus mendorong SDM yang berkinerja tinggi dan berakhlak mulia guna mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi pengelolaan SDM yang didukung oleh *Digital Business Process* (DBP). Hal ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yang unggul, baik dari sisi kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku. Pengelolaan SDM juga diarahkan untuk

menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional, dengan memiliki aspek *3-Smart*, yaitu berkompentensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*).

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah menyusun perencanaan SDM jangka menengah periode 2025–2030. Perencanaan tersebut mencakup strategi pemenuhan dan pengembangan SDM secara komprehensif, dengan mempertimbangkan optimalisasi formasi sebagai dampak implementasi digitalisasi proses bisnis. Perencanaan ini menjadi landasan dalam memperkuat pengelolaan SDM yang adaptif dan selaras dengan kebutuhan organisasi ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga menyusun konsepsi kebijakan manajemen karier untuk mengakselerasi pencapaian aspek *3-Smart*, yang selanjutnya akan dituangkan dalam ketentuan internal serta pedoman teknis manajemen karier dan skema pemenuhan SDM internal.

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan *Digital Business Process* (DBP) manajemen karier. Pengembangan bertujuan untuk memetakan *pool of succession*, baik eksisting maupun ke depan, serta memastikan ketersediaan SDM berbasis hasil asesmen *key variable* kepemimpinan yang mengacu pada aspek *3-Smart*. Penguatan pengelolaan SDM juga dilakukan melalui optimalisasi strategi pemenuhan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kuantitas, pemenuhan SDM dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu: (i) *build, buy*, dan *borrow* dari eksternal, (ii) promosi, reposisi, dan rotasi, serta (iii) penugasan internal.

Sementara itu, dari sisi kualitas, penguatan difokuskan pada pengembangan kompetensi melalui perencanaan yang terarah, termasuk optimalisasi Program Tugas Belajar (PTB). Optimalisasi PTB dilakukan dengan penetapan target kandidat serta pemilihan program studi yang selaras dengan kebutuhan *current skill* dan *future skill* Bank Indonesia. Pada tahun 2025, pelaksanaan PTB menunjukkan capaian yang signifikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai yang diberangkatkan mencapai 84 orang, melampaui target yang ditetapkan sebesar 65 orang. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan tingginya minat dan kesiapan pegawai untuk meningkatkan kapasitas akademik, tetapi juga menunjukkan komitmen lembaga dalam mempercepat penguatan talenta melalui investasi pendidikan formal.

WISUDA

PROGRAM PENDIDIKAN CALON PEGAWAI ASISTEN MANAJER (PCPM) ANGKATAN 39

Jakarta, 19 Desember 2025



Wisuda Program Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM) Angkatan 39 di Jakarta.

3) Penguatan Strategi Pemenuhan dan Pemeliharaan SDM

Bank Indonesia terus memperkuat pemenuhan SDM berkualitas melalui transformasi strategi rekrutmen dan penguatan manajemen karier di tengah pesatnya digitalisasi yang memengaruhi pola ketenagakerjaan dan kebutuhan keahlian baru. Upaya ini diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang adaptif, memiliki kepemimpinan yang kuat, serta mampu bekerja secara optimal dalam mendukung transformasi kelembagaan menuju bank sentral digital. Penguatan strategi pemenuhan SDM dilakukan melalui penyempurnaan pendekatan rekrutmen eksternal dengan skema *build, buy, dan borrow*, yang mencakup rekrutmen Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM), pemenuhan kebutuhan kompetensi spesifik melalui *special hire* atau *multi level entry* (MLE), serta pemanfaatan tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan program magang untuk kebutuhan berbasis proyek. Melalui berbagai mekanisme ini, Bank Indonesia dapat menghadirkan tenaga profesional dengan keahlian spesifik untuk memperkuat kapasitas kerja pada bidang-bidang tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, pengolahan data, serta inovasi sistem digital. Selain itu, pemenuhan SDM internal juga terus dilaksanakan secara bertahap sebagai tindak lanjut penyempurnaan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di satuan kerja.

Sepanjang 2025, Bank Indonesia terus memperkuat *employee value proposition* (EVP) 3.0 dalam rangka

meningkatkan *engagement* pegawai. Penguatan EVP antara lain ditempuh melalui program remunerasi yang kompetitif, pemeliharaan kesehatan yang berfokus pada aspek fisik dan mental, serta penguatan program pensiun yang berkelanjutan. Implementasi EVP tersebut dilakukan melalui evaluasi secara berkala berbasis *market salary survey*, di mana struktur remunerasi Bank Indonesia dijaga agar tetap kompetitif, relevan, dan mampu menarik serta memotivasi talenta terbaik. Pada tahun 2025, penguatan remunerasi ini diwujudkan melalui tunjangan kepemimpinan dan insentif transformatif, yang dirancang untuk mengapresiasi peran strategis pegawai sekaligus mendorong manajemen perubahan dan adaptasi dalam proses inovasi di tengah dinamika organisasi. Selain itu, pada tahun 2025, Bank Indonesia juga mengembangkan kebijakan kesehatan yang lebih holistik dan preventif. Perluasan manfaat *medical check-up* untuk seluruh jenjang, penguatan *Employee Assistance Program* (EAP), serta pembentukan tim kerja *well-being* menjadi bagian dari upaya sistematis menjaga kesehatan pegawai sejak dini. Dari sisi program pensiun, melalui Program Pensiun Berkah, pegawai dibekali kesiapan mental, kesehatan pascakerja, sekaligus ruang untuk menemukan kembali minat, potensi, dan panggilan hidup pascakerja. Bagi yang ingin terus berkontribusi, jalur pengembangan profesional dan *talent matching* membuka peluang untuk tetap berkarya, baik secara profesional, sosial, maupun spiritual.

Penguatan strategi pengelolaan SDM tersebut turut didukung oleh pelaksanaan penugasan pegawai pada

berbagai lembaga eksternal, baik di dalam maupun luar negeri, serta lembaga afiliasi yang relevan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Penugasan eksternal merupakan instrumen pengembangan SDM yang memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pengalaman kerja di lembaga eksternal, baik pada lembaga mitra, instansi pemerintah lainnya, organisasi internasional, maupun forum strategis yang relevan. Skema ini dirancang untuk memperluas perspektif, memperkaya pengalaman profesional, serta memperkuat jejaring kelembagaan. Komitmen tersebut juga memperoleh pengakuan internasional melalui perolehan Stevie Awards 2025 dalam kategori *Innovation in Human Resources Management, Planning and Practice*.

4) Pengembangan Kapabilitas Digital SDM Bank Indonesia

Pengembangan kapabilitas digital bagi SDM merupakan bagian penting dari transformasi SDM dan budaya kerja di Bank Indonesia. Kapabilitas ini diperlukan untuk mendukung digitalisasi proses kerja dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan kapabilitas digital yang kuat, SDM dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas, mendorong efisiensi, dan memperkuat daya saing kelembagaan di era digital.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia mengimplementasikan postur program pembelajaran yang terstruktur dan berbasis kompetensi digital, yang mencakup program pengembangan karier dan pengembangan kompetensi. Program pengembangan karier ditujukan bagi pegawai yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, sementara program pengembangan kompetensi dilaksanakan sebagai program reguler bagi seluruh pegawai dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jabatan. Seluruh program tersebut mengacu pada kurikulum Bank Sentral Digital yang dirancang untuk memperkuat kompetensi digital, kepemimpinan, dan profesionalisme pegawai.

Sejalan dengan penguatan pengelolaan SDM berbasis data, Bank Indonesia terus menyempurnakan aplikasi HR *SuperApps* sebagai bagian dari implementasi kebijakan HR *SuperApps Digital Policy 4P* (perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM). Penyempurnaan dilakukan melalui optimalisasi *product journey*, penguatan peran pimpinan, peningkatan integrasi fitur lintas modul, perbaikan *user experience*, serta penguatan kapabilitas analitik berbasis metadata yang mencakup manajemen karier dan kinerja, kompetensi, serta

perencanaan SDM. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang pengelolaan SDM secara *end-to-end* dan berbasis data. Selain itu, hal ini juga memperkuat *engagement* pegawai melalui informasi yang lebih transparan atas perjalanan karier dan peluang pengembangan, sehingga mendorong pengembangan pegawai secara lebih optimal.

Bank Indonesia mengembangkan HR *SuperApps* sebagai *employee experience platform* yang terintegrasi dan berbasis data, yang menyediakan informasi kepegawaian secara komprehensif, interaktif, dan dapat diakses secara *mobile*. Aplikasi ini terintegrasi dengan *Learning Management System* (LMS) untuk mendukung personalisasi pembelajaran, serta dilengkapi dengan fitur profil kompetensi pegawai, hasil asesmen potensi yang mencakup karakter kepemimpinan dan *job fitness*, serta rekomendasi pelatihan untuk menutup kesenjangan kompetensi (*competency gap*). Pengembangan lanjutan mencakup pengayaan database profil pegawai, integrasi dengan sistem presensi, serta penambahan *personalized content* melalui *enriched information*. Selain itu, dilakukan penguatan *engagement features* melalui layanan terintegrasi seperti pendaftaran *in-house training* (IHT) dan *rescheduling General Medical Check-Up* (GMCU), serta pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) melalui *chatbot* sebagai personal assistant yang mendukung interaksi dua arah dan memberikan informasi serta rekomendasi terkait kinerja, kompetensi, dan kesehatan pegawai secara lebih adaptif, responsif, dan personal.

Lebih lanjut, Bank Indonesia melakukan integrasi modul kompetensi antara Program Meningkatkan Kompetensi (PMK) yang diselenggarakan oleh pihak eksternal dengan modul pembelajaran internal. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, dengan menghindari duplikasi materi pelatihan serta mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pengembangan kompetensi. Pegawai yang telah mengikuti pelatihan eksternal dengan topik yang sejalan tidak diwajibkan untuk mengikuti kembali pelatihan internal dengan materi yang sama.

Ke depan, program pembelajaran kepemimpinan profesional akan terus disempurnakan melalui transformasi program pengembangan karier. Program dimaksud antara lain melalui implementasi kurikulum baru *Competency Development Program* (CDP), *Executive Central Banking Program* (ECP), dan *Leadership Program* (SESPI), serta sertifikasi karir kebanksentralan dalam bentuk *Certified Central*

Banking Officer (CCBO). Dalam implementasinya, CDP berfungsi sebagai modul pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai Bank Indonesia sesuai *job description*. Sementara itu, ECP menjadi program pendidikan untuk pegawai Kelompok Pegawai Potensial (KPP) dan diakhiri dengan sertifikasi karier CCBO sebagai salah satu prasyarat kenaikan jenjang kepegangatan. Selain itu, pembelajaran internal akan diintegrasikan dengan program tugas belajar pegawai, termasuk pendidikan lanjutan pada jenjang S2 dan S3, guna memastikan kesinambungan pengembangan kompetensi secara holistik dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Melalui pendekatan yang terintegrasi tersebut, diharapkan kualitas SDM BI dapat terus meningkat secara berkelanjutan serta mampu mendukung kebutuhan organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik internal, nasional, dan internasional di masa depan.

4.2.3. Transformasi Digital

Transformasi digital Bank Indonesia terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Area transformasi digital difokuskan pada penguatan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan melalui penyempurnaan *business process re-engineering* berbasis digital yang mengutamakan *collaborative work* dan didukung pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*. Upaya tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) visi inovasi digital, yakni: (i) pengembangan digitalisasi di area sistem pembayaran dan pendalaman pasar uang (*integrated digital payment system and finance*); (ii) pengembangan digitalisasi pendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta SDM (*integrated digital central bank*); dan (iii) peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara *end-to-end (integrated digital technology)*.

1) Pengembangan Integrated Digital Payment System and Finance

Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi di area sistem pembayaran dan pendalaman pasar uang sebagai bagian dari penguatan *integrated digital payment system and finance*. Digitalisasi ini dilakukan melalui pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel New BI-FAST dan sistem pembayaran *wholesale* BI-RTGS Gen III, serta didukung oleh pengembangan sistem BI-SSSS Gen III untuk pendalaman pasar uang. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, ketahanan,

serta integrasi sistem keuangan nasional, termasuk penguatan konsolidasi data transaksi secara nasional.

Sepanjang 2025, pengembangan infrastruktur difokuskan pada penyusunan dan finalisasi konsepsi perancangan yang mencakup aspek bisnis, layanan, dan teknologi digital. New BI-FAST dikembangkan melalui pemisahan fungsi *account inquiry, clearing, dan settlement*, serta peningkatan performa dan ketahanan sistem. BI-RTGS Gen III difokuskan pada optimalisasi manajemen likuiditas dan adopsi standar internasional ISO 20022 untuk meningkatkan interoperabilitas dan efisiensi transaksi. Sementara itu, BI-SSSS Gen III disempurnakan melalui penguatan proses kliring, pengembangan *hybrid account*, serta penerapan standar ISO 20022.

Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran terintegrasi yang meliputi BI-Payment Clear, BI-Payment Info, dan Data Capturing sebagai fondasi penguatan konsolidasi data transaksi nasional. Secara keseluruhan, rangkaian pengembangan tersebut telah mencapai tahap finalisasi konsepsi perancangan pada tahun 2025 dan menjadi landasan penting dalam membangun infrastruktur sistem pembayaran dan pasar uang yang modern, *resilient*, dan berbasis data untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan dan stabilitas sistem keuangan.

2) Pengembangan Integrated Digital Central Bank (IDCB)

Bank Indonesia terus memperkuat digitalisasi proses pengambilan keputusan (*Decision Making Process/DMP*) dan *Business Process Reengineering (BPR)* sebagai bagian dari implementasi *Integrated Digital Central Bank (IDCB)*. Transformasi ini mencakup area perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta pengelolaan SDM, dengan dukungan pemanfaatan data serta teknologi *Artificial Intelligence (AI)*. Pemanfaatan data dan AI menjadi katalisator transformasi proses bisnis yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis data dalam mendukung pengambilan keputusan kebijakan.

Sepanjang 2025, pengembangan digitalisasi DMP difokuskan pada penguatan aplikasi *Digital Workplace (DWP)* untuk mendukung proses perumusan kebijakan melalui RDG Bulanan dan pelaksanaan kebijakan melalui RDG Mingguan. Pengembangan ini telah mencapai tahap finalisasi konsepsi yang mencakup aspek bisnis, layanan, dan teknologi digital. Digitalisasi juga diperluas ke berbagai area strategis, antara lain Bauran Kebijakan

Kelembagaan, pengelolaan aset (baik aset fisik maupun proses pengadaan), serta area kepemimpinan dan pengelolaan SDM, dimana sebagian inisiatif telah memasuki tahap implementasi.

Di sisi lain, pemanfaatan inovasi data berbasis AI dan *Machine Learning* (ML) terus diperluas pada area moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pemanfaatan AI/ML tidak hanya pada proses perumusan kebijakan, namun juga dalam menyusun indikator hasil pelaksanaan kebijakan. Pengembangan dilakukan secara kolaboratif antar satuan kerja mengacu pada Rencana Induk Kecerdasan Artifisial Bank Indonesia (RIKABI) agar selaras dengan arah strategis Bank Indonesia. Pemanfaatan AI/ML di Bank Indonesia antara lain mencakup pengembangan model proyeksi indikator utama, seperti nilai tukar, arus masuk portofolio, dana pihak ketiga (DPK), *capital expenditure*, *digital payment*, serta transaksi pasar keuangan seperti repo, DNDF, dan *swap*. Selain itu, dilakukan pula perluasan metodologi pemanfaatan AI/ML, seperti analisis posisi devisa neto (PDN), *network analytics* untuk mengidentifikasi interkoneksi dan perilaku pelaku di pasar uang dan pasar valuta asing, identifikasi aktivitas *fraud* di sistem pembayaran, pengembangan indikator untuk pengawasan makroprudensial dan SP, serta eksperimen pemanfaatan *generative AI* untuk mendukung produktivitas. Inisiatif transformasi pemanfaatan AI/ML turut meningkatkan kualitas, kecepatan, dan ketepatan analisis dalam mendukung perumusan dan pengambilan keputusan yang lebih *forward-looking* dan efektif.

3) Pengembangan Integrated Digital Technology

Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur teknologi digital untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas aset Teknologi Digital (TD) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui adopsi teknologi terkini, penguatan, peningkatan kapasitas infrastruktur, termasuk pengembangan kapabilitas Pusat Data melalui digitalisasi pengolahan data (*data*

factory), eksperimen inovasi data, serta eksplorasi teknologi dan solusi pengelolaan data yang lebih andal. Arah pengembangan difokuskan pada integrasi aliran data secara *end-to-end* melalui mekanisme *straight-through processing*, sehingga menghasilkan *actionable insight* berbasis data yang didukung AI/ML dan kapabilitas analitik yang terintegrasi dengan proses bisnis.

Sepanjang tahun 2025, pengembangan difokuskan pada penyusunan dan finalisasi konsepsi perancangan, khususnya pemanfaatan *cloud*, penguatan kapabilitas *data center*, serta modernisasi infrastruktur teknologi pendukung. Bank Indonesia juga melakukan pemenuhan perangkat teknologi untuk mendukung modernisasi Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI), serta penguatan berbagai komponen teknologi, antara lain *Data Center* (DC), *End User Device* (EUD), *software platform*, *integrated security*, dan infrastruktur *cloud*. Selain itu, dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem pendukung operasional, termasuk sistem *core banking*, sistem manajemen layanan TI (MLTI), sistem pengelolaan layanan kas, *capturing* transaksi valas, serta sistem perizinan Bank Indonesia dalam rangka menjaga *technology continuity* dan meningkatkan kualitas layanan operasional.

Di sisi penguatan Pusat Data, Bank Indonesia mengembangkan *platform* data secara bertahap, termasuk Portal Data yang dirancang untuk menyediakan akses terhadap hasil pengolahan data secara terintegrasi bagi pengguna internal dan eksternal. Portal ini melengkapi infrastruktur data yang telah tersedia, seperti *data lake*, *data catalog*, *data preparation*, *data visualization*, dan *data virtualization tools*, serta didukung teknologi AI untuk membantu analisis dalam penyusunan narasi *nowcasting* dan *forecasting*. Penguatan ini juga disertai monitoring berkelanjutan guna memastikan keandalan, keamanan, dan kinerja sistem yang optimal dalam mendukung transformasi Bank Indonesia menuju institusi yang *data-driven*, *resilient*, dan berstandar global.



BAB 5

CAPAIAN KINERJA BANK INDONESIA





BANK INDONESIA



Di tengah beratnya tantangan perekonomian global dan domestik, serta tuntutan implementasi dari amanat UU P2SK, sepanjang 2025 Bank Indonesia telah berhasil mencapai kinerja yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya seluruh IKU 2025 melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, berbagai upaya penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang tahun 2025 telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk sejumlah pengakuan internasional.

Pencapaian kinerja Bank Indonesia sepanjang tahun 2025 tecermin pada capaian IKU Bank Indonesia dalam 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut:

PS 01 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Perekonomian dunia pada 2025 diwarnai ketidakpastian yang tinggi dengan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya ketegangan geopolitik, yang berdampak pada melambatnya ekonomi di banyak negara. Di pasar keuangan global, tingginya ketidakpastian perekonomian global tersebut mendorong investor melakukan realokasi portofolio ke aset-aset investasi yang dianggap aman (*safe-haven assets*), sementara aliran modal keluar dari negara-negara *Emerging Market Economies* (EMEs) terus terjadi. Perkembangan tersebut berdampak pada pelemahan nilai tukar negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan moneter yang tetap diarahkan pada keseimbangan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian tersebut. Sejalan dengan itu, ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mendorong kredit atau pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

1) Inflasi inti yang rendah dan stabil pada kisaran sasarannya

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$, dengan Inflasi IHK Desember 2025 sebesar 2,92% dan inflasi inti rendah sebesar 2,38% (yoy). Terkendalnya inflasi inti sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) juga terjaga rendah sebesar 1,93% (yoy) pada akhir tahun 2025 sejalan dengan terbatasnya kebijakan penyesuaian harga yang diatur oleh Pemerintah. Sementara itu, inflasi *volatile food* (VF) tercatat relatif tinggi sebesar 6,21% (yoy), terutama disebabkan karena gangguan produksi dan distribusi akibat kendala cuaca, peningkatan biaya bahan baku produksi, serta dampak bencana di Sumatra. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional di berbagai daerah.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*pro-stability and growth*). Sejalan dengan rendahnya prospek inflasi dan perlunya turut mendorong pertumbuhan ekonomi, setelah penurunan 25 bps pada September 2024, Bank Indonesia selama tahun 2025 kembali menurunkan BI-Rate sebanyak lima kali yakni pada Januari 2025, Mei 2025, Juli 2025, Agustus 2025, dan September 2025 masing-masing sebesar 25 bps. Dengan demikian, Bank Indonesia telah menurunkan BI-Rate sebesar 150 bps menjadi 4,75%, atau level terendah sejak tahun 2022. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bank Indonesia pada 16-17 Desember 2025 juga memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,50% untuk terus mendorong peran perbankan dalam memanfaatkan pelonggaran

likuiditas bagi sektor riil. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran $2,5\pm 1\%$, dan nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Koordinasi pengendalian inflasi pangan juga diterapkan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan program Asta Cita Pemerintah. Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, dengan tetap mendukung upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

2) Terjangkarnya ekspektasi inflasi sesuai dengan target inflasi

Ekspektasi inflasi tahun 2025 tetap terkendali didukung oleh konsistensi bauran kebijakan. Survei *Consensus Forecast* (CF) yang dirilis selama 2025 menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi sepanjang tahun 2025 secara konsisten terjaga dalam kisaran

sasaran $2,5\pm 1\%$. Berdasarkan hasil survei CF bulan Desember 2025, ekspektasi inflasi untuk akhir tahun 2025 (*end of period/EoP*) tetap terjaga meski sedikit di atas titik tengah kisaran sasaran, yakni sebesar 2,7% (yoy). Selain itu, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), responden memprakirakan rata-rata inflasi nasional tahun 2025 sebesar 2,72% (yoy), tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2025 sebesar $2,5\pm 1\%$ (yoy). Sejalan dengan itu, hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) pada akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa tekanan inflasi tiga bulan yang akan datang, yaitu Februari 2026, diprakirakan meningkat, sementara pada enam bulan yang akan datang, yaitu Mei 2026, diprakirakan menurun. Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Februari 2026 yang tercatat sebesar 168,6, lebih tinggi dibandingkan dengan 163,2 pada periode sebelumnya, didorong oleh ekspektasi kenaikan harga menjelang periode Ramadan 1447 H. Sementara itu, IEH Mei 2026 tercatat sebesar 154,5, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 161,7.

Bank Indonesia secara konsisten menetapkan suku bunga kebijakan moneter secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mengarahkan ekspektasi inflasi tetap terkendali sesuai sasaran. Konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi sebesar $2,5\pm 1\%$ dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan BI-Rate masing-masing sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada Januari 2025 dan 5,50% pada Mei 2025, dan kembali menurunkan BI-Rate pada Juli, Agustus,



Opening Ceremony Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2025 di Yogyakarta.

dan September 2025, masing-masing sebesar 25 bps, sehingga menjadi 4,75%. Hingga akhir 2025, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah kembali meningkatnya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah untuk mengendalikan inflasi IHK tahun 2025 agar tetap dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Upaya ini ditempuh antara lain melalui pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPIP pada Januari 2025, yang diantaranya menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 untuk mendukung pencapaian target inflasi dalam kisaran sasaran pada tahun 2025-2027, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Peta Jalan ini selanjutnya menjadi panduan pelaksanaan strategi pengendalian inflasi di seluruh TPID dalam menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025-2027, yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan pengendalian inflasi di masing-masing daerah, sehingga semakin mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3) Tercapainya suku bunga pasar uang sesuai dengan suku bunga kebijakan yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur

Stabilitas moneter dan pasar keuangan terjaga dengan proses penurunan suku bunga yang terus berlangsung sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia. Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Sejak September 2024, BI-Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75% hingga Desember 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. Seiring dengan penurunan BI-Rate dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga pasar uang, Indonesia *Overnight Index Average* (INDONIA), turun sebesar 190 bps dari 6,03% pada awal 2025 menjadi 4,13% pada 31 Desember 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 231 bps, 230 bps, dan 234 bps sejak awal 2025 menjadi 4,85%; 4,90%; dan 4,92% pada 19 Desember 2025, sehingga mendukung kebijakan moneter yang ekspansif. Imbal hasil SBN untuk

tenor 2 tahun menurun sebesar 197 bps dari 6,96% pada awal 2025 menjadi 4,99% pada 31 Desember 2025, sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 119 bps dari tingkat tertinggi 7,26% pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,07% pada 31 Desember 2025.

Stabilitas moneter juga didukung dengan ekspansi operasi moneter Bank Indonesia untuk mendukung efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menurunkan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas untuk mendukung ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan. Ekspansi likuiditas moneter juga dilakukan Bank Indonesia dengan penurunan posisi SRBI dan pembelian SBN di pasar sekunder. Posisi instrumen moneter SRBI turun sebesar Rp186,07 triliun dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp730,90 triliun pada akhir tahun 2025. Selain itu, Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp332,14 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan pemerintah sebesar Rp246,68 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Selanjutnya, pada Desember 2025 Bank Indonesia menetapkan kebijakan pemberian remunerasi atas penempatan dana bank pada *excess reserves* untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas untuk penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor riil. Besaran remunerasi pada *excess reserves* ditetapkan sebesar 25 bps di bawah tingkat suku bunga *Deposit Facility*, yakni sebesar 3,50%, sedangkan remunerasi pada Giro Wajib Minimum (GWM) tetap sebesar 1,50%.

Strategi OM *pro-market* terus diperkuat untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, meningkatkan likuiditas, dan memperdalam pasar uang serta pasar valas. Strategi ini disertai dengan (i) pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur, (ii) pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter, dan (iii) pengoptimalan penerbitan SRBI. Optimalisasi SRBI dilakukan melalui asesmen *pricing yield* yang lebih kompetitif, penyempurnaan fitur yang lebih *market-friendly*, serta perluasan basis investor nonresiden.

Sejak 17 Mei 2024, mekanisme lelang SRBI dilaksanakan melalui *Primary Dealer* PUVA dengan penguatan implementasi melalui kewajiban transaksi sekunder dan repo. Penguatan strategi OM *pro-market* juga ditempuh melalui penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas, pelaksanaan *Repo/PASBI FTO* dan repo melalui *agent bank* (AB), serta perluasan peran *Primary Dealer* untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repo antar pelaku pasar.

4) Tercapainya stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental perekonomian

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan eksternal yang dipicu oleh tingginya ketidakpastian global. Kebijakan tarif sepihak yang tinggi oleh Presiden AS telah menyebabkan aliran keluar portofolio asing dan depresiasi nilai tukar negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Rupiah sempat mengalami tekanan tinggi di pasar *forward* luar negeri (*off-shore* NDF) setelah pengumuman tarif AS pada awal April 2025. Untuk memperkuat stabilisasi Rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan intervensi di pasar *off-shore* NDF secara intensif dan tanpa henti, baik di pasar Asia, Eropa, maupun AS. Intervensi *off-shore* NDF dimaksudkan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah di pasar domestik yang terus dilakukan dengan strategi *triple intervention* pada transaksi *spot*, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga dioptimalkan, termasuk SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Dengan komitmen kuat Bank Indonesia tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS hingga Agustus 2025 tercatat sekitar Rp16.300 per dolar AS, menguat dibandingkan dengan awal April 2025 sebesar Rp16.865 per dolar AS (tanggal 8 April 2025) setelah pengumuman tarif resiprokal AS. Namun, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah kembali besar sejak akhir Agustus 2025, baik karena faktor global seperti penurunan FFR yang dinilai kurang besar (*less dovish*) dan *government shutdown* di AS, maupun faktor domestik seperti kerusuhan sosial dan kekhawatiran pasar atas melebarnya defisit fiskal.

Nilai tukar Rupiah hingga akhir Desember 2025 tercatat Rp16.675 per dolar AS, atau melemah 3,48% dari posisi akhir Desember 2024, dengan rerata Rp16.466 per dolar AS selama tahun 2025. Secara umum, perkembangan Rupiah relatif stabil jika dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan lebih kuat dibandingkan negara maju selain dolar AS. Selain ditopang oleh konsistensi

kebijakan stabilisasi, stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh peningkatan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5) Tercapainya kecukupan cadangan devisa yang memenuhi standar internasional dan sesuai target yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur

Bank Indonesia senantiasa memperkuat strategi pengelolaan cadangan devisa dalam rangka mengupayakan kecukupan cadangan devisa untuk melaksanakan kebijakan moneter dan memenuhi kewajiban internasional dalam valuta asing, yang diantaranya dilakukan melalui transformasi pengelolaan cadangan devisa. Hasil nyata dari transformasi tersebut tecermin dari tercapainya kecukupan cadangan devisa, dengan posisi cadangan devisa yang secara konsisten berada di atas standar kecukupan internasional di sepanjang tahun 2025. Pada akhir tahun 2025, cadangan devisa tercatat sebesar USD 156,5 miliar dolar AS, yang setara dengan pembiayaan 6.3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Angka ini berada di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan impor. Secara *Year to Year*, angka cadangan devisa akhir 2025 mengalami kenaikan dibandingkan posisi akhir tahun 2024 yang sebesar USD 155,7 miliar. Posisi cadangan devisa sepanjang tahun 2025 senantiasa terjaga di sekitar 6 bulan impor. Dengan demikian, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta turut menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Transformasi pengelolaan cadangan devisa diperlukan, mengingat perkembangan lingkungan strategis baik, global maupun domestik, yang menantang dan bergejolak, sehingga pengelolaan cadangan devisa dapat menjadi lebih *sustainable* dan *preserved*. Dinamika lingkungan strategis global dan domestik saat ini diwarnai oleh ketidakpastian kebijakan tarif dan suku bunga bank sentral global, meningkatnya tensi geopolitik, serta tekanan *outflow* di pasar surat berharga domestik. Transformasi pengelolaan cadangan devisa dilakukan melalui optimalisasi pilar instrumen cadangan devisa antara lain pilar pengelolaan portofolio dan pilar Kerja sama Keuangan Internasional (KKI). Salah satu upaya



Pertemuan 30th EMEAP Governors' Meeting dan 14th EMEAP GHOS Meeting di Bangkok.

optimalisasi pengelolaan portofolio yang dilakukan adalah dengan mereviu kerangka dan komposisi aset strategis secara lebih berkala sehingga dapat beradaptasi terhadap perkembangan pasar terkini. Transformasi tersebut juga disertai dengan digitalisasi proses bisnis untuk mendukung koordinasi serta pengambilan keputusan pengelolaan devisa yang lebih optimal, dimana pada akhir tahun 2025, Bank Indonesia telah menyusun *integrated-dashboard* pengelolaan cadangan devisa. Melalui transformasi pengelolaan cadangan devisa, maka strategi pengelolaan cadangan devisa menjadi lebih proaktif serta dinamis dalam mengantisipasi pergerakan pasar keuangan. Upaya transformasi pengelolaan cadangan devisa tersebut juga diakui oleh lembaga internasional sehingga Bank Indonesia memperoleh *International Award* sebagai *Reserve Manager of the Year* pada tahun 2025.

Strategi pengelolaan cadangan devisa tidak dapat dilepaskan dari koordinasi yang erat dengan pemerintah, bank sentral, dan lembaga internasional. Bank Indonesia melakukan berbagai kerjasama keuangan internasional dengan berbagai bank sentral dan lembaga internasional yang meliputi, penguatan kerja sama *Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA)*, perpanjangan *repo line* dan fasilitasi transaksi investasi pada tahun 2025 sebagai bentuk upaya penguatan kecukupan dan likuiditas cadangan devisa. Bank Indonesia juga menjalin sinergi dengan lembaga keuangan internasional melalui partisipasi aktif dalam forum internasional antara lain Executives' Meeting of East-

Asia Pacific Central Banks (EMEAP) dan International Islamic Liquidity Management (IILM) yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai pasar keuangan global dan pengelolaan cadangan devisa, sekaligus memperluas jejaring dengan berbagai institusi keuangan internasional.

PS 02 Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan asesmen, rekomendasi, serta koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), di tengah dinamika tingginya ketidakpastian global dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang efektif dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan program *Asta Cita* Pemerintah, baik pada level nasional maupun regional. Sinergi tersebut berkontribusi pada inflasi yang terjaga rendah di dalam rentang sasaran inflasi, serta transaksi berjalan yang sehat dan mendukung stabilitas eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sasaran pencapaian *high income country*.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

6) **Terjalannya koordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi**

Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Daerah, dan mitra strategis lainnya terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), termasuk melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasarannya. Respons kebijakan moneter yang konsisten dengan mandat Bank Indonesia serta sinergi melalui TPIP, TPID, dan GNPIP turut mendukung inflasi IHK pada sepanjang tahun 2025 tetap terjaga dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah melaksanakan 5 (lima) kali koordinasi yang bertujuan untuk mendorong keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif sebagai upaya pengendalian inflasi bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di masing-masing wilayah.

Bank Indonesia bersama K/L anggota TPIP melakukan sinergi dalam sejumlah kegiatan koordinasi TPIP. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia bersama K/L anggota TPIP, serta berbagai mitra strategis telah melaksanakan *High Level Meeting* (HLM) TPIP, dalam rangka memperkuat komitmen dan mengakselerasi implementasi program pengendalian inflasi secara *targeted*, masif, dan

terintegrasi. Pada triwulan II sampai dengan triwulan III 2025, koordinasi pengendalian inflasi dilanjutkan antara lain melalui finalisasi dan publikasi laporan pelaksanaan tugas TPIP tahun 2024, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas TPIP selama 2024. Laporan tersebut mencakup: (i) evaluasi pencapaian sasaran inflasi 2024, (ii) prakiraan inflasi 2025, (iii) arah kebijakan pengendalian inflasi 2025, dan (iv) program kerja TPIP 2025. Selain itu, telah dipublikasikan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027 yang memuat: (i) evaluasi inflasi 2022–2024, (ii) evaluasi program kerja 2022–2024, dan (iii) arah kebijakan serta program kerja pengendalian inflasi 2025–2027. Selanjutnya, pada akhir tahun 2025, koordinasi TPIP dilakukan melalui: (i) evaluasi program kerja TPIP 2025 dan koordinasi rencana program kerja TPIP 2026; (ii) pembahasan prospek dan risiko inflasi 2026; serta (iii) koordinasi pengendalian inflasi periode Natal Tahun Baru bersama K/L anggota TPIP. Hasil dari kegiatan koordinasi dimaksud menjadi bagian dari pelaksanaan HLM TPIP 2026 guna mengawal pencapaian sasaran inflasi di tengah berbagai tantangan struktural maupun siklikal ke depan.

Dari sisi upaya pengendalian inflasi daerah, Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID memperkuat ekosistem pengendalian inflasi pangan di daerah melalui penyelenggaraan koordinasi GNPIP Wilayah dan Rapat Koordinasi Pusat–Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorpusda TPID). Bank Indonesia bersama K/L anggota TPIP-TPID menyelenggarakan koordinasi GNPIP wilayah Jawa pada 21 Februari 2025 dan GNPIP wilayah Bali



Opening Ceremony Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Balinusra 2025 di Bali.



Rapat Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Pangan antara Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta.

dan Nusa Tenggara (Balinusra) pada 23 Mei 2025. Penyelenggaraan GNPIP turut mengakselerasi hilirisasi dan ketahanan pangan dalam mendukung program Asta Cita, di antaranya melalui (i) peningkatan produksi pangan melalui: penggunaan bibit unggul, penyediaan sarana prasarana, dan pemanfaatan *digital farming*, (ii) penyediaan pasokan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan ekosistem kemitraan antara produsen dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saling menguntungkan, serta (iii) penguatan peran *off taker* (BUMD/BUMDes Pangan) untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan antarwaktu dan antarwilayah. Sementara itu, penyelenggaraan Rakorpusda TPID juga diselenggarakan untuk penyaluran program pengendalian inflasi antara pusat dan daerah, serta memperkuat dukungan daerah dalam implementasi program prioritas nasional, diantaranya swasembada pangan. Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemberian apresiasi terhadap kinerja TPID (TPID Awards) 2025. Rakorpusda TPID diharapkan juga menjadi sarana kolaborasi dan mendorong replikasi *success story* upaya pengendalian inflasi di daerah.

Bank Indonesia juga menyampaikan rekomendasi penguatan reformasi struktural pada sektor-sektor prioritas, termasuk manufaktur, pariwisata, dan konektivitas. Dalam rangka mendorong kinerja sektor manufaktur, Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian telah menyepakati Program Kerja Sama Tahun 2025 sebagai bentuk sinergi untuk

memperkuat industri dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, sinergi dilakukan antara lain melalui: (i) penyusunan kajian awal terkait optimalisasi jalur perdagangan dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan strategi peningkatan daya saing industri dalam negeri; (ii) diskusi kebijakan mengenai *debottlenecking* tantangan pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mendorong perbaikan ekosistem investasi dan pengembangan kapasitas SDM; serta (iii) kegiatan dan program kerja bersama terkait pengembangan industri a.l. diskusi kebijakan terkait efektivitas penyaluran pembiayaan industri padat karya, penyelenggaraan *dedicated team meeting* terkait arah kebijakan perdagangan internasional dan strategi peningkatan peran UMKM dalam ekosistem ekspor dan industri nasional, serta fasilitasi akses pasar bagi pelaku industri halal. Penguatan sinergi dan kolaborasi juga ditempuh melalui perpanjangan Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian pada 24 September 2025.

Sinergi lintas K/L untuk penguatan sektor jasa, khususnya terkait pariwisata dan konektivitas, juga terus dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berdaya tahan. Dalam upaya mendorong pengembangan pariwisata sebagai sumber penerimaan devisa *travel* dan penguatan ekonomi kerakyatan, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas),

Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengakselerasi pengembangan pariwisata berkualitas (*Quality Tourism, QT*). Pada triwulan III 2025, Bank Indonesia berperan aktif dalam asesmen dan pengukuran penerapan QT di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Destinasi Pariwisata Regeneratif sesuai RPJMN 2025-2029. Selanjutnya, pada akhir tahun 2025, telah dilakukan finalisasi evaluasi dan asesmen penerapan QT di DPP dan Destinasi Regeneratif, termasuk melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I serta pembahasan bersama seluruh pemerintah daerah yang menjadi lokasi destinasi pariwisata terkait. Evaluasi dan asesmen QT tersebut merupakan kelanjutan dari inisiatif sejak 2022 yang dilakukan bersama Sekretariat Bersama Pariwisata. Hasil evaluasi dan asesmen penerapan QT juga dituangkan dalam Buku Indonesia *Tourism Outlook* yang telah diluncurkan secara simbolis pada 20 November 2025. Selain kemajuan pariwisata berkualitas, Buku Indonesia *Tourism Outlook* tersebut juga menjelaskan mengenai lanskap pariwisata domestik dan global, peluang perubahan tren berwisata, serta rekomendasi arah pengembangan pariwisata nasional ke depan untuk mendukung pencapaian Asta Cita.

Sebagai bagian dari strategi penguatan logistik nasional, Bank Indonesia juga terus berkontribusi aktif bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BPS, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L terkait dalam penyusunan kajian dampak kebijakan penanganan kendaraan lebih dimensi-lebih muatan. Hasil kajian tersebut menjadi salah satu basis strategi kebijakan yang merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional dalam Perpres Penguatan Logistik Nasional.

7) Terjalannya sinergi kebijakan moneter-fiskal untuk menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi

Bank Indonesia dan Pemerintah terus melanjutkan sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia menyampaikan 7 (tujuh) rekomendasi pertimbangan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), antara lain melalui pembahasan mengenai realisasi dan prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 serta Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN TA 2026. Dalam beberapa kesempatan, Bank Indonesia telah menyampaikan pandangan terkait asumsi

makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan target-target Pemerintah di bidang pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, dan inflasi tahun 2025 dan 2026. Pandangan-pandangan tersebut juga dilengkapi dengan respons bauran kebijakan Bank Indonesia yang terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Pemerintah, Bank Indonesia turut berperan dalam memberikan fungsi *advisory* terkait rencana penerbitan *Global Bond (GB)*. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah menyampaikan *advisory* terkait penunjukan agen penatausahaan dan agen pembayar, termasuk rekomendasi untuk penerbitan Samurai Bond, Dim Sum Bond, dan Kangaroo Bond. *Advisory* berupa hasil evaluasi terhadap agen untuk penerbitan *Global Bond* juga telah diselesaikan pada akhir tahun 2025. Rekomendasi tersebut mendukung kelancaran proses penerbitan *Global Bond* sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan. Selain itu, pengelolaan *Global Bond* sejak penerbitan hingga jatuh tempo dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, sekaligus berkontribusi pada penguatan kredibilitas Pemerintah di mata investor melalui kinerja agen yang optimal.

Sinergi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya terkait penguatan ekonomi kerakyatan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemberian tambahan bunga kepada pemerintah dalam rangka mendukung Program Perumahan Rakyat dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pelaksanaan dukungan dimaksud memiliki dasar hukum yang memadai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta ketentuan turunannya dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan ketentuan internal terkait Pengelolaan Kas Pemerintah. Untuk memperkuat implementasinya, Bank Indonesia bersama Kemenkeu menandatangani Keputusan Bersama (KB) terkait Tambahan Bunga dan penyusunan mekanisme pelaksanaan KB dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta telah dilakukan penyesuaian ketentuan internal mengenai pengelolaan kas pemerintah dengan menambahkan klausul terkait pemberian tambahan bunga kepada Pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap

Program Ekonomi Kerakyatan dan wujud sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

PS 03 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang tecermin pada volatilitas aliran modal dan nilai tukar menjadi tantangan bagi negara EMEs untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dalam memperkuat ketahanan eksternalnya dan untuk mendorong ekonomi dalam negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan penguatan kebijakan makroprudensial yang mampu menjaga agar stabilitas sistem keuangan tetap kuat dan mendorong fungsi intermediasi agar tetap mendukung pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2025, Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial melalui peningkatan insentif likuiditas dan pelonggaran instrumen makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang mendukung penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat intermediasi perbankan yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan mitigasi dan pengelolaan risiko sistemik. Selain itu, implementasi kebijakan juga mendukung perluasan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Bank Indonesia terus memperkuat surveilans makroprudensial secara *forward-looking* untuk mengantisipasi potensi risiko pasar, likuiditas, dan kredit, sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah dinamika global.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

8) Tercapainya pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal dalam kisaran target sesuai dengan prakiraan makroekonomi dan siklus keuangan

Pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 tercatat sebesar 9,69% (yoy), berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 8-11%. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06% (yoy), 4,52% (yoy), dan 6,58% (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk menurunkan suku

bunga dan memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta realisasi program prioritas Pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga. Dari sisi permintaan, perilaku berhati-hati (*wait-and-see*) korporasi yang menahan ekspansi usaha sehingga mengurangi kebutuhan pembiayaan eksternal di tengah ketidakpastian kondisi makro global dan daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang belum kuat, menyebabkan rasio fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) masih cukup besar pada Desember 2025, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% (yoy) pada Desember 2025. Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (*lending requirement*) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2026 berada pada kisaran 8-12%.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik, didukung likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Desember 2025 tercatat tinggi sebesar 25,89%, tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,05% (bruto) dan 0,79% (neto) pada Desember 2025. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko.

Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) terus ditempuh untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (*forward looking*) diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (*lending channel*) untuk mendukung pembiayaan di sektor-sektor yang selaras dengan kebijakan Pemerintah serta penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan perbankan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*). Penguatan KLM juga dilakukan melalui peningkatan besaran insentif

KLM menjadi maksimum sebesar 5,5% dari DPK dengan masing-masing maksimum besaran insentif untuk *lending channel* dan *interest rate channel* yakni sebesar 4,5% dan 1,0%. Hingga Desember 2025, total insentif KLM mencapai Rp388,1 triliun, masing-masing kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp177,1 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp169,5 triliun, Bank Pemerintah Daerah (BPD) sebesar Rp34,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7,0 triliun. Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Bank Indonesia tetap mempertahankan *stance* kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui berbagai instrumen utama. Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) dipertahankan sebesar 0%, sementara Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) berada pada kisaran 84–94%. Di sisi pembiayaan, rasio *Loan to Value* (LTV)/ *Financing to Value* (FTV) ditetapkan paling tinggi sebesar 100%, serta uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0%, yang berlaku efektif sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Selain itu, Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) bank tetap dibatasi paling tinggi 35% dari modal bank yang berlaku sejak 1 Juni 2025. Penguatan juga dilakukan terhadap publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM. Dalam mendukung pengelolaan likuiditas, Bank Indonesia juga menetapkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, serta PLM Syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5% (berlaku sejak 1 Juni 2025). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif serta mempererat sinergi dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha, guna mendorong peningkatan kredit/pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

9) Terjaganya risiko likuiditas perbankan

Bank Indonesia turut mendukung terjaganya ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perbankan terpantau mampu

melanjutkan intermediasi dengan tetap menjaga likuiditas. Hal ini tercermin pada indikator rasio AL/DPK yang mencapai 28,57% pada akhir tahun 2025. Perkembangan tersebut sejalan dengan berlanjutnya akselerasi penyaluran kredit yang disertai penurunan suku bunga perbankan. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas sehingga dapat menopang penyaluran kredit/pembiayaan perbankan secara optimal serta memperkuat sinergi dengan KSSK untuk memitigasi berbagai risiko ekonomi akibat dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan domestik.

Selanjutnya, Bank Indonesia terus memperkuat fungsi pengawasan pada bidang makroprudensial, moneter dan pasar, serta sistem pembayaran secara terintegrasi dan berbasis digital. Penguatan ini dilakukan untuk mendukung implementasi Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) dalam mencapai stabilitas Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2025, penguatan kerangka pengawasan dilakukan melalui penyusunan *framework* pengawasan terintegrasi pada bidang makroprudensial, moneter dan *market*, serta sistem pembayaran guna memastikan efektivitas implementasi BKBI. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga telah menyusun ketentuan pengawasan terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan terintegrasi dilakukan antara lain melalui strategi *Integrated Dynamic Systemic Risk Surveillance* (IDSRS) untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko sistemik dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik, siklus ekonomi dan keuangan, keterkaitan antar-sektor dalam sistem keuangan, serta sumber kerentanan dan sumber gejolak dalam sistem keuangan. Strategi pengawasan Bank Indonesia difokuskan pada pendekatan berbasis perilaku (*behavior*), risiko (*risk*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap objek pengawasan, yaitu pelaku dan infrastruktur pasar keuangan, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri. Selain itu, asesmen terhadap objek pengawasan terintegrasi juga dilakukan untuk mendukung penetapan prioritas pengawasan, memantau perkembangan eksposur risiko, menilai keterkaitan dan kerentanan sistem keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan dan standar internasional yang berlaku.

Sejalan dengan penguatan kerangka pengawasan terintegrasi, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan *suptech analytics* guna semakin memperkuat kapabilitas pengawasan sistem keuangan berbasis data. Sepanjang tahun 2025, pengembangan *suptech analytics* diarahkan untuk memperkuat kapasitas identifikasi dini risiko, analisis keterkaitan sistem keuangan, serta peningkatan efektivitas pengawasan makroprudensial. Pengembangan tersebut antara lain mencakup alat proyeksi arus kas perbankan berbasis perilaku historis dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), serta *network analysis* untuk mengidentifikasi dan memantau struktur maupun interkoneksi pelaku pasar keuangan dan penyedia jasa sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia mengembangkan *news monitoring tools* industri perbankan sebagai sumber sinyal dini (*early signal*) dalam mendeteksi potensi kerentanan makroprudensial. Bank Indonesia juga melakukan pengembangan lanjutan *early warning tools* guna mendeteksi potensi tekanan likuiditas melalui penyempurnaan model untuk meningkatkan akurasi interpretasi dalam pengawasan sistem keuangan

Selain itu, Bank Indonesia terus mengembangkan berbagai *dashboard analytics* yang memungkinkan pengguna mengakses, mengolah, dan memvisualisasikan data secara mandiri melalui pemanfaatan *platform business intelligence*, antara lain *Microsoft Power* Bank Indonesia dan *Financial Network Analysis* (FNA). Pengembangan *dashboard* tersebut difokuskan pada penguatan analisis keterkaitan (*interconnectedness*) antar pelaku di pasar keuangan untuk berbagai jenis transaksi, guna memperdalam pemahaman terhadap dinamika dan potensi risiko sistemik. Selanjutnya, Bank Indonesia juga melakukan eksplorasi lanjutan *use case contagion analysis* untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi transmisi risiko (*spillover effect*) dan mekanisme penularan yang berpotensi memengaruhi ketahanan (*resilience*) sektor perbankan.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mendukung penguatan pengawasan perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Penguatan koordinasi dilakukan melalui mekanisme pertukaran data dan/atau informasi, penyelarasan langkah pengawasan perbankan, serta pembahasan isu strategis pengawasan pada level pimpinan maupun teknis, termasuk melalui forum Komite Kerja Anggota Dewan Gubernur

Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner OJK Kebijakan Makroprudensial–Mikroprudensial (KKD 1). Koordinasi kedua otoritas juga mencakup pembahasan kondisi likuiditas perbankan, termasuk pemenuhan kebutuhan likuiditas melalui perizinan utang luar negeri, pemantauan risiko likuiditas yang berpotensi menimbulkan tekanan pendanaan dan transmisi risiko yang lebih luas, serta pemantauan kepatuhan bank tertentu terhadap ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Bank Indonesia dan OJK terus memperkuat fondasi kerja sama melalui penyusunan pedoman teknis pertukaran data yang lebih komprehensif dan terstandar, termasuk pemanfaatan data hasil integrasi pelaporan (ANTASENA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi, sekaligus menyempurnakan tata kelola kerja sama kedua otoritas. Sinergi kedua otoritas juga tecermin dalam dukungan terhadap proses perizinan *spin-off* Unit Usaha Syariah bagi bank yang terdampak perubahan ketentuan terkini, sehingga proses *spin-off* dan aksi korporasi terkait dapat diselesaikan sesuai target. Selain itu, kerja sama yang erat dalam kerangka KSSK turut diwujudkan melalui pelaksanaan simulasi krisis tahun 2025 bertema *Weekend Resolution* yang berjalan dengan baik. Rangkaian penguatan pengawasan, digitalisasi kapabilitas analitik, dan sinergi antarotoritas tersebut mencerminkan keselarasan fungsi dan tugas sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK, sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan terintegrasi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan penanganan permasalahan perbankan secara lebih dini. Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

10) Pangsa kredit yang inklusif dan/atau hijau

Bank Indonesia terus memperkuat upaya peningkatan pembiayaan kepada UMKM sebagai bagian dari dukungan terhadap inklusi ekonomi, inklusi keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mendorong inklusi keuangan yakni melalui kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) di mana hingga akhir tahun 2025 tercatat sebesar 32,04%. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan insentif KLM kepada bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan pada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM, koperasi, pembiayaan inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan. Dalam mendukung efektivitas implementasi

kebijakan tersebut, Bank Indonesia secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap target maupun realisasi RPIM beserta faktor-faktor pendukungnya, termasuk pemantauan implementasi Giro RPIM. Koordinasi juga terus diperkuat dengan K/L terkait dalam pemantauan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dengan OJK selaku pengawas mikroprudensial untuk memastikan efektivitas implementasi RPIM, pencapaian realisasi RPIM secara nasional, dan dampaknya terhadap perluasan pembiayaan inklusif. Di sisi lain, peran Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya perusahaan pembiayaan dan *financial technology* (fintech), turut menjadi katalisator peningkatan RPIM melalui inovasi digitalisasi pembiayaan UMKM.

Di tengah berbagai upaya tersebut, penyaluran kredit UMKM pada akhir tahun 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,30% (*year on year/yo*y). Dari sisi penawaran (*supply*), perkembangan tersebut dipengaruhi oleh upaya perbankan dalam menjaga kualitas kredit di tengah risiko kredit UMKM yang masih relatif tinggi, meskipun tetap berada di bawah *threshold*, serta reprioritisasi penyaluran kredit ke segmen *consumer* dan *corporate*. Sementara itu, pembiayaan UMKM oleh IKNB juga tumbuh melambat, terutama dipengaruhi perlambatan pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan (PP). Dari sisi permintaan (*demand*), perlambatan pembiayaan UMKM dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah-bawah.

Ke depan, di tengah intermediasi pembiayaan inklusif yang masih menghadapi tantangan perlambatan,

Bank Indonesia akan terus memperkuat implementasi RPIM dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan *risk appetite* perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Sejalan dengan penguatan pembiayaan inklusif, Bank Indonesia juga telah melakukan kajian mengenai penguatan *Climate Risk Stress Test* (CRST) dalam rangka mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan.

PS 04 Memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pembiayaan perekonomian di tengah ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan yang masih tinggi. Perkembangan tersebut memerlukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial untuk menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan dari eskalasi tekanan yang bersumber dari risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Dalam konteks tersebut, koordinasi KSSK juga diarahkan untuk mendorong intermediasi perbankan, termasuk bagi sektor prioritas sesuai program Asta Cita Pemerintah, serta mendukung penguatan permintaan domestik. Secara keseluruhan, sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dalam KSSK difokuskan pada upaya menjaga ketahanan sistem keuangan dalam rangka



Konferensi Pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan IV 2025 di Jakarta.



Komite Kerja Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta.

pengecahan dan penanganan krisis, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

11) Terjalinnnya sinergi kebijakan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal dalam kisaran target

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan OJK untuk mendukung intermediasi yang seimbang dan berkualitas melalui harmonisasi kebijakan dan pengaturan. Sepanjang tahun 2025, koordinasi Bank Indonesia dan OJK menghasilkan 4 (empat) rekomendasi harmonisasi ketentuan Bank Indonesia, yaitu *revisit* ketentuan KLM, RPLN, PLM, dan RIM yang dilakukan melalui rangkaian pertemuan dan/ atau pemberian rekomendasi tertulis terhadap ketentuan dimaksud.

Dalam rangka mendukung pembiayaan inklusif, koordinasi Bank Indonesia dan OJK juga dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi implementasi RPIM dan memantau pencapaian target RPIM perbankan. Koordinasi dimaksud dilaksanakan antara lain melalui forum KKD 1 Level Teknis dan Level Pimpinan pada triwulan I 2025 dengan agenda evaluasi realisasi RPIM tahun 2024 dan target RPIM tahun 2025. Sinergi tersebut menjadi penting

mengingat Bank Indonesia berperan sebagai penerbit ketentuan dan pengawas makroprudensial RPIM, sementara OJK menjalankan fungsi pengawasan mikroprudensial, sehingga efektivitas implementasi RPIM, realisasi RPIM secara nasional, dan dampaknya terhadap perluasan pembiayaan inklusif dapat terus terjaga.

Penguatan harmonisasi kebijakan juga dilakukan pada *revisit* ketentuan KLM melalui perluasan cakupan sektor dan realokasi besaran insentif yang diarahkan untuk mendorong intermediasi perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam program Asta Cita, khususnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, harmonisasi kebijakan dilakukan pada penguatan ketentuan RPLN untuk memperluas sumber pendanaan perbankan, baik yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun non-DPK, sekaligus mendukung pengelolaan likuiditas guna menopang penyaluran kredit ke sektor riil.

Di sisi lain, penyempurnaan kebijakan RIM dan PLM dilakukan melalui koordinasi dan penyampaian tanggapan tertulis antara Bank Indonesia dan OJK. Penguatan kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan dalam mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan, antara lain melalui penyesuaian rasio PLM menjadi sebesar 4% bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan 2,5% bagi Bank Umum Syariah (BUS). Selanjutnya, pada akhir tahun 2025,

kebijakan RIM dan PLM kembali diperkuat melalui penerbitan ketentuan dengan menambah jenis surat berharga/surat berharga syariah yang diperhitungkan dalam PLM/PLM syariah.

12) Terjalannya sinergi kebijakan untuk mendukung ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas otoritas sektor keuangan melalui KSSK. Sepanjang tahun 2025, koordinasi antaranggota KSSK menghasilkan 6 (enam) kesepakatan strategis, termasuk penetapan status kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) nasional dan penguatan sinergi kebijakan antarlembaga. Dalam rapat berkala KSSK I-IV tahun 2025, KSSK menyepakati bahwa kondisi SSK Indonesia tetap terjaga, didukung oleh stabilitas sektor fiskal, moneter, dan sistem keuangan yang resilien. Selain itu, KSSK menyepakati sejumlah sinergi kebijakan antarlembaga untuk menjaga ketahanan sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kesepakatan dimaksud antara lain mencakup respons kebijakan terkait *special rate* perbankan, penguatan likuiditas valuta asing domestik, optimalisasi *cash management* Pemerintah yang lebih efisien, serta kebijakan penghapusan piutang macet UMKM guna menjaga efektivitas transmisi kebijakan dan mendukung fungsi intermediasi.

Di sisi penguatan kerangka kelembagaan, KSSK juga memantau progres penyelesaian peraturan pelaksanaan UU P2SK sebagai bagian dari penguatan arsitektur stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya, evaluasi tindak lanjut hasil Simulasi Krisis Nasional (*Simkrisnas*) tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyempurnaan kerangka Protokol Manajemen Krisis (PMK) KSSK, serta diperkuat melalui evaluasi Simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Nasional Tematik (*Simtik*) tahun 2025 guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi risiko sistemik. Selain itu, penguatan tata kelola KSSK juga dilakukan melalui penetapan Rancangan Keputusan KSSK mengenai kerahasiaan informasi guna mendukung efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan antarotoritas.

Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan otoritas sektor keuangan juga terus diperkuat, khususnya bersama OJK, dalam rangka menjaga SSK dan memperkuat efektivitas pengawasan sektor perbankan. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia dan OJK melakukan koordinasi intensif pada

level teknis maupun pimpinan terkait rencana pemeriksaan bersama Bank Indonesia – OJK tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan pemeriksaan bank yang lebih terarah, terintegrasi, dan selaras dengan kewenangan masing-masing otoritas. Koordinasi juga diperkuat dalam penanganan insiden bank guna memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif apabila terjadi gangguan pada sektor perbankan. Penguatan mekanisme koordinasi tersebut menjadi salah satu arahan dalam *High Level Meeting* melalui forum KKD 1 tanggal 14 Februari 2025, yang menekankan pentingnya perumusan mekanisme penanganan insiden bank guna mendukung efektivitas eskalasi informasi, asesmen dampak, serta tindak lanjut lintas otoritas.

Sejalan dengan penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi pengawasan bersama OJK guna mendukung implementasi kebijakan DHE SDA. Koordinasi dilakukan secara intensif melalui forum KKD, FIP, maupun korespondensi antarlembaga untuk memastikan keselarasan aspek pengaturan, pengawasan, pelaporan, dan kesiapan industri perbankan dalam implementasi kebijakan dimaksud. Dalam kerangka penguatan SSK, Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi pertukaran data hasil pengawasan bank bersama OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk melalui pertukaran informasi mengenai kondisi bank tertentu dan pembahasan perkembangan sektor perbankan secara berkala.

Koordinasi Bank Indonesia dengan LPS turut diperkuat melalui pelaksanaan simulasi transaksi repo Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bagian dari penguatan kesiapan instrumen penanganan SSK. Sebagai tindak lanjut evaluasi berkala atas kerja sama Bank Indonesia – LPS tahun 2024, kedua lembaga melaksanakan pengujian sistem pendukung transaksi serta mekanisme penjualan dan/atau repo SBN pada 24 April 2025 dan 1–12 Desember 2025. Simulasi tersebut bertujuan menguji keandalan sistem, kesesuaian alur bisnis dengan prosedur masing-masing lembaga, serta mengidentifikasi area penyempurnaan mekanisme ke depan. Selanjutnya, dalam *High Level Meeting* Bank Indonesia–LPS tanggal 11 Juni 2025, disepakati perlunya penguatan mekanisme dan prosedur transaksi repo SBN LPS kepada Bank Indonesia dengan mempertimbangkan hasil simulasi, termasuk harmonisasi dengan prosedur transaksi repo surat berharga milik bank kepada Bank Indonesia. Koordinasi lanjutan juga diarahkan untuk



Opening Ceremony 30th ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC) di Yogyakarta.

memperdalam pengaturan acuan harga SBN LPS yang direpokan kepada Bank Indonesia, khususnya dalam kondisi pasar mengalami tekanan maupun pada situasi krisis sistem keuangan.

13) Terjalinnnya sinergi kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya keuangan yang inklusif dan hijau

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas K/L dalam mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembiayaan inklusif dan hijau. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia bersama K/L mencapai 4 (empat) kesepakatan strategis dalam mendorong penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan melalui koordinasi kebijakan, penguatan kerangka regulasi, dan pengembangan instrumen pendukung transisi ekonomi hijau.

Dalam lingkup domestik, Bank Indonesia bersama OJK dan Kemenkeu terus memperkuat sinergi kebijakan melalui berbagai inisiatif keuangan berkelanjutan. Kesepakatan dimaksud antara lain mencakup pengembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB), penguatan taksonomi berkelanjutan, pengembangan data keuangan berkelanjutan dan *tools* penghitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Kalkulator Hijau, serta penguatan *Climate Risk Stress Test* (CRST) guna meningkatkan kapasitas asesmen risiko iklim pada sektor Keuangan.

Di tingkat internasional, Bank Indonesia juga terus memainkan peran strategis dalam penguatan agenda keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Dalam kapasitas sebagai *co-chair* ASEAN Senior Level Committee Task Force on Sustainable Finance (SLC TF) bersama State Bank of Vietnam periode 2024–2026, Bank Indonesia bersama anggota SLC TF menandatangani pengembangan “*A Common Ground Framework for CRST in ASEAN*”. Inisiatif ini bertujuan membangun fondasi kerangka kerja CRST di kawasan yang menekankan *country and regional specificity* dalam asesmen risiko iklim, mengingat pendekatan global cenderung merefleksikan karakteristik negara maju. Dalam pengembangannya, Bank Indonesia bersinergi dengan seluruh bank sentral di ASEAN serta berbagai *think tanks* dan *technical experts*. Sebelumnya, Bank Indonesia bersama bank sentral di ASEAN juga telah menyusun *ASEAN Green Map* sepanjang periode 2024–2025 yang diseminasi strategisnya dilakukan pada 12 Juni 2025 di Bali.

Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi lintas K/L guna membahas berbagai inisiatif kebijakan keuangan berkelanjutan. Koordinasi erat dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemenkeu, OJK, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK-IAI), serta akademisi dan *think tanks*. Fokus pembahasan antara lain mencakup mobilisasi pendanaan

berkelanjutan, potensi dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan pasar karbon, penguatan peran taksonomi berkelanjutan, serta pengembangan *nature-related policy*. Di sisi penguatan kerangka kebijakan, koordinasi lintas K/L juga diarahkan pada penyusunan RPP mengenai mekanisme penetapan peta jalan serta tata cara pemantauan dan evaluasi kebijakan sumber daya manusia sektor keuangan. Selain itu, Bank Indonesia bersama K/L terkait turut mengembangkan *Indonesia Climate Scenario* untuk mendorong harmonisasi skenario iklim nasional yang selaras dengan target iklim nasional (*Second Nationally Determined Contribution/NDC*) dalam mendukung transisi yang berkeadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan, Bank Indonesia juga berperan aktif bersama Kementerian Keuangan dan OJK sebagai anggota *ex-officio* Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK-IAI) untuk mendukung pengembangan standar pelaporan keuangan berkelanjutan. Berbagai penguatan koordinasi dan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat fondasi keuangan berkelanjutan guna mendukung transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan resilien.

PS 05 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Di tengah dinamika global yang masih berlanjut, termasuk pesatnya perkembangan ekonomi keuangan digital (EKD) serta meningkatnya kompleksitas inovasi pembayaran, kebutuhan untuk menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran menjadi semakin penting. Di sisi domestik, terdapat peningkatan volume dan variasi transaksi digital, perluasan pelaku industri, serta perkembangan aset dan instrumen digital. Namun, akselerasi digitalisasi tersebut juga diiringi oleh meningkatnya risiko siber, privasi, dan keamanan data. Hal ini mendorong penguatan pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen yang didukung oleh keamanan sistem serta kesiapan infrastruktur secara andal dan merata.

Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan sistem pembayaran melalui penguatan keandalan infrastruktur dan struktur industri, perluasan akseptasi digital, serta peningkatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, termasuk pengelolaan uang Rupiah. Selain itu,

penguatan perlindungan konsumen terus didorong guna memastikan terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran Indonesia, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan program Asta Cita.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

14) Transaksi sistem pembayaran ritel yang cepat, mudah, murah, berkualitas, dan terpercaya

Bank Indonesia mendorong perkembangan transaksi, jumlah pengguna, dan jumlah *merchant* sistem pembayaran agar terus berakselerasi dan melampaui target. Pada akhir tahun 2025, total pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tercatat sebanyak 59,53 juta, dengan jumlah *merchant* QRIS yang meningkat menjadi 42,75 juta. Akselerasi QRIS juga terlihat dari kenaikan volume transaksi sebesar 148,54% (yoy) dan kenaikan nominal transaksi sebesar 115,28% (yoy) pada akhir tahun 2025, sehingga secara kumulatif volume transaksi QRIS hingga akhir tahun 2025 mencapai 15,51 miliar transaksi. Selain itu, transaksi *digital payment* tercatat 49,91 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 36% (yoy).

Untuk mendukung pertumbuhan transaksi pembayaran digital tersebut, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi instrumen dan kanal sistem pembayaran untuk memperluas ekonomi dan keuangan digital, sekaligus memperluas stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bank Indonesia melakukan peluncuran kerja sama QRIS Antarnegara dengan Jepang dan inisiasi *sandbox* QRIS Antarnegara dengan Tiongkok dan Korea Selatan. Selain itu, Inovasi fitur QRIS terus dilakukan Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berupa standar nasional QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP), khususnya dalam mendukung layanan publik dan transaksi ritel secara digital. Untuk semakin meningkatkan transaksi pembayaran digital bagi ekonomi kerakyatan, pada 2025, Bank Indonesia juga memberikan insentif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital. Insentif tersebut diwujudkan melalui kebijakan penyesuaian skema harga QRIS untuk *merchant* Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO), dari sebelumnya

sebesar 0,4% menjadi 0%, sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap penyediaan layanan publik oleh Pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya, guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*pro-growth*), Bank Indonesia telah memperpanjang kebijakan tarif SKNBI dan kartu kredit hingga 31 Desember 2025. Kebijakan dimaksud meliputi: (i) tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah; serta (ii) kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Bank Indonesia turut menerbitkan PADG No 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia (PADG APU, PPT, dan PPPSPM). Peraturan yang diterbitkan pada 30 Juni 2025 tersebut, merupakan pengaturan turunan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10 Tahun 2024 tentang APU, PPT, dan PPPSPM dan menjadi pedoman pelaksanaan teknis bagi pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal. Dalam PADG dimaksud, pihak yang wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM meliputi: (i) penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank yang melakukan penatausahaan sumber dana, penerusan transaksi, dan layanan remitansi, (ii) penyelenggara KUPVA bukan bank, dan (iii) pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia.

15) Ketersediaan Rupiah untuk mendukung sovereignty Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bank Indonesia berkomitmen untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kualitas yang prima di seluruh wilayah NKRI. Sebagai manifestasi upaya tersebut, sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia terus melaksanakan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan uang Rupiah, salah satunya melalui kegiatan layanan kas. Hal tersebut ditempuh dalam rangka menjaga ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, Bank Indonesia melaksanakan monitoring secara berkala untuk memenuhi kebutuhan perbankan terhadap uang Rupiah. Hasil pemantauan menunjukkan kesesuaian 100% antara jumlah penarikan perbankan melalui aplikasi BI-SILK (Sistem Informasi Layanan Kas Bank Indonesia) dengan jumlah *outflow* yang disalurkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam menjaga dan menyediakan Uang Layak Edar (ULE) bagi masyarakat pada tingkat standar kelayakan uang Rupiah (*soil level*), Bank Indonesia meningkatkan kualitas pelaksanaan Survei Tingkat Kelayakan Uang (STKU). Penguatan dilakukan pada metodologi survei, khususnya pada desain kuesioner dan sebaran sampel responden, untuk mengukur kelayakan uang pecahan besar (UPB) dan uang pecahan kecil (UPK). Hasil STKU secara rata-rata pada tahun 2025 menunjukkan kualitas uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tercermin dari hasil Indeks Kelayakan Uang (IKU) dengan pencapaian nilai 8,66 untuk UPB dan 6,90 untuk UPK.

Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk menyediakan layanan kas di wilayah 3T untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah kartal yang berkualitas (*layak edar*) dan terpercaya melalui pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB). ERB merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menyediakan layanan kas di wilayah 3T. Selain layanan kas, ERB juga dirangkaikan dengan kegiatan kampanye "Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBP)" yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar tidak merusak Rupiah dengan melipat, mencoret, menstapler, meremas, atau membasahi uang Rupiah. ERB melayani 18 provinsi dengan 91 pulau 3T yang telah dikunjungi serta melibatkan pejuang Rupiah di seluruh satuan kerja kas Bank Indonesia. Adapun modal kerja yang terserap sebanyak Rp154,4 miliar. Kegiatan tersebut diharapkan dapat ikut menjaga ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) di seluruh wilayah NKRI.

16) Terwujudnya industri jasa sistem pembayaran yang memenuhi Standardisasi Kompetensi, Manajemen Risiko dan Infrastruktur Teknologi (KMI)

Dalam rangka mendukung Sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal, Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kompetensi SDM pelaku industri di bidang Sistem

Pembayaran. Sepanjang tahun 2025, pesatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang Sistem Pembayaran turut meningkatkan kompleksitas risiko yang perlu diantisipasi secara memadai. Kondisi tersebut memerlukan penguatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaku industri, baik perbankan maupun Lembaga Selain Bank (LSB), guna mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan resilien. Upaya dimaksud juga sejalan dengan amanat UU P2SK yang mendorong Bank Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha di sektor keuangan, termasuk sektor sistem pembayaran.

Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, Bank Indonesia menginisiasi implementasi Standardisasi Kompetensi Bidang Sistem Pembayaran (SK SP) melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Sistem Pembayaran beserta turunannya, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Implementasi tersebut mewajibkan pemenuhan standar kompetensi bagi SDM Pelaku Sistem Pembayaran pada berbagai jenjang jabatan, mulai dari Pelaksana, Penyelia, Pejabat Eksekutif, hingga Direksi yang membawahi kegiatan operasional di bidang Sistem Pembayaran. Pelaksanaan SK SP dimaksud telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia No 5 Tahun 2024 (PBI SK SP), Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 (PADG Pelaksanaan SK SP), serta Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Sistem Pembayaran (PBK SP).

Sebagai upaya memastikan implementasi SK SP berjalan sesuai dengan ketentuan dan berjalan dengan baik, Bank Indonesia melakukan serangkaian koordinasi bersinergi dengan mitra kerja di area sistem pembayaran. Bank Indonesia dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menandatangani Nota Kesepahaman (NK) tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang pada 20 Mei 2025, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Standardisasi Kompetensi Bidang Sistem Pembayaran pada 17 Oktober 2025. Hal ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat penerapan standardisasi kompetensi untuk SDM pelaku sistem pembayaran melalui sinergi dan kolaborasi lintas K/L. Selain koordinasi dengan otoritas berwenang, Bank Indonesia melakukan pengembangan dan implementasi SK SP melalui kolaborasi dan koordinasi erat dengan Forum

Komunikasi Direksi Operasional Perbankan (FKDOP), Lembaga Sertifikasi Profesi Sistem Pembayaran (LSP SP), Lembaga Pelatihan Kerja Sistem Pembayaran (LPK SP), dan asosiasi profesi/ industri terkait, untuk memastikan SK SP selaras dengan kebijakan Bank Indonesia serta perkembangan industri sistem pembayaran terkini. Selanjutnya, dalam rangka mendukung implementasi kewajiban SK SP, terutama kewajiban sertifikasi kompetensi SP, Bank Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Sistem Pembayaran Indonesia (LSP SPI) dalam rangka memperoleh lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas perubahan dan penambahan Skema Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran, termasuk skema sertifikasi bagi anggota direksi.

Di samping itu, dalam rangka mendukung fungsi pengawasan kepada Pelaku Sistem Pembayaran dan pemantauan kepada Penyelenggara SK SP, Bank Indonesia telah mengembangkan sistem pelaporan *online* SK SP. Sistem ini memungkinkan monitoring pemenuhan kompetensi SDM pelaku Sistem Pembayaran, berupa Bank dan LSB, memastikan pengawasan dan pemantauan yang efektif, kepatuhan pelaku SK SP, serta ketersediaan data yang lengkap, akurat, kini dan utuh.

17) Infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang aman dan andal

Kinerja stabilitas dan ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga pada tingkat yang sangat tinggi. Sepanjang tahun 2025, ketahanan operasional sistem pembayaran Bank Indonesia tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu merespons dinamika peningkatan volume dan kompleksitas transaksi secara berkelanjutan. Seluruh sistem utama—BI-RTGS, SKNBI, dan BI-FAST—beroperasi secara andal dalam mendukung transaksi nilai besar dan ritel, tanpa gangguan sistemik.

Selanjutnya, Bank Indonesia telah memastikan kesesuaian infrastruktur SP dengan standar internasional melalui *monitoring*, uji skenario, pemeliharaan serta pelatihan SDM. Sebagai bagian dari modernisasi infrastruktur pembayaran ritel yang bersifat *national-driven*, Bank Indonesia terus memperkuat BI-FAST sebagai sistem *real-time*, beroperasi 24/7, berbiaya rendah, dan semakin resilien terhadap risiko siber. Penguatan keamanan BI-FAST diakselerasi melampaui praktik saat ini, melalui langkah strategis yang terintegrasi pada aspek *people*, *process*, dan *technology*, termasuk eksplorasi awal pemanfaatan *machine learning* (ML) pada

GEBER PK

Satu Visi, Satu Aksi: Membangun Ekosistem Pelindungan Konsumen yang Tangguh dan Berdaya melawan Fraud dan Scam



Kick Off Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) di Jakarta.

Fraud Detection System (FDS) guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan deteksi *fraud* secara proaktif. Pada 30 Juni 2025, Bank Indonesia turut menerbitkan PADG Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PADG Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan BI-FAST sebagai respons kebijakan Bank Indonesia sejalan dengan meningkatnya volume dan kompleksitas transaksi melalui BI-FAST.

Selain itu, pada 31 Oktober 2025, Bank Indonesia telah memperkuat kerangka manajemen risiko infrastruktur nilai besar melalui penerbitan PADG Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*. Ketentuan ini tidak hanya mendukung efisiensi, keandalan, dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS, namun juga merefleksikan evaluasi menyeluruh yang mencakup penguatan kewajiban peserta Sistem BI-RTGS, rencana implementasi BI-RTGS *payment gateway* berbasis *web*, serta penyesuaian terhadap operasional BI-RTGS yang telah berjalan. Lebih lanjut, pada 15 November 2025, Bank Indonesia menyelenggarakan *User Group SP FMI* sebagai penguat capaian kelembagaan melalui forum evaluasi, komunikasi kebijakan, dan *knowledge sharing* yang secara aktif melibatkan seluruh peserta Sistem BI-RTGS. Dengan tema “SP-FMI S.A.T.U: Sinergi, Aman, Tangguh, Unggul”, kegiatan ini melampaui fungsi koordinasi rutin dengan mendorong peningkatan *awareness* dan kesiapan

industri terhadap tantangan keamanan siber dan risiko *fraud* yang semakin kompleks, sebagai bagian dari penguatan keandalan dan kelancaran SP FMI secara berkelanjutan.

18) Terwujudnya kebijakan dan program pelindungan konsumen nasional

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah menyelenggarakan 8 (delapan) kegiatan edukasi pelindungan konsumen sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, dengan rerata tingkat pemahaman sebesar 4,97. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara terstruktur sepanjang tahun, dimulai pada 27 Februari 2025 melalui edukasi kepada Jaksa se-Indonesia sebagai langkah awal penguatan pemahaman pelindungan konsumen di kalangan aparat penegak hukum. Selanjutnya, penguatan literasi konsumen dilakukan secara masif melalui *Kick Off Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK)* Tematik Bulan Ramadan pada 5 Maret 2025, yang menjadi momentum kolaborasi lintas otoritas dan pemangku kepentingan. Kegiatan dimaksud dihadiri antara lain oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sekretariat Negara, Bareskrim Polri, Bappebti, Badan Siber dan Sandi Negara, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia, Perhimpunan Bank Nasional, Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia, dan penyedia jasa pembayaran.

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta berbagai kementerian/lembaga terkait menyelenggarakan berbagai program edukasi keuangan untuk memperkuat literasi dan pelindungan konsumen di era digital. Kegiatan edukasi dilakukan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), tenaga pendidik, dan masyarakat umum, dengan fokus pada peningkatan pemahaman mengenai transaksi keuangan yang aman, kewaspadaan terhadap penipuan digital, serta penguatan perilaku konsumen yang bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Kegiatan edukasi yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kartini pada 21 April 2025 dan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) pada 18 Mei 2025 menekankan peran strategis perempuan dalam perekonomian sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penipuan digital. Upaya edukasi diperkuat melalui *workshop training of trainers* (ToT) Cerdas Keuangan Digital kepada tenaga pengajar pada bulan Juni 2025. Selanjutnya, fokus edukasi diarahkan pada peningkatan literasi keuangan bagi PMI dan keluarga pada bulan Agustus 2025, sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelompok masyarakat rentan dalam menghadapi dinamika digitalisasi keuangan. Rangkaian kegiatan edukasi kemudian ditutup dengan pelaksanaan GEBER PK pada 3 November 2025, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sekretariat Negara, Bareskrim Polri, Bappebti, Badan Siber dan Sandi Negara, asosiasi industri, serta penyedia jasa pembayaran.

Program edukasi yang dilakukan secara masif dan terkoordinasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk membangun *awareness* dan kewaspadaan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat agar menjadi konsumen yang *well-literate*. Akses pelindungan konsumen juga diperkuat melalui penyempurnaan mekanisme penanganan pengaduan, termasuk *soft launching web* Portal Pengaduan Konsumen Bank Indonesia (*web* PKBI). Pelaksanaan program edukasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemitraan dengan K/L dan industri dalam rangka meningkatkan pelindungan konsumen. Kolaborasi dengan mitra kerja turut ditingkatkan melalui Forum SIGUNA (Diskusi Reguler

Pelindungan Konsumen untuk Indonesia) sebagai wadah bagi Bank Indonesia, otoritas terkait, dan penyelenggara untuk berbagi informasi, materi, serta membahas isu-isu pelindungan konsumen beserta mitigasi dan solusinya.

PS 06 Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan pelindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Sinergi dalam digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian, termasuk meningkatnya kompleksitas inovasi keuangan digital serta perkembangan aset dan mata uang digital lintas batas. Di sisi domestik, percepatan ekonomi dan keuangan digital yang ditandai oleh peningkatan transaksi digital dan perluasan pelaku industri, memerlukan penguatan sinergi untuk memastikan pengelolaan risiko yang memadai, peningkatan pelindungan konsumen, serta kesiapan infrastruktur dan pemerataan distribusi uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI. Merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait lainnya guna mendorong akselerasi inovasi sistem pembayaran yang selaras dengan kapasitas ekosistem dalam mengelola risiko dan melindungi konsumen. Perkembangan *fintech* dan *e-commerce* turut membuka peluang bagi pelaku usaha, termasuk *start-up* dan non-bank, dalam menghadirkan solusi pembayaran yang semakin cepat, aman, dan efisien. Dalam kerangka tersebut, kolaborasi antara Bank Indonesia, asosiasi, dan industri menjadi kunci dalam mendorong percepatan ekonomi dan keuangan digital, termasuk dalam pengelolaan uang Rupiah. Selain itu, penguatan sinergi juga dilakukan dalam pengawasan ekonomi dan keuangan digital serta penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), guna mewujudkan: (i) efisiensi transaksi dan ekosistem EKD, (ii) terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta (iii) tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

19) Terjalinnnya sinergi dalam rangka mendukung percepatan ekonomi dan keuangan digital

Bank Indonesia senantiasa mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan 3 (tiga) kali sinergi dengan berbagai K/L dan pihak terkait yang difokuskan pada penguatan koordinasi lintas K/L. Koordinasi tersebut menghasilkan 2 (dua) rekomendasi kesepakatan dalam rangka perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah, penguatan literasi dan akseptasi digital melalui program QRIS Jelajah Indonesia, serta perluasan konektivitas pembayaran lintas negara.

Penguatan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah dilakukan dalam rangka implementasi elektronifikasi di sektor transportasi. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, ASPI, PJP, dan operator moda transportasi dalam melakukan perluasan akseptasi QRIS TAP. Hingga saat ini, 13 provinsi telah mengadopsi QRIS TAP fitur *single tap* di berbagai moda transportasi, seperti DAMRI dan berbagai Trans di daerah. Pasca peluncuran pada 30 Oktober 2025, QRIS TAP fitur *Tap In Tap Out* kini telah diimplementasikan pada lima moda utama di Jabodetabek, yaitu Kereta Commuter Indonesia (KCI)/Kereta Rel Listrik (KRL), Transjakarta, *Mass Rapid Transit* (MRT), *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, LRT Jabodebek, dan area parkir.

Bank Indonesia juga mendorong perluasan QRIS Antarnegara, khususnya bersama Jepang, Tiongkok, dan

Korea Selatan. Bank Indonesia melakukan koordinasi intensif dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan dalam rangka persiapan interkoneksi dan uji coba transaksi QRIS Antarnegara. Pelaksanaan *sandboxing* atau uji coba bersama Jepang telah dilakukan mulai 15 Mei 2025, sementara kerja sama dengan Tiongkok masih dalam tahap pengembangan oleh industri di kedua negara dan akan memasuki uji coba *sandbox*. Hasil koordinasi dan uji coba tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia - Jepang dan dimulainya *Sandbox* QRIS Antarnegara Indonesia - Tiongkok pada 17 Agustus 2025. Inisiasi QRIS Antarnegara Indonesia - Korea Selatan telah dimulai pada Oktober 2025 dan diperkirakan akan siap untuk implementasi di tahun 2026.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendorong perluasan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan antara lain melalui penguatan peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah. Penguatan tersebut juga didukung melalui berbagai inisiatif perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Bank Indonesia turut memberikan dukungan terhadap program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) melalui penyempurnaan indeks ETPD sebagai instrumen untuk memantau dan mendorong akselerasi digitalisasi daerah secara lebih terukur.



Peluncuran program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD) pada Pagelaran FEKDI x IFSE 2025 di Jakarta.

Selanjutnya, pada akhir tahun 2025, Bank Indonesia meluncurkan program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD) sebagai bagian dari rangkaian FEKDI x IFSE 2025. Program ini merupakan langkah konkret dalam mendorong terciptanya layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. KATALIS P2DD dikembangkan sebagai wadah sinergi lintas daerah sekaligus *knowledge hub* untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah, meningkatkan literasi fiskal masyarakat, memperluas kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Selain itu, Bank Indonesia bersama K/L terkait juga mengumumkan pemenang *Championship TP2DD* kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah. Program ini diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah sekaligus mendorong pengembangan ekosistem digital pada pemerintahan daerah.

20) Terjalannya sinergi dalam rangka mendukung Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah di bidang PUR dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan uang Rupiah (PUR) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan koordinasi yang menghasilkan 4 (empat) kesepakatan dalam rangka penguatan pelaksanaan PUR yang dilaksanakan antara lain melalui Forum Mata Uang Rupiah (FOMARU), Forum Industri (FORIN), Kementerian Bea dan Cukai, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (APJATIN), dan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Rakor Botasupal).

Pada tahun 2025, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi melalui penyelenggaraan FOMARU secara berkala. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyalurkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan uang Rupiah, mulai dari perencanaan, pencetakan, hingga pemusnahan uang. Sepanjang 2025, FOMARU membahas berbagai isu strategis, antara lain perkembangan ekonomi terkini, kebijakan prioritas pemerintah, arah kebijakan ekonomi dan keuangan hijau, serta proyeksi belanja bantuan sosial (bansos) tahun 2025 dan implikasinya terhadap kebutuhan uang kartal. Pada triwulan IV 2025, FOMARU dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Evaluasi Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) Tahun

Anggaran 2025-2027 untuk membahas proyeksi kebutuhan uang kartal pada periode akhir tahun dan hari besar keagamaan nasional, guna memastikan kecukupan dan kelancaran distribusi uang di masyarakat.

Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan industri melalui penyelenggaraan FORIN PUR bersama APJATIN. Forum ini menjadi wadah pembahasan arah kebijakan pengembangan Penyedia Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), khususnya dalam penguatan model bisnis dan pengembangan industri PUR yang berkelanjutan, termasuk kemitraan layanan kas antara perbankan dan PJPUR sebagaimana tercantum dalam *Blueprint* Pengelolaan Uang Rupiah 2024–2030 (BPPUR). Secara umum, pelaku industri, baik dari perbankan maupun PJPUR, mendukung arah kebijakan tersebut dengan tetap mempertimbangkan dinamika transformasi digital yang terus berkembang.

Selanjutnya, pemberantasan uang Rupiah palsu tetap menjadi perhatian utama Bank Indonesia bersama aparat penegak hukum dan kementerian/ lembaga terkait yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Sepanjang tahun 2025, koordinasi dilakukan secara berkala melalui forum lintas otoritas guna memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta upaya pencegahan. Dalam berbagai pertemuan yang dihadiri oleh seluruh unsur tersebut dari berbagai wilayah di Indonesia, disampaikan bahwa peredaran uang Rupiah palsu tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Seluruh unsur Botasupal sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan uang Rupiah palsu, termasuk melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri keaslian uang Rupiah guna meningkatkan kewaspadaan dan mencegah peredaran uang palsu.

Bank Indonesia juga melakukan upaya penguatan literasi Rupiah melalui penyelenggaraan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) pada Agustus 2025 sebagai sarana edukasi publik yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara Bank Indonesia, mitra kerja, dan komunitas untuk memperluas pemahaman mengenai cinta, bangga, dan paham Rupiah (CBP), sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan Rupiah. Sinergi edukasi juga diperluas sepanjang tahun melalui kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan organisasi masyarakat guna memperkuat literasi Rupiah secara berkelanjutan. FERBI 2025 dihadiri oleh lebih dari 14.000 pengunjung dari berbagai

kelompok masyarakat, a.l. Kementerian/Lembaga, mitra kerja Pengelolaan Uang Rupiah, institusi pendidikan, *cash handler*, UMKM, pedagang ritel, hingga penyuluh agama di masyarakat. Selain itu, dalam rangka memperluas literasi Rupiah, di FERBI 2025 secara bersamaan juga diselenggarakan *Kick Off Sinergi Edukasi CBP Rupiah* bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan Keagamaan (PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama), Asosiasi Psikolog Pendidikan Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Disisi operasional, Bank Indonesia turut memperkuat koordinasi dengan mitra strategis sepanjang tahun 2025 dalam mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi uang. Upaya yang dilakukan antara lain melalui *High Level Meeting* (HLM) antara Bank Indonesia, Perum Peruri, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), guna membahas penyempurnaan mekanisme administrasi dan logistik, termasuk peningkatan efisiensi proses kepabeanaan dan standardisasi dokumen guna mempercepat pengeluaran bahan uang serta meminimalkan potensi kendala operasional. Langkah tersebut diharapkan dapat semakin memperlancar rantai pasok uang Rupiah dan mendukung terjaminnya ketersediaan uang di seluruh wilayah Indonesia.

- 21) Terjalinnnya sinergi terkait penerapan prinsip Anti Pencurian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan pengawasan Sistem Pembayaran (SP)

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan berbagai otoritas dalam penerapan prinsip Anti Pencurian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU/PPT/PPSPM) guna menjaga integritas sistem keuangan, khususnya di sektor sistem pembayaran. Upaya ini diwujudkan melalui sejumlah kegiatan koordinasi yang menghasilkan 4 (empat) kesepakatan strategis dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Langkah tersebut sejalan dengan visi *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia* (BSPI) 2030 yang menekankan keseimbangan antara inovasi sistem pembayaran dan penguatan integritas sistem keuangan.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia juga memperkuat kerangka regulasi untuk memberikan pedoman lebih rinci bagi pihak yang diatur dan diawasi dalam menerapkan prinsip APU/PPT/PPSPM. Upaya tersebut ditempuh melalui penerbitan PADG Nomor 15 Tahun 2025 tentang APU/PPT/PPSPM sebagai penguatan pengaturan implementatif di area Sistem Pembayaran. Penguatan regulasi dimaksud turut didukung oleh peningkatan kerja sama internasional dengan otoritas mitra serta partisipasi aktif Bank Indonesia dalam berbagai agenda global, termasuk pelaksanaan rencana aksi *Mutual Evaluation* oleh Financial Action Task Force (FATF). Di sisi domestik, koordinasi dengan K/L terkait



Opening Ceremony Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2025 di Jakarta.

Perempuan Berdaya dan Cerdas Finansial

Menyongsong Masa Depan Sejahtera



Opening Ceremony Edukasi Keuangan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta.

juga terus diperkuat guna mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, khususnya dalam implementasi Strategi Nasional (Stranas) TPPU dan TPPT.

Di tingkat domestik, Bank Indonesia bersama OJK melakukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran (PSP), baik bank maupun lembaga selain bank. Sinergi tersebut mencakup pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) berupa Bank, pengawasan terhadap kasus-kasus *fraud* yang terjadi pada PJP Bank serta penggunaan layanan SP di PJP Bank untuk aktivitas ilegal, termasuk judi *online*. Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama OJK menyepakati pengawasan langsung terhadap PSP Bank serta pemantauan penyelesaian kasus yang terkait dengan sistem pembayaran pada industri pasar modal sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui pelaksanaan pengawasan bersama dan rencana *joint audit* terhadap PSP berupa Lembaga Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Langkah ini ditujukan untuk melengkapi pengawasan tidak langsung serta memperkuat surveilans terhadap potensi penyalahgunaan layanan sistem pembayaran, termasuk yang terindikasi terkait aktivitas ilegal, termasuk judi *online*. Rangkaian koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan tindak lanjut berupa rencana *joint audit* terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Lembaga Selain Bank (LSB) dan Penyedia Infrastruktur

Pembayaran (PIP) bersama PPATK terkait implementasi APU/PPT, serta pemantauan penyelesaian kasus di industri perbankan yang merupakan hasil sinergi pengawasan dengan OJK dan PPATK. Secara keseluruhan, penguatan sinergi tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga integritas sistem pembayaran sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan.

22) Terjalinnnya sinergi terkait Pelindungan Konsumen

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pelindungan konsumen. Penguatan koordinasi ini menghasilkan 4 (empat) kesepakatan strategis terkait pelindungan konsumen bersama Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pendidikan dan OJK.

Sinergi bersama mitra kerja diwujudkan melalui berbagai program edukasi dan peningkatan literasi keuangan kepada beragam segmen masyarakat. Upaya ini mencakup penguatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai aspek pelindungan konsumen, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik sebagai agen literasi keuangan digital. Pada Februari 2025, Bank Indonesia bersama Mahkamah Agung (MA) melaksanakan edukasi pelindungan konsumen kepada hakim melalui pembentukan *booth* Kampung Hukum dan dilanjutkan dengan edukasi kepada jaksa di seluruh Indonesia melalui Kejaksaan RI.

Pada Juni 2025, Bank Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan *workshop Training of Trainers (ToT) Cerdas Keuangan Digital* bagi pengajar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen pada 26 Juni 2025. Selain itu, edukasi juga diperluas kepada kelompok masyarakat strategis, termasuk kepada sekitar 2.000 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkolaborasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), untuk menekankan pentingnya perilaku bertransaksi yang aman, bijak, dan bertanggung jawab melalui prinsip PeKA Bertransaksi (Peduli, Kenali, Adukan). Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali prinsip PeKA Bertransaksi (Peduli, Kenali, Adukan), yaitu: (i) Peduli terhadap manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen; (ii) Kenali modus penipuan dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi; (iii) Adukan setiap kendala atau penipuan ke kanal pengaduan resmi. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia bersama OJK juga memperkuat edukasi kepada PMI guna meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan keberdayaan konsumen dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk kegiatan literasi publik dan media digital. Bank Indonesia bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyelenggarakan edukasi “Konsumen Cerdas PeKA Bertransaksi” kepada masyarakat, antara lain melalui Ruang CERDAS dan *podcast* edukasi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada Juli 2025. Sejalan dengan meningkatnya risiko di era digital, sinergi diarahkan pada penguatan perlindungan konsumen melalui peningkatan keamanan ekosistem digital, termasuk upaya pencegahan aktivitas ilegal seperti judi daring. Pada 2025, Bank Indonesia dan Komdigi mengimplementasi *quick win* strategi pemberantasan judi daring (*online gambling*) sebagai bagian dari penguatan keamanan ekosistem digital. Secara keseluruhan, penguatan sinergi ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan keberdayaan konsumen untuk memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab.

PS 07 Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta

memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi

Bank Indonesia terus memperkuat strategi OM *pro-market* guna menarik aliran masuk portofolio asing sekaligus mendorong pendalaman PUVA dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global serta meluasnya ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif sepihak AS. Selain itu, terdapat percepatan digitalisasi di sektor finansial termasuk penggunaan aset digital dan investasi AI yang mendorong peningkatan risiko keuangan global. Perkembangan ekosistem keuangan yang lebih efisien dan kredibel juga memerlukan dukungan infrastruktur pasar keuangan yang modern, andal, dan sesuai standar internasional. Selain itu, pada tahun 2025 terdapat penguatan mandat UU P2SK yang mendorong Bank Indonesia untuk menindaklanjuti peralihan derivatif PUVA yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur, mengawasi, dan mengembangkan PUVA untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

23) Terlaksananya pengembangan produk dan harga untuk mendukung likuiditas di pasar sekunder

Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan produk dan harga melalui reformasi pengaturan, penguatan sinergi dan koordinasi, serta sosialisasi. Pada tahun 2025, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait produk, *pricing*, dan pelaku PUVA sebagai bagian dari reformasi pengaturan. Ketentuan yang telah diterbitkan, yaitu terkait: (i) Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Menggunakan Rupiah dan Dirham melalui Bank pada 31 Januari 2025; (ii) Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank pada 27 Maret 2025; (iii) Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank pada 27 Maret 2025; (iv) Lembaga pendukung PUVA pada 27 Maret 2025; (v) Penyelenggara Sarana Transaksi pada tanggal 10 Juni 2025; (vi) Transaksi Pasar Uang pada 25 Juli 2025; dan (vii) Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank pada tanggal 8 September 2025. Selain itu, telah diterbitkan pula ketentuan

internal mengenai *dealer* utama untuk mengatur tata cara persetujuan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi *dealer* utama PUVA.

Reformasi pengaturan PUVA tersebut diiringi dengan upaya Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan pengembangan berbagai instrumen moneter *pro-market*. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Pengembangan pasar uang dan pasar valas terus dilanjutkan dengan fokus pada aspek *product*, *pricing*, pelaku, dan infrastruktur (3P+1I) dalam rangka mewujudkan pasar uang Rupiah dan valas yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas melalui pengembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

a) Pengembangan Instrumen Repo

Pada tahun 2025, transaksi repo menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tercermin dari Rata-Rata Harian (RRH) transaksi repo yang mencapai Rp18,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rp15,0 triliun pada tahun 2024. Sejalan dengan perkembangan tersebut, RRH *outstanding* repo juga meningkat menjadi Rp83,8 triliun dari Rp62,2 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi di tengah kondisi likuiditas pasar yang tetap *ample*, sehingga volume transaksi repo secara umum terjaga stabil hingga akhir tahun. Dari sisi *underlying*, mayoritas transaksi repo pada triwulan IV 2025 menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp13,2 triliun atau 72% dari total transaksi, sementara sisanya sebesar Rp5,1 triliun atau 28% menggunakan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Komposisi tersebut mencerminkan peran repo yang semakin penting dalam mendukung pengelolaan likuiditas berbasis instrumen pasar keuangan domestik.

Efisiensi pembentukan harga repo juga terus membaik pasca implementasi *Dealer Utama (DU) PUVA* secara bertahap sejak Mei 2024, yang tercermin dari penyempitan *spread* kuotasi *bid-ask* pada berbagai tenor. Berdasarkan pengamatan pada *platform market operator*, *spread* kuotasi *bid-ask* tenor *overnight (O/N)* relatif konsisten berada pada kisaran 5 bps, tenor 1 minggu sekitar 10 bps, dan tenor 1 bulan sekitar 20 bps. Meskipun demikian, pada triwulan IV 2025, harga repo tenor O/N masih

relatif lebih tinggi dibandingkan harga PUAB tenor O/N.

Implementasi kebijakan DU PUVA oleh Bank Indonesia juga turut mendorong peningkatan transaksi repo pada tenor 2 minggu hingga 1 bulan serta memperkuat likuiditas transaksi SRBI dengan sisa jangka waktu jatuh tempo 3 bulan. Perkembangan tersebut mendukung peningkatan efisiensi pembentukan harga dan penguatan kurva imbal hasil repo tenor 1 minggu hingga 1 bulan serta SRBI tenor 3 bulan hingga 12 bulan, sehingga semakin dapat dimanfaatkan sebagai referensi *price discovery* oleh pelaku pasar. Dalam mendukung pembentukan *money market curve* yang lebih kredibel, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan DU PUVA guna meningkatkan likuiditas transaksi repo dan SRBI pada tenor dimaksud.

b) Pengembangan Instrumen *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*

Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan DNDF sebagai salah satu instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, sejalan dengan arah strategis pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) dalam *Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2030*. Penguatan tersebut menunjukkan hasil positif, tercermin dari peningkatan Rata-Rata Harian (RRH) transaksi DNDF menjadi USD364 juta pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan USD298 juta pada tahun 2024. Peningkatan transaksi DNDF didukung oleh berbagai langkah strategis sepanjang tahun 2025, termasuk integrasi pengembangan DNDF dengan strategi pengelolaan moneter dan pendalaman PUVA melalui implementasi *Dealer Utama (DU) PUVA* di pasar valuta asing. Sejalan dengan inisiatif BPPU 2030, implementasi DU PUVA untuk transaksi DNDF dilakukan secara bertahap melalui fase inisiasi (*piloting*), pengembangan, dan pendalaman. Pada tahun 2025, DNDF semakin diperkuat sebagai fasilitas bagi DU PUVA untuk mendorong peningkatan transaksi, baik dari sisi volume maupun penguatan interkoneksi antarpelaku pasar. Langkah tersebut turut mendukung penguatan likuiditas dan efisiensi pasar valuta asing domestik sebagai bagian dari pengembangan instrumen lindung nilai yang semakin dalam dan kredibel.

Di sisi penguatan infrastruktur pasar, sejak 1 September 2025 diberlakukan penerapan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui *Central Counterparty* (CCP) atau *Non-Centrally Cleared Derivatives* (NCCD). Kebijakan tersebut terutama berlaku pada transaksi DNDF antarbank di luar mekanisme kliring CCP sehingga memerlukan proses adaptasi pada tahap awal implementasi. Dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan dimaksud, Bank Indonesia bersinergi dengan OJK untuk mendorong adopsi kontrak penerapan margin melalui koordinasi bersama *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA) dan APUVINDO, termasuk melalui kegiatan sosialisasi serta penandatanganan komitmen kontrak penerapan margin pada 26 September 2025.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dan pendalaman aspek kebijakan bersama otoritas dan pelaku pasar guna mendukung implementasi margin secara efektif. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pembahasan pengaturan *Transfer of Title* dalam UU P2SK pada 13 November 2025 serta penyelenggaraan *BI-APUVINDO-ISDA Trilateral Meeting* pada 18 November 2025 untuk memperkuat keselarasan pemahaman dan kesiapan kontraktual penerapan margin. Selain itu, Bank Indonesia menindaklanjuti konsultasi atas perubahan *Rule Book* CCP PUVA, khususnya terkait pengaturan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* pada Desember 2025.

Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama APUVINDO melalui evaluasi pengembangan DNDF dan berbagai kegiatan sosialisasi, termasuk edukasi terkait lindung nilai (*hedging*) di Makassar pada 4 Desember 2025. Berbagai langkah tersebut turut mendorong peningkatan pemanfaatan DNDF, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan lindung nilai valuta asing oleh pelaku pasar, khususnya investor asing, di tengah peningkatan *capital inflow* dan berlanjutnya dampak positif implementasi pengembangan DNDF oleh Bank Indonesia.

c) **Pengembangan Produk PUVA berdasarkan prinsip syariah**

Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan produk Pasar Uang dan

Pasar Valuta Asing (PUVA) berbasis prinsip syariah yang *pro-market* guna mendukung manajemen likuiditas, mendorong peningkatan pembiayaan syariah, serta memperdalam pasar keuangan syariah. Sepanjang tahun 2025, berbagai inisiatif strategis dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan asesmen, kajian, dan *policy notes* yang mencakup antara lain perluasan investor Sukuk Bank Indonesia, pengembangan *Term Deposit* valas syariah, transaksi lindung nilai (*hedging*) syariah, transaksi repo syariah, hingga pengembangan *Alternate Reference Rate* (ARR) syariah.

Dalam rangka mengakselerasi pengembangan tersebut, Bank Indonesia membentuk Kelompok Kerja (KK) PUVA Syariah yang melibatkan otoritas dan pelaku industri. Kelompok kerja ini menghasilkan berbagai kajian, pedoman, dan rekomendasi dalam pengembangan produk dan *pricing* PUVA syariah, dengan fokus pada penguatan instrumen repo syariah, inovasi produk, evaluasi lindung nilai syariah, serta pengembangan referensi suku bunga syariah. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa pengembangan produk tetap selaras dengan kebutuhan industri dan bersifat *pro-market*. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga melanjutkan penyusunan berbagai *handbook* transaksi, termasuk untuk transaksi SiPA, repo syariah, lindung nilai syariah, dan instrumen syariah lainnya, yang mencakup panduan mekanisme, pencatatan, dan pelaporan transaksi. Penyusunan *handbook* ini bertujuan untuk mendorong peningkatan transaksi *secured* di pasar uang syariah sekaligus memperluas pemanfaatan instrumen syariah yang belum optimal.

Pada sisi pengembangan instrumen, Bank Indonesia juga melakukan penguatan Operasi Moneter Syariah (OMS), antara lain melalui perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SukBI) pada Oktober 2025 dengan membuka akses investor nonbank dan nonresiden di pasar sekunder. Untuk mendukung likuiditas dan transparansi harga, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penerbitan kode ISIN SukBI serta menunjuk PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) sebagai penyedia harga pasar wajar. Selain itu, peningkatan aktivitas pasar juga didorong melalui transaksi repo syariah, SiPA, serta interaksi transaksi antara

lembaga keuangan syariah dan konvensional. Pengembangan produk juga diperluas ke instrumen pasar valas syariah, antara lain melalui kajian awal *Islamic Profit Rate Swap* (IPRS) dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) Syariah. Upaya ini memperkuat keragaman instrumen lindung nilai syariah sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan.

Selain berperan dalam mendorong pengembangan instrumen pasar uang syariah, Bank Indonesia juga turut aktif dalam membangun kompetensi pelaku melalui dukungan terhadap penyelenggaraan sertifikasi tresuri syariah, termasuk penyusunan modul ajar dan keterlibatan Bank Indonesia sebagai tenaga ahli. Hal ini tecermin dari aktivitas pasar uang syariah tetap tumbuh kuat dengan rata-rata volume harian sebesar Rp4,58 triliun pada tahun 2025. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam membangun ekosistem PUVA syariah yang lebih dalam, likuid, dan berdaya saing, sekaligus mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi syariah.

d) Reformasi Suku Bunga Rupiah

Pada tahun 2025, Bank Indonesia terus memperkuat upaya reformasi suku bunga rupiah di pasar domestik guna memastikan kelancaran transisi dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) menuju suku bunga acuan berbasis transaksi, yaitu *INDONIA*. Pengumuman penghentian permanen publikasi JIBOR yang efektif pada 1 Januari 2026 menjadi landasan utama dalam mendorong kesiapan pelaku pasar untuk beradaptasi terhadap penggunaan referensi suku bunga yang lebih kredibel dan berbasis transaksi riil.

Dalam rangka mendukung kesiapan tersebut, Bank Indonesia memfokuskan berbagai inisiatif sepanjang tahun pada penguatan pemahaman dan kesiapan operasional pelaku pasar. Bank Indonesia, bersama National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) dan APUVINDO, secara intensif melakukan komunikasi, sosialisasi, serta pendampingan melalui *coaching clinic* dan forum diskusi. Upaya ini diarahkan untuk memastikan kelancaran proses transisi, termasuk penyesuaian kontrak keuangan eksisting melalui mekanisme *re-papering* dan penerapan *fallback language*

dengan menggunakan suku bunga alternatif seperti *Compounded INDONIA* dan *INDONIA Index*. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga memastikan ketersediaan referensi harga di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), termasuk *INDONIA*, yang disusun berdasarkan data transaksi yang akurat dan berintegritas. Sinergi yang erat dengan otoritas dan pelaku pasar terus diperkuat untuk menjaga keberlangsungan transisi sekaligus mendorong pengembangan pasar berbasis *INDONIA (INDONIA-based market)*.

Pada pertengahan 2025, Bank Indonesia semakin mengarahkan fokus kebijakan pada penguatan infrastruktur pasar, khususnya melalui pengembangan pasar *Overnight Index Swap (OIS)* sebagai dasar pembentukan struktur suku bunga jangka waktu (*term structure*) berbasis transaksi. Berbagai inisiatif dilakukan untuk mendorong perluasan *counterparty line* serta meningkatkan proses *price discovery* di pasar derivatif. Salah satu capaian penting adalah penyelenggaraan *High Level Event* penandatanganan perjanjian induk derivatif pada 26 September 2025, yang menghasilkan 105 kontrak baru dan 27 komitmen penerapan margin dengan partisipasi 56 bank. Secara keseluruhan, berbagai langkah strategis yang ditempuh sepanjang tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam memastikan transisi suku bunga berjalan lancar, memperdalam pasar keuangan, serta memperkuat kualitas pelaku pasar guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

e) Pengembangan Pelaku PUVA

Pada aspek pelaku PUVA, Bank Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pelaku PUVA yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Sasaran strategis pengembangan pelaku PUVA terbagi menjadi 2 (dua) area, yaitu: (1) kompetensi pelaku berpedoman pada MCoC sejalan dengan praktik terbaik global dan (2) keaktifan pelaku. Sasaran strategis pengembangan pelaku PUVA berupa pelaku yang semakin aktif dan kompeten ditetapkan mempertimbangkan sasaran strategis pengembangan produk dan harga ke depan. Pada aspek keaktifan pelaku, pangsa jumlah pelaku repo dan DNDF terhadap total perbankan ditargetkan masing-masing mencapai 90% dan 60% dari seluruh pelaku perbankan.

Pada tahun 2025, upaya pengembangan kompetensi pelaku PUVA dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan sertifikasi tresuri, program *refreshment*, serta pendidikan berkelanjutan, bekerja sama dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (APUVINDO) sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO) dan asosiasi profesi di bidang PUVA (a.l ACI FMA). Hingga akhir tahun 2025, capaian pengembangan pelaku PUVA tercermin dari tingginya tingkat kepatuhan dan partisipasi industri. Jumlah pelaku yang telah tersertifikasi mencapai 97% dari total pelaku PUVA, yaitu sebanyak 2.013 orang dari total 2.084 orang. Angka ini lebih tinggi dibanding target akhir tahun 2025 sebesar 80%. Selanjutnya, jumlah tresuri dealer terdaftar mencapai 92% dari total tresuri dealer yang dilaporkan oleh bank dan perusahaan pialang, yaitu sebanyak 1.916 orang dari total 2.084 orang. Capaian ini juga lebih tinggi dibanding target yakni sebesar 85%. Sementara itu, penyampaian *Statement of Compliance* (SoC) terhadap kode etik pasar telah dilakukan oleh 80% dari total bank dan perusahaan pialang, yaitu sebanyak 90 institusi dari total 113 institusi.

Lebih lanjut, Bank Indonesia juga telah melakukan fasilitasi proses kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Tresuri PUVA, sebagai salah satu upaya pengembangan kompetensi pelaku PUVA. Saat ini, proses kaji ulang SKKNI bidang Tresuri PUVA tersebut telah selesai dengan disepakatinya 25 (dua puluh lima) Unit Kompetensi dalam Rancangan SKKNI bidang Tresuri PUVA pada Konvensi Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025. Konvensi Nasional tersebut dihadiri oleh 102 peserta, yang terdiri dari otoritas terkait (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia), *Self-Regulatory Organization* (SRO) bidang PUVA (APUVINDO) dan asosiasi profesi (ACI FMA Indonesia, IIGMA, dan INAMBA), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Dewan Syariah Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta perwakilan akademisi dan perbankan).

Secara umum, rancangan SKKNI dimaksud mencakup 3 (tiga) fungsi kunci aktivitas tresuri PUVA, yaitu mengelola aset dan liabilitas, mengelola transaksi tresuri, dan menerapkan

prinsip kehati-hatian melalui manajemen risiko dan kode etik. Sebagai tindak lanjut atas hasil kesepakatan dalam konvensi tersebut, Rancangan SKKNI hasil Konvensi Nasional telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan pada 26 Desember 2025, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai SKKNI bidang Tresuri PUVA.

f) Pengembangan Derivatif PUVA

Selaras dengan amanat UU P2SK, Bank Indonesia melaksanakan penguatan fungsi pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan dari Bappebti ke Bank Indonesia. Pengembangan Derivatif PUVA dilakukan melalui pendekatan 3P+1I yang mencakup penguatan aspek produk, *pricing*, pelaku pasar, dan infrastruktur, guna membentuk ekosistem pasar yang lebih likuid, transparan, efisien, dan berdaya saing. Lebih lanjut, amanat UU P2SK mengenai pengalihan tugas tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Bappebti pada 10 Januari 2025 sebagai landasan formal peralihan kewenangan.

Dalam rangka pengembangan derivatif PUVA ke depan, Bank Indonesia menyusun "*Roadmap Pengembangan Derivatif PUVA*" sebagai panduan strategis yang memuat arah kebijakan, tahapan implementasi, serta prioritas pengembangan pasar Derivatif PUVA yang selaras dengan BPPU 2030. *Roadmap* ini mencakup pengembangan instrumen yang relevan untuk mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia antara lain kebutuhan lindung nilai, penguatan mekanisme pembentukan harga yang kredibel, peningkatan kualitas dan integritas pelaku pasar, serta penguatan infrastruktur pasar keuangan, termasuk peran bursa dan lembaga kliring.

Pada tahap awal implementasi *roadmap* derivatif PUVA, Bank Indonesia melakukan penataan ekosistem Derivatif PUVA melalui pelaksanaan pendaftaran ulang atas aspek 3P+1I. Pendaftaran ulang mencakup identifikasi produk dan mekanisme *pricing* yang tercermin dalam peraturan dan tata tertib bursa, baik untuk transaksi multilateral di bursa maupun transaksi bilateral seperti SPA dan PALN, serta pendaftaran ulang pelaku dan infrastruktur

pasar keuangan yang terlibat di ekosistem Derivatif PUVA. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh *baseline* data yang komprehensif sebagai dasar penguatan pengaturan dan arah pengembangan ke depan.

Bank Indonesia juga mengembangkan sistem pelaporan sementara melalui *Information Exchange Application* (IEA), yang difokuskan pada pengumpulan data transaksi Derivatif PUVA melalui pengaliran data dari BAPPEBTI. Data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemantauan perkembangan pasar secara lebih granular dan menjadi salah satu input dalam penyusunan analisis perkembangan pasar keuangan.

Sebagai tindak lanjut konkret penguatan derivatif PUVA, Bank Indonesia menerbitkan PADG No.26 Tahun 2025 tentang “Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing”, yang menjadi landasan regulasi komprehensif untuk mendukung penguatan ekosistem pasar. Ketentuan ini mencakup pengaturan secara *end-to-end* atas aspek 3P+I, yaitu produk, *pricing*, pelaku, dan infrastruktur, serta mencakup perizinan, pengawasan, pelaporan, dan perlindungan konsumen. Dengan kerangka hukum yang terintegrasi tersebut, implementasi pengaturan derivatif PUVA diharapkan berjalan konsisten dengan kebijakan pasar uang dan pasar valas Bank Indonesia serta memberikan kepastian bagi pelaku pasar dalam pengelolaan risiko.

24) Sinergi Bank Indonesia dengan otoritas terkait dalam pelaksanaan kewenangan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan pasar keuangan melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait, kementerian/lembaga, industri, dan asosiasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pembiayaan ekonomi serta pengelolaan risiko pasar keuangan. Upaya ini secara konsisten diarahkan untuk mengakselerasi pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), termasuk PUVA syariah, melalui sinergi lintas otoritas serta penguatan kerangka kelembagaan dan operasional pasar.

Pada tahap awal, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan OJK dalam pelaksanaan pengawasan PUVA, termasuk melalui penyusunan

mekanisme pertukaran informasi guna memastikan keselarasan data dan efektivitas pemeriksaan terhadap pelaku pasar dan infrastruktur pasar keuangan. Koordinasi dilakukan dengan OJK dalam rangka pemberian rekomendasi rencana keikutsertaan bank sebagai pelaku pasar, pemeriksaan moneter dalam rangka pemantauan Utang Luar Negeri dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, serta penyelenggaraan *Focus Group Discussion/FGD* untuk penguatan pengawasan *Financial Market Infrastructure/FMI Central Counterparty*. Pemeriksaan PUVA dilakukan secara terkoordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta diikuti dengan penyampaian hasil pemeriksaan sebagai bagian dari penguatan pengawasan terintegrasi. Seiring dengan perluasan cakupan pengawasan, termasuk pada infrastruktur pasar keuangan seperti *Central Counterparty* (CCP) dan pasar FX *Futures*, Bank Indonesia terus meningkatkan kesiapan kerangka dan pendekatan pengawasan dalam menghadapi pengalihan kewenangan dari Bappebti.

Selanjutnya, Bank Indonesia memperkuat pengawasan dan pengembangan infrastruktur pasar melalui berbagai forum koordinasi. Koordinasi pengawasan antara lain dilakukan bersama Komite Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner OJK (KKD), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta forum lainnya. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan OJK, KPEI, dan APUVINDO dalam pelaksanaan *technical assistance* dan forum diskusi untuk memperkuat pengawasan infrastruktur pasar keuangan sesuai standar internasional, khususnya *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI). Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap KPEI sebagai CCP untuk memastikan kinerja operasional dan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia.

Dalam rangka mendukung transisi pengalihan pengawasan derivatif PUVA, Bank Indonesia menjalin koordinasi intensif dengan Bappebti dan OJK, termasuk melalui sosialisasi kepada pelaku industri guna memastikan proses peralihan berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas pasar. Bank Indonesia juga menyusun kerangka dan pendekatan pengawasan derivatif PUVA sebagai dasar dari pelaksanaan tugas dan kewenangan yang baru. Di sisi pengembangan pasar dan edukasi, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS bersinergi dalam forum koordinasi antar otoritas sektor keuangan terus memperluas literasi keuangan melalui program “Literasi Keuangan Indonesia Terdepan” (LIKE IT). Sepanjang 2025 diselenggarakan



Opening Ceremony Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT!) di Jakarta.

sebanyak 7 (tujuh) kali LIKE IT di berbagai kota, dengan 4 (empat) di antaranya oleh Bank Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperluas basis investor ritel, serta mengurangi kesenjangan literasi keuangan antarwilayah. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) peserta, baik secara luring maupun daring. Dalam kesempatan ini, ke-empat otoritas memberikan edukasi kepada peserta untuk mengelola keuangan dan berinvestasi untuk masa depan. Penguatan juga dilakukan terhadap kompetensi dan integritas pelaku PUVA melalui sinergi dengan APUVINDO sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO), termasuk dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi tresuri, penguatan kode etik pasar, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Di tingkat global, Bank Indonesia turut aktif dalam Global Foreign Exchange Committee (GFXC) untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip global *best practice* melalui pengkinian kode etik pasar (FX Global Code) yang kemudian diadopsi dalam kerangka nasional. Memasuki akhir tahun 2025, penguatan pengawasan semakin ditingkatkan melalui pendekatan berbasis perilaku, risiko, dan kepatuhan, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap dealer utama dan CCP dalam pemenuhan standar PFMI, serta penguatan ketahanan sistem informasi melalui kebijakan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS). Di sisi lain, sinergi dengan APUVINDO juga diperkuat melalui penyelenggaraan *High Level Meeting* yang membahas pengembangan pasar, termasuk repo, penguatan suku bunga

referensi, serta pengembangan instrumen pasar uang.

Selain itu, Bank Indonesia bersama OJK dan Bappebti juga terus memperkuat koordinasi dalam memastikan kelancaran implementasi peralihan aset derivatif. Hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2024 dan amanat UU PPSK yang mengamanatkan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto, dan derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan *underlying* yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Menindaklanjuti amanat tersebut, Bank Indonesia telah melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Bappebti dan OJK untuk membahas berbagai *cross cutting issue* dalam proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan termasuk pengawasan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Nota Kesepahaman Bank Indonesia, OJK, dan Bappebti untuk melakukan koordinasi trilateral dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang terkait Derivatif PUVA, Derivatif EFEK, dan Derivatif Komoditi.

25) Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) Bank Indonesia yang aman dan andal

Bank Indonesia terus mengembangkan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) secara terarah dengan mengacu pada strategi pengembangan IPK dalam BPPU 2030. Strategi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3I) sehingga mampu beroperasi secara andal, efisien, dan aman. Pengembangan IPK dilakukan secara menyeluruh mencakup sisi *front-end*, *middle-end*, hingga *back-end* guna mendukung pendalaman pasar keuangan yang modern dan terintegrasi.

Sepanjang tahun 2025, penguatan IPK dari sisi *front end* difokuskan pada sarana transaksi untuk mendukung pendalaman PUVA. Hal ini tercermin pada penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sarana Transaksi. Selanjutnya, merujuk pada PADG dimaksud, Bank Indonesia telah memberikan izin operasional kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara ETP antarpasar melalui platform Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) untuk transaksi repo. Pengembangan sisi *front-end* juga dilakukan pada proses interkoneksi antara sarana transaksi dengan CCP sebagai IPK *middle-end* sehingga proses transaksi dapat berjalan secara *seamless*, meminimalkan intervensi manual, serta meningkatkan efisiensi dan keandalan pemrosesan transaksi.

Pada sisi *middle-end*, pengembangan IPK diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan CCP, perluasan layanan CCP, dan penguatan kelembagaan CCP. Sepanjang tahun 2025, optimalisasi pemanfaatan CCP telah dilakukan melalui penambahan anggota CCP serta penyelenggaraan seminar dan *sharing session* pemanfaatan CCP bekerja sama dengan APUVINDO. Lebih lanjut, pada 29 September 2025, telah diluncurkan perluasan layanan CCP berupa layanan TPA Repo yang merupakan kolaborasi Bank Indonesia, OJK, KPEI, serta 8 (delapan) *pilot bank* selaku penyelenggara CCP. Operasionalisasi layanan ini merupakan *milestone* dalam pengembangan ekosistem repo nasional yang terintegrasi, aman, dan efisien. Dari sisi kelembagaan, penguatan CCP diarahkan pada upaya memperoleh status *recognized* CCP dari berbagai yurisdiksi utama seperti Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang.

Pada sisi *back-end*, penguatan IPK dilakukan pada modernisasi penyelesaian transaksi dan penguatan infrastruktur data PUVA. Hal tersebut tercermin dari

progres pengembangan BI-SSSS Generasi III yang terus berjalan dengan melibatkan berbagai *stakeholder* domestik maupun internasional. Bank Indonesia juga terus memperkuat pemenuhan *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) untuk BI-RTGS dan BI-SSSS. Selanjutnya, pengembangan *Trade Repository* sebagai bagian infrastruktur data PUVA terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan mendukung kebijakan berbasis data (*data-driven policy*).

Selanjutnya, stabilitas dan ketersediaan layanan IPK non-sistem pembayaran tetap terjaga dengan baik sepanjang tahun 2025. Penyelenggaraan BI-ETP dan BI-SSSS berjalan secara lancar dan stabil, mencerminkan ketahanan operasional yang kuat dalam mendukung pendalaman pasar keuangan melalui kebijakan *OM Pro Market*. Untuk memperkuat keberlanjutan operasional, Bank Indonesia juga terus menyiapkan aspek teknis melalui penyusunan petunjuk operasional serta pengembangan sistem yang selaras dengan standar internasional. Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam membangun infrastruktur pasar keuangan yang modern, efisien, dan berintegritas, sehingga mampu mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan.

PS 08 Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut akibat fragmentasi perdagangan, kerentanan rantai pasok, dan dinamika geopolitik, pelaku usaha dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah percepatan transformasi digital berbasis AI serta meningkatnya tuntutan transisi menuju ekonomi hijau yang mendorong kebutuhan akan model usaha dan pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Di sisi domestik, pemulihan daya beli masyarakat yang belum merata, terbatasnya akses pembiayaan termasuk pembiayaan syariah, serta meningkatnya kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit UMKM masih menjadi tantangan dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan.



Opening Ceremony Forum Keuangan Sosial Syariah di Jakarta.

Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia terus mengakselerasi pengembangan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan (IEKB) guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan dilakukan melalui pengembangan ekosistem, perluasan akses pasar dan pembiayaan, penguatan kapasitas UMKM dan pelaku usaha syariah, serta peningkatan sinergi lintas pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan pembiayaan syariah dan akses keuangan yang lebih luas bagi UMKM dan pelaku usaha syariah, mempercepat pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta mempererat sinergi dan kolaborasi lintas otoritas dan pemangku kepentingan guna memperkuat ekosistem ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan, baik konvensional maupun syariah.

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan program Bank Indonesia serta memperkuat sinergi untuk meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tercermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

26) Kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan syariah serta akses keuangan bagi UMKM dan pelaku usaha syariah

Bank Indonesia terus memperkuat berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan hijau, melalui

sinergi dan kolaborasi dengan K/L serta pelaku industri keuangan syariah, baik dari sektor komersial maupun sosial. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan syariah sekaligus memperluas inklusi ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, penguatan pembiayaan syariah dilakukan melalui strategi yang mencakup inovasi produk, penguatan ekosistem pembiayaan, peningkatan literasi, serta pengembangan kajian strategis untuk mendukung penguatan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Pada tahap awal, Bank Indonesia mendorong inovasi produk perbankan syariah melalui pengembangan model bisnis berbasis prinsip syariah, termasuk skema *investment account* sejalan dengan amanat UU P2SK untuk memperluas cakupan produk perbankan syariah. Upaya tersebut diperkuat melalui sinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Kemenkeu, termasuk dalam peninjauan potensi insentif fiskal guna mendukung implementasi produk pembiayaan syariah. Penguatan sinergi nasional tersebut ditandai dengan penyelenggaraan *Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2025* pada Februari 2025 sebagai tonggak awal rangkaian program penguatan pembiayaan syariah sepanjang tahun. Melalui rangkaian BPS, Bank Indonesia bersama pemangku kepentingan terus memperkuat sisi *supply* dan *demand* pembiayaan syariah melalui berbagai kegiatan, antara lain *business matching*,

business deals, coaching, serta penguatan ekosistem pembiayaan syariah bagi UMKM. Inisiatif tersebut tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pendamping UMKM terhadap mekanisme serta produk pembiayaan syariah. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia secara aktif memfasilitasi *business matching* antara UMKM dengan lembaga keuangan bank maupun nonbank guna memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Di sisi penguatan literasi, Bank Indonesia secara konsisten meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengacu pada Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah (SNLIEKSI) yang disusun oleh KNEKS bersama 16 K/L, termasuk Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bersinergi dengan OJK, Kemenkeu, Kementerian Koperasi, Kementerian ATR/BPN, BKKBN, Institut Pertanian Bogor (IPB), perguruan tinggi, serta pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 31 kegiatan edukasi secara masif sepanjang tahun 2025. Program edukasi tersebut mencakup berbagai forum strategis, antara lain Festival Keluarga Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), *Sharia Economic and Financial Outlook 2025*, *Training of Trainers (TOT) Da'i dan Da'iyah*, Pesantren Kilat Ramadan, serta Festival Ramadan Istiqlal. Edukasi juga diperkuat melalui penyelenggaraan Sekolah Ekonomi Syariah (SES) yang menasar generasi muda, sekaligus penguatan literasi keuangan hijau melalui pemanfaatan kalkulator hijau dan peningkatan pemahaman UMKM terhadap pembiayaan berkelanjutan. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan hasil positif, tecermin dari rata-rata tingkat pemahaman peserta sebesar 5,17.

Sejalan dengan komitmen pengembangan ekonomi keuangan hijau, Bank Indonesia juga aktif menyusun berbagai kajian pengembangan ekonomi hijau yang disampaikan pada serangkaian kegiatan seminar internasional, antara lain *International Conference on Innovative Pathways to Green Growth* di Bali yang didiseminasikan pada seminar *The Effect of Green Human Capital in Green Economic Growth: Indonesia as a Case Study* dalam seminar internasional di Oita, Jepang. Dalam kerangka pengembangan ekonomi-keuangan syariah yang berkelanjutan, Bank Indonesia juga menyusun berbagai kajian strategis terkait pengembangan model bisnis keuangan sosial

syariah serta optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan, termasuk Dana Abadi Masyarakat (DAM) haji dalam kerangka *Islamic Circular Economy*. Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional melalui pengembangan ekosistem yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berbagai sinergi kebijakan, inovasi produk, penguatan literasi, serta pengembangan kajian strategis tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pembiayaan syariah sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pembiayaan syariah yang tetap terjaga pada kisaran 7,55% hingga 9,66% (yoy) di berbagai periode tahun berjalan, sehingga memperkuat peran strategis ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

27) Terlaksananya program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai inisiatif dalam mendorong inklusi ekonomi-keuangan dan keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada akselerasi UMKM agar naik kelas dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program strategis, antara lain UMKM Go Ekspor, UMKM Go Digital, digital farming, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan *database* UMKM potensial. Dukungan ini secara konsisten diimplementasikan melalui fasilitasi perluasan akses pasar dan pembiayaan, sehingga jumlah UMKM berdaya saing terus meningkat hingga mencapai 11.811 UMKM pada akhir tahun 2025.

Dalam rangka mendorong UMKM Go Ekspor, Bank Indonesia melaksanakan serangkaian kegiatan strategis mulai dari penyusunan pedoman, pemetaan, seleksi, hingga kurasi UMKM sesuai standar internasional. Produk UMKM terkurasi difasilitasi untuk mengikuti berbagai ajang promosi perdagangan domestik dan internasional, serta *business matching* ekspor yang melibatkan mitra strategis. Upaya ini tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam menembus pasar global.

Bank Indonesia terus memperkuat akses pembiayaan UMKM melalui program UMKM Go Digital. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan literasi keuangan digital, antara lain melalui

pemanfaatan aplikasi SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan), bekerja sama dengan K/L terkait diantaranya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), untuk melaksanakan *Training of Trainers* bagi 100 *trainer* di berbagai wilayah. Selain itu, fasilitasi *business matching* pembiayaan antara UMKM dan lembaga keuangan bank maupun nonbank juga terus diperluas, termasuk pengembangan kelompok subsisten guna meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas usaha masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks syariah, upaya peningkatan literasi pencatatan keuangan digital juga didorong melalui pelatihan dan uji kompetensi pencatatan keuangan pesantren dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) yang diikuti oleh 95 perwakilan pondok pesantren dari seluruh Indonesia.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga mendorong pencapaian inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan dari sisi Pelaku Usaha Syariah (PUS). Hal ini dilakukan melalui upaya Bank Indonesia dalam memberdayakan dan mengembangkan ekosistem produk halal pada 3 (tiga) sektor prioritas, yaitu makanan dan minuman halal (*halal food*), *modest fashion*, dan pariwisata ramah muslim. Pada sektor *halal food*, pengembangan dilakukan melalui penguatan rantai nilai halal guna mendukung stabilitas harga dan inflasi. Upaya ini dilakukan pada beberapa program, yaitu: (i) program INFRATANI (*Integrated Farming with Information Technology and Society*) dan Program DESA BERDIKARI

(Berdaya, Kreatif, Religi, dan Inspiratif), (ii) program kemandirian ekonomi pesantren berbasis GNPIP untuk komoditas strategis penyumbang inflasi (cabai, bawang merah, ayam pedaging, beras, dan perikanan), serta (iii) program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia sektor *halal food*.

Program INFRATANI merupakan inisiatif pengembangan ekosistem rantai nilai yang bertujuan memperkuat sektor pertanian terintegrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan melibatkan kelompok masyarakat, termasuk jaringan pesantren. Sementara itu, Desa Berdikari merupakan program pemberdayaan masyarakat desa yang berfokus pada pengembangan ekosistem komoditas unggulan berbasis halal melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan rantai nilai. Adapun program IKRA dilakukan melalui kurasi, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar. Pada tahun 2025, anggota IKRA sektor *halal food* bertambah sebanyak 43 pelaku usaha yang dipilih melalui seleksi. Pelaku usaha dimaksud kemudian mengikuti pelatihan dan pendampingan dalam bentuk *bootcamp*. Sepanjang tahun 2025, anggota IKRA dilibatkan pada dalam beragam kegiatan promosi perdagangan, baik skala domestik maupun internasional, seperti Ubud Food Festival, Tuttofood, Seoul Food &H Hotel (SFH), Pasar Hamburg, Wabel Dubai Summit, Foodex, World Expo Osaka, MIHAS (Malaysia International Halal Showcase), dan ISEF. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan eksposur produk, namun juga kesempatan *business linkage*



Talkshow UMKM Go Global dalam pagelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 di Jakarta.



Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta.

dan transaksi *Business-to-Business* (B2B). Selain itu, penguatan daya saing sektor pangan halal juga didorong melalui peluncuran dukungan ekosistem *holding business* digital pesantren dengan pengembangan *virtual market* Pesantren Nusantara (Pesantara). Melalui *platform* Pesantara, peluang kolaborasi bisnis antarpesantren dapat ditingkatkan sehingga memperkuat peran pesantren sebagai motor kemandirian ekonomi dan pilar ketahanan pangan nasional.

Pengembangan sektor ini juga didukung melalui penyusunan kajian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 yang bertujuan meningkatkan daya saing destinasi ramah muslim di tingkat nasional dan daerah. Penguatan ekosistem juga didorong melalui berbagai kegiatan *flagship* seperti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang menjadi wadah integrasi promosi, *business matching*, dan literasi ekonomi-keuangan syariah. Kegiatan ini mampu mencatatkan nilai transaksi dan komitmen pembiayaan yang signifikan, sekaligus memperluas akses pasar bagi UMKM dan pelaku usaha syariah. Secara keseluruhan, berbagai langkah strategis tersebut menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam membangun ekosistem UMKM dan ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi domestik.

28) Terjalannya kesepakatan / program / koordinasi dengan otoritas / asosiasi / komunitas / lembaga

nasional dan internasional dalam ekonomi keuangan inklusif dan hijau, baik konvensional maupun syariah

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta mitra kerja dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, termasuk penguatan ekosistem industri halal. Koordinasi dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui berbagai forum strategis dan kerja sama lintas sektor, sehingga menghasilkan berbagai kesepakatan dan tindak lanjut program yang konkret.

Selama tahun 2025, sejumlah tindak lanjut telah dilakukan atas kesepakatan antara Bank Indonesia dan berbagai lembaga terkait untuk mendukung ekonomi-keuangan inklusif hijau termasuk penguatan ekosistem industri halal. Di antaranya adalah pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Wakaf, Infak, Sedekah (PINTER ZAWAIS) bersama Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional yang bertujuan untuk menyediakan basis data terpadu sebagai landasan penyusunan strategi akselerasi pengembangan ZISWAF. Selain itu, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dalam penyusunan *roadmap* pengembangan amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem rantai nilai halal. Pengembangan skema pembiayaan inovatif juga menjadi perhatian, tecermin dari penyusunan kajian Bank Indonesia bersama KNEKS dan Kementerian Keuangan mengenai konsep Lembaga Pembiayaan Pembangunan Berbasis Wakaf atau *Indonesia Sharia Economic Development Fund*

(ISEDf). Guna memperkuat kapasitas kelembagaan, Bank Indonesia juga bersinergi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kegiatan *capacity building* dan penyusunan opini syariah terkait tugas-tugas Bank Indonesia, seperti instrumen SUKBI, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan PUVAS. Selain itu, koordinasi dilakukan secara masif dan terstruktur antara lain melalui kerja sama yang erat dalam pelaksanaan kegiatan Inklusi dan Literasi Keuangan yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 3–4 Februari 2025 di Provinsi Sumatera Utara.

Penguatan industri halal dilakukan melalui penguatan ekosistem jaminan produk halal (JPH) secara end-to-end bersama K/L terkait. Pada sisi hulu, dilakukan kolaborasi dengan KNEKS untuk rencana pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal di beberapa wilayah. Sementara itu, pada sisi hilir, dilakukan pembahasan/FGD dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan pelatihan sertifikasi halal. Hal ini dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi halal Rumah Potong Hewan (RPH), pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA), serta penerapan *halal traceability* untuk menjamin ketersediaan dan transparansi bahan baku halal. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi sertifikasi halal oleh KPwDN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bagi 64 Rumah Potong Hewan di berbagai wilayah, serta penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi JULEHA sesuai standar yang berlaku. Selain itu, penguatan ekosistem halal juga dilakukan melalui pengembangan model bisnis Toko Bahan Baku (Tobaku) Halal yang menyediakan bahan baku halal terverifikasi bagi pelaku usaha, guna mendorong akselerasi sertifikasi halal serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekosistem halal.

Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan berbagai K/L dan mitra kerja sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menginisiasi tindak lanjut Nota Kesepahaman (NK), penyampaian draf Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan pertemuan dengan Deputi Kesetaraan Gender untuk membahas rencana kerja sama ke depan terkait Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Perempuan. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan OJK terkait literasi dan inklusi keuangan serta diseminasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk

Disabilitas Berdaya (SETARA) sebagai program unggulan Bank Indonesia-OJK.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan sejumlah kementerian dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan perluasan keuangan inklusif. Kerja sama tersebut mencakup Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertanian, dan diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, penguatan kapasitas, serta kegiatan aktivasi dalam rangkaian Karya Kreatif Indonesia. Dari sisi kelembagaan, sinergi ini juga diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum pada 14 Mei 2025, Kementerian Koperasi pada 21 Oktober 2025, dan Kementerian UMKM pada 23 Oktober 2025, sementara Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian diperbaharui pada 24 September 2025. Dengan dukungan lintas kementerian tersebut, Bank Indonesia mendorong ekosistem yang lebih terintegrasi agar pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, dan akses keuangan inklusif dapat berjalan lebih luas dan lebih efektif.

Bank Indonesia juga bersinergi dengan berbagai lembaga internasional sebagai *founding member*, *board chairman*, serta *board member* dalam rangka mendukung pengembangan industri keuangan syariah global. Kolaborasi dilakukan dengan berbagai *multilateral organization* seperti: (i) International Islamic Liquidity Management (IILM) untuk penyusunan *policy note* sukuk IILM sebagai *standing facility* BI; (ii) Islamic Financial Services Board (IFSB) yang merupakan lembaga penyedia standar keuangan syariah global; dan (iii) International Monetary Fund (IMF) untuk penyusunan *joint research* terkait Islamic Money Market Framework. Bank Indonesia juga menjalin kerja sama erat dengan Bank Negara Malaysia (BNM) melalui penyusunan *joint research* untuk mengembangkan pasar uang syariah. Partisipasi ini menunjukkan *institutional leadership* Bank Indonesia diantaranya untuk mendukung penyediaan instrumen likuiditas global.

Di sisi penguatan kebijakan dan perencanaan, Bank Indonesia bersama Kementerian Pariwisata dan mitra terkait menyusun kajian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 untuk mengukur daya saing destinasi ramah muslim di berbagai provinsi. Selain itu, integrasi kebijakan pusat dan daerah diperkuat melalui peluncuran panduan kolaborasi lintas urusan daerah dalam pengembangan ekonomi syariah, yang menjadi acuan strategis bagi pengembangan ekonomi daerah berbasis syariah. Lebih lanjut, kolaborasi dilakukan dengan



Nota Kesepahaman
antara
BANK INDONESIA
dengan
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
dan KEMENTERIAN AGAMA RI
MELAKUKAKAN KERJA SAMA STRATEGIS
DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DAN KEUANGAN NASIONAL

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan PP Muhammadiyah di Jakarta.

Kementerian Agama, PP Muhammadiyah, MUI dan mitra terkait lainnya. Pada bulan Agustus 2025, Bank Indonesia dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah serta Bank Indonesia dan Kementerian Agama secara resmi memperkuat komitmen sinergi dan koordinasi dalam pengembangan ekonomi syariah melalui penandatanganan NK antarlembaga. Dengan semangat kolaborasi yang kuat, Bank Indonesia bersama dengan MUI dan KNEKS menyampaikan inisiatif strategis ekonomi dan keuangan syariah nasional dalam acara Sarasehan Ekonomi Syariah yang dihadiri oleh K/L, pelaku industri, asosiasi serta akademisi. Kegiatan ini semakin menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Lebih lanjut, pada bulan September 2025 telah dilakukan penandatanganan PKS antara Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem rantai nilai halal di Indonesia. Secara keseluruhan, berbagai upaya sinergi dan koordinasi tersebut menunjukkan peran aktif Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan implementasi kebijakan yang selaras antarotoritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata dan berdaya tahan.

PS 09 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia

serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional di tengah dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks, ditandai dengan fragmentasi yang meluas, diikuti kebijakan proteksionisme antara lain penerapan tarif resiprokal oleh AS yang kemudian memicu kebijakan balasan dari berbagai negara. Ketidakpastian tersebut juga berdampak pada aliran modal *emerging market* yang bergeser ke *safe haven asset*, sehingga meningkatkan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Melalui kebijakan internasional yang strategis dan proaktif, seperti mendorong transaksi berbasis mata uang lokal, menjaga kepercayaan lembaga internasional dan pemeringkat dengan pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian nasional, serta strategi diplomasi di forum internasional, Bank Indonesia turut menjaga perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah situasi global yang semakin menantang.

Sepanjang 2025, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

29) Terjaganya persepsi positif lembaga internasional, lembaga pemeringkat, dan investor global terhadap perekonomian Indonesia

Bank Indonesia secara konsisten menerapkan strategi yang proaktif dan kredibel untuk menjaga persepsi positif lembaga internasional, investor global, dan lembaga pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Dalam kapasitasnya sebagai Sekretariat Investor Relations Unit (IRU) Nasional, Bank Indonesia berhasil mengelola persepsi tersebut secara efektif dengan tujuan utama mendorong peningkatan arus masuk modal asing, baik dalam bentuk investasi portofolio (*portfolio investment*) maupun investasi langsung (*direct investment*).

Kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia tercermin dari 8 (delapan) laporan dengan afirmasi peringkat kredit yang positif oleh berbagai lembaga internasional dan pemeringkat global. Pada 2025, sejumlah lembaga seperti Fitch, S&P, Moody's, JCR, dan R&I mempertahankan peringkat Indonesia pada level *investment grade* dengan *outlook* stabil. Afirmasi ini menunjukkan keyakinan terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia yang didukung oleh stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, cadangan devisa yang memadai, serta kebijakan fiskal dan moneter yang *prudent* serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu, berbagai laporan lembaga internasional, termasuk publikasi AMRO, turut menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu titik terang di tengah ketidakpastian global, dengan prospek pertumbuhan yang solid dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

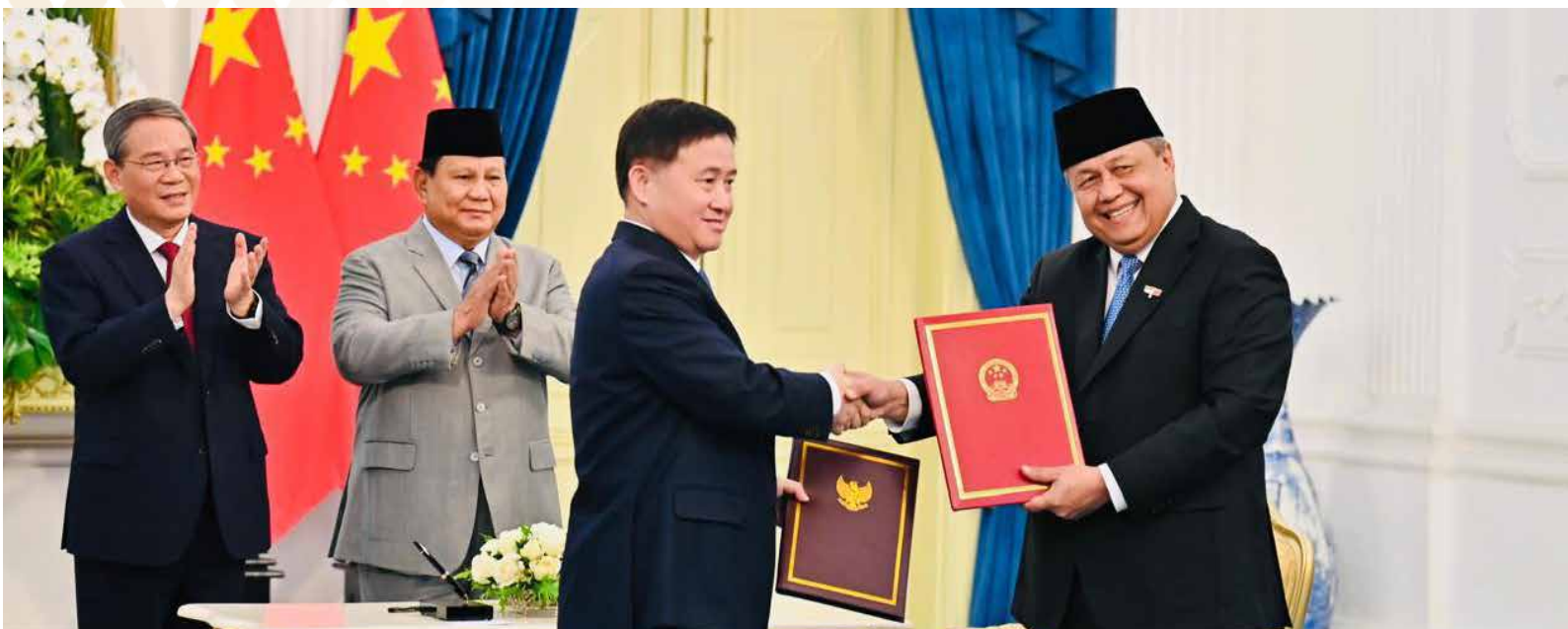
Upaya menjaga persepsi positif tersebut diperkuat melalui strategi komunikasi dan *engagement* intensif dengan investor global, lembaga pemeringkat, serta sinergi dengan Pemerintah. Dalam meningkatkan *engagement* dengan investor dan lembaga pemeringkat, Bank Indonesia memanfaatkan AI dan *machine learning* dalam mengidentifikasi *concern* utama investor secara optimal. Hal tersebut kemudian dielaborasi melalui *Investor Conference Call* (ICC) serta pertemuan investor dalam berbagai format, baik secara grup maupun bilateral, di dalam dan luar negeri. Kegiatan ini dilakukan secara terarah guna merespons isu-isu yang menjadi perhatian investor global, sekaligus memperkuat transparansi dan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga senantiasa menyelenggarakan *Dedicated Team Meeting Investor Relations Unit* (IRU) nasional yang menjadi forum koordinasi untuk merespons berbagai *concern* lembaga pemeringkat, termasuk isu kebijakan, prospek makroekonomi, serta dinamika sektoral yang menjadi perhatian

utama para lembaga pemeringkat. Lebih lanjut, pengelolaan persepsi positif kepada investor dan lembaga pemeringkat juga didukung oleh Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPwLN) yang berperan aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan *engagement* dengan investor di wilayah masing-masing secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sepanjang 2025 tercatat sejumlah laporan dari lembaga internasional dan pemeringkat global yang mencerminkan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan yang kredibel, komunikasi yang efektif, serta sinergi erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah mampu menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya tarik Indonesia di mata global, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia tecermin dari berbagai afirmasi peringkat kredit oleh lembaga pemeringkat global. Sepanjang tahun 2025, sejumlah lembaga seperti Fitch, S&P, Moody's, JCR, dan R&I mempertahankan peringkat Indonesia pada level *investment grade* dengan *outlook* stabil. Afirmasi ini menunjukkan keyakinan terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia yang didukung oleh stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, cadangan devisa yang memadai, serta kebijakan fiskal dan moneter yang *prudent* dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, berbagai laporan lembaga internasional, termasuk publikasi AMRO dan IMF, turut menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu titik terang (*bright spot*) di tengah ketidakpastian global, dengan prospek pertumbuhan yang solid dan stabil.

30) Terjalinnnya sinergi kebijakan dan kerja sama internasional untuk mendukung kebijakan utama secara optimal

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama *Local Currency Transaction* (LCT) dengan bank sentral dan otoritas negara mitra sebagai bagian dari strategi diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral guna meningkatkan ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam implementasinya, Bank Indonesia menerapkan dua pendekatan utama, yaitu *refocusing* melalui intensifikasi kerja sama dengan negara mitra *existing* dan ekspansi ke mitra baru (ekstensifikasi) serta *restrategizing* melalui sosialisasi 3T (*Targeted, Terintegrasi, Terencana*) yang dikoordinasikan melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT. Strategi



Penandatanganan MoU tentang Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Bilateral antara Bank Indonesia dan People's Bank of China di Jakarta.

ini terbukti efektif dalam meningkatkan nilai transaksi dan partisipasi pelaku LCT secara signifikan. Pada 2025, capaian implementasi LCT menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan nilai akhir yang mencapai ekuivalen USD 25,74 miliar. Secara tahunan, nilai transaksi LCT tersebut tumbuh 58% (yoy), dengan rerata pengguna bulanan mencapai 9.720 pelaku usaha atau meningkat 94% dibandingkan tahun sebelumnya. Penguatan ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, yang berkontribusi pada efisiensi transaksi serta mitigasi risiko volatilitas nilai tukar.

Bank Indonesia mewujudkan penguatan kerja sama melalui berbagai kesepakatan strategis dengan mitra internasional. Bank Indonesia mempercepat implementasi kerja sama LCT dengan Uni Emirat Arab melalui *Joint Working Group* (JWG), serta memperluas cakupan transaksi dengan Malaysia dan Thailand melalui harmonisasi *Local Currency Transaction Framework Operational Guidelines* (LCTF OG), termasuk perluasan ke transaksi investasi portofolio. Selain itu, kerja sama dengan Tiongkok dan Jepang semakin diperkuat, antara lain melalui perluasan penggunaan LCT, implementasi kampanye bersama, serta integrasi dengan konektivitas sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS antarnegara. Pada 2025, Bank Indonesia dan Banque de France (BdF) sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang kebanksentralan yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Ruang lingkup kerja sama meliputi inovasi

digital pada sistem pembayaran, keuangan berkelanjutan dan risiko keuangan terkait iklim, serta kerangka regulasi dan pengawasan dalam konteks Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme/Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT-PPPSPM). Kerja sama akan diimplementasikan di antaranya dalam bentuk dialog kebijakan, pertukaran pengalaman dan pengetahuan termasuk studi/penelitian bersama, pengembangan kapasitas, dan pertukaran data atau informasi.

Di sisi domestik, Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga melalui Satgas Nasional LCT guna memastikan keselarasan strategi dan program kerja dalam mendorong penggunaan mata uang lokal. Upaya sosialisasi juga dilakukan secara luas melalui berbagai forum internasional, termasuk *World Expo 2025* di Osaka, guna meningkatkan *awareness* pelaku usaha terhadap manfaat LCT dalam mendukung perdagangan, investasi, dan pembiayaan berkelanjutan.

Pada akhir 2025, kerja sama LCT Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan Jepang semakin diperluas sehingga mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Implementasi kerja sama bilateral dengan berbagai bank sentral mitra terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan yang mencakup pengembangan kapasitas, penguatan *institutional leadership*, serta akselerasi implementasi *cross-border payments*. Secara keseluruhan, berbagai langkah strategis tersebut menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam

memperkuat integrasi keuangan internasional, meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Dari sisi ketentuan, untuk mendukung harmonisasi LCTF OG, Bank Indonesia telah menerbitkan PADG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PADG No. 23/12/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia menggunakan Rupiah dan Ringgit Melalui Bank dan PADG Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PADG No. 22/34/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand menggunakan Rupiah dan Baht Melalui Bank yang telah berlaku sejak 27 Maret 2025:

31) Terjaganya kepentingan Bank Indonesia/Republik Indonesia melalui penyampaian posisi Bank Indonesia/Republik Indonesia di forum/kerja sama internasional

Sepanjang 2025, Bank Indonesia secara konsisten memperjuangkan kepentingan nasional melalui diplomasi dan negosiasi di berbagai forum internasional, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Upaya ini menghasilkan penerimaan yang luas terhadap posisi (*stances*) Indonesia di berbagai forum strategis, mencakup isu stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sistem pembayaran dan digitalisasi, pengembangan pasar keuangan, *sustainable finance*, inklusi ekonomi dan keuangan, hingga ekonomi syariah dan kelembagaan. Hingga akhir 2025, sebanyak 45 posisi

Indonesia telah diterima di forum internasional, baik dalam forum regional maupun multilateral. Hal ini mencerminkan penguatan kredibilitas dan pengaruh Indonesia dalam percaturan global.

Di tingkat regional, Bank Indonesia memainkan peran aktif dalam berbagai forum seperti ASEAN, ASEAN+3, EMEAP, dan SEACEN. Dalam forum ASEAN, Bank Indonesia mendorong penguatan konektivitas sistem pembayaran lintas batas, integrasi pasar keuangan, serta penguatan jaring pengaman keuangan kawasan. Selain itu, melalui ASEAN+3, Bank Indonesia turut menginisiasi pengembangan *Regional Payment Connectivity (RPC) Beyond ASEAN* serta pembahasan terkait operasionalisasi *Rapid Financing Facility (RFF)* melalui amandemen CMIM Agreement (AG) dan *Operational Guidelines (OG)*, juga berkontribusi dalam pembahasan penguatan kerangka *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*, termasuk aspek pendanaan dan tata kelola. Peran strategis Bank Indonesia juga tercermin dalam kepemimpinan di forum SEACEN, termasuk sebagai *chair* dalam SEACEN *Board of Governors Meeting*, yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pembelajaran (*regional learning hub*) kebanksentralan yang relevan, *agile*, dan *impactful*. Melalui forum tersebut, Bank Indonesia juga menegaskan kembali komitmen bersama untuk mencetak *central banking* yang *future-ready* melalui penguatan aspek *capacity building*, *policy dialog*, serta *research collaboration* di tingkat kawasan.

Lebih lanjut, di forum EMEAP, Bank Indonesia aktif berkontribusi dalam penguatan tata kelola



Penyelenggaraan The 45th SEACEN Board of Governors' Meeting di Bali.



Presidensi G20 dengan tema *Solidarity, Equality, and Sustainability* di Johannesburg, Afrika Selatan.

kelembagaan, penyusunan *Look Back Look Forward (LBLF) Paper* untuk memperingati 30 tahun *EMEAP Governors' Meeting*. Kontribusi Bank Indonesia juga termasuk mendorong penguatan kristalisasi hasil pertemuan dan *top-down guidance* agar substansi yang tertulis lebih strategis dan selaras dengan arahan *EMEAP High Level Meetings*, serta pembahasan isu strategis seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, risiko iklim, dan ketegangan geopolitik. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong penguatan integrasi kawasan melalui pemanfaatan LCT dan konektivitas pembayaran lintas batas sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan efisiensi sistem keuangan regional. Dalam rangka kesiapan kawasan menghadapi krisis, Bank Indonesia turut serta dalam *Crisis Communication Test (CCT)* tahunan yang diselenggarakan oleh EMEAP dan mengusulkan pengintegrasian skenario krisis.

Dalam kerja sama bilateral, Bank Indonesia memperkuat *Structured Bilateral Cooperation (SBC)* guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bank sentral. Cakupan SBC meliputi pertukaran informasi, penguatan kapasitas, serta pengembangan kebijakan bersama. Kerja sama ini mendukung peningkatan *institutional leadership* Bank Indonesia, termasuk melalui penyelenggaraan *capacity building*, *technical meeting*, dan *knowledge sharing* dengan berbagai mitra strategis global. Bank Indonesia telah menjalin kerja sama SBC dengan 14 bank sentral mitra yang meliputi Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Turki, Singapura, Korea Selatan, India, Swiss, Lao PDR, Tiongkok, Uni Emirat Arab,

Kamboja, dan Vietnam. SBC dengan State Bank of Vietnam (SBV) berlaku efektif sejak 7 Maret 2025 untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. SBC tersebut merupakan bagian penting dari hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Republik Sosialis Vietnam pada 10 Maret 2025, sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam. Melalui skema SBC, Bank Indonesia menginisiasi pertukaran informasi, penguatan kapasitas, serta kerja sama yang lebih sistematis dan bermanfaat. Hal itu tercermin dalam berbagai program, antara lain *joint workshop* dengan Bank of England (BoE), yaitu *4th ASEAN Regional Workshop on Payments Systems* yang mengangkat tema "*Navigating the Future of Payment Systems*" pada 27-28 Februari 2025 bersama Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Thailand (BoT), dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

Pada tingkat multilateral, Bank Indonesia berperan aktif dalam forum G20, IMF, World Bank, BIS, dan BRICS dengan menyampaikan pandangan strategis terkait kondisi ekonomi global dan respons kebijakan. Dalam forum G20, Bank Indonesia menekankan pentingnya bauran kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam menghadapi ketidakpastian global, termasuk pengelolaan aliran modal dan stabilitas nilai tukar. Sementara itu, dalam forum IMF, Bank Indonesia menyuarakan pentingnya sistem perdagangan global yang terbuka dan inklusif. Presidensi G20 Afrika Selatan memutuskan untuk menerbitkan *Chair's Summary G20 FMCBG*

(Februari 2025) yang menegaskan peran sentral G20 sebagai forum kerja sama ekonomi global dengan tema “*Solidarity, Equality and Sustainability*” serta dukungan terhadap stabilitas ekonomi global melalui kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel dan kerja sama multilateral yang erat. Selain itu, dalam *Chair’s Summary* juga disinggung mengenai reformasi dan peningkatan efektivitas lembaga multilateral seperti IMF dan *Multilateral Development Bank* (MDB) serta masukan strategis Bank Indonesia mengenai *16th General Review of Quotas* (GRQ) dan *insurance protection gap* yang telah diterima forum. Bank Indonesia juga menyampaikan pengkinian *Annual Report on Exchange Arrangement and Exchange Restrictions* (AREAER) dan *Macroprudential Policy Survey* (MPS) 2024 kepada IMF yang mencakup kebijakan moneter, aliran modal, ekspor-impor, perpajakan, serta *digital currency and crypto assets*. Penyusunan dilakukan melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di forum BIS, Bank Indonesia menyampaikan pandangan mengenai isu terkini perkembangan ekonomi dan kebanksentralan, termasuk kontribusi aktif dalam diskusi *BIS Central Bank Governance Group* (CBGG) terkait penentuan topik diskusi prioritas 2025.

Kontribusi aktif juga ditunjukkan dalam berbagai forum internasional terkait keuangan syariah. Bank Indonesia menyampaikan *stance* pada Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Liquidity Management (IILM), dan OIC-COMCEC *Central Banks Forum*. Dalam forum tersebut, Bank Indonesia mendorong harmonisasi standar global, penguatan pasar keuangan syariah, serta implementasi kerangka pengembangan yang mencakup aspek produk (*product*), harga (*price*), pelaku (*participant*), dan infrastruktur (*infrastructure*) atau disebut 3P+I. Secara keseluruhan, keterlibatan aktif dan kontribusi strategis Bank Indonesia di berbagai forum internasional sepanjang 2025 tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola ekonomi global, tetapi juga mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, peningkatan kerja sama internasional, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

PS 10 Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan dengan kepemimpinan profesional dan tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja unggul

Di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan kelembagaan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan UU. Dari sisi eksternal, ketidakpastian ekonomi global, percepatan transformasi digital, serta meningkatnya ekspektasi mitra kerja terhadap organisasi yang semakin responsif, kredibel, transparan, dan *agile* mendorong kebutuhan penyesuaian strategi, penguatan proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kapabilitas kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan. Sejalan dengan itu, pengembangan SDM yang profesional dan relevan dengan kebutuhan bank sentral di era digital menjadi faktor penting dalam mendukung penguatan organisasi yang unggul dan berdaya tahan.

Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat tata kelola kelembagaan, penyempurnaan proses bisnis dan penguatan Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK), percepatan transformasi digital, serta pengembangan kapabilitas SDM guna mendukung organisasi yang semakin profesional, adaptif, dan berdaya tahan. Berbagai penguatan tersebut diarahkan untuk menjaga efektivitas kinerja kelembagaan yang didukung penerapan prinsip tata kelola yang baik, memastikan pemenuhan penerbitan dan implementasi peraturan perundang-undangan Bank Indonesia sesuai amanat UU dan kebutuhan kelembagaan, serta memperkuat akuntabilitas dan kinerja keuangan lembaga. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus mendorong tersedianya SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia guna mendukung pelaksanaan mandat bank sentral yang semakin kompleks di era digital.

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan bauran kebijakan kelembagaan dengan kepemimpinan profesional dan tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja unggul sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

32) Terjaganya kinerja kelembagaan yang efektif dan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik

Pada tahun 2025, Bank Indonesia secara konsisten menjaga kinerja kelembagaan yang efektif dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Komitmen tersebut tecermin dari upaya penyempurnaan berkelanjutan dalam implementasi praktik tata kelola yang profesional dimana Bank Indonesia berhasil mempertahankan tingkat maturitas tata kelola pada level *Enhanced* yang merupakan level tertinggi dalam skala penilaian maturitas. Pencapaian ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola Bank Indonesia telah dilaksanakan secara konsisten,

didukung kebijakan dan prosedur yang memadai, serta terus diperbaiki secara berkelanjutan.

Pencapaian tersebut juga turut didukung oleh tindak lanjut atas hasil asesmen tahun sebelumnya dimana Bank Indonesia menyusun dan melaksanakan *action plan* penguatan tata kelola yang dimonitor secara berkala. Berbagai penyempurnaan dilakukan, antara lain pada aspek kebijakan dan prosedur, penguatan proses *check and balance*, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan integrasi tata kelola yang mencakup fungsi hukum, manajemen risiko, dan audit intern guna memastikan kecukupan ketentuan, keandalan manajemen risiko, serta kecukupan pengendalian internal, termasuk aspek kepatuhan terhadap regulasi dalam seluruh proses bisnis kelembagaan.

Penguatan kelembagaan turut difokuskan pada peningkatan peran fungsi audit intern, baik dari sisi kebijakan, struktur organisasi, maupun pelaksanaan tugas. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan internal terkait manajemen audit intern sebagai landasan penguatan fungsi asesmen, strategi, dan *advisory* pengendalian internal, serta pelaksanaan audit atas program strategis dan transformasi. Dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar internasional, telah dilakukan asesmen oleh asesor independen yang menunjukkan bahwa praktik audit intern Bank Indonesia telah memenuhi standar global dengan predikat "Secara Umum Sesuai (*Generally Conform*)" terhadap standar internasional Internal Audit Capability Model (IACM), serta telah memenuhi 94% *Key Process Area* (KPA) yang berada pada level *Managed*. Selain itu, nilai tersebut telah meningkat dari 66% pada level *Managed* pada periode penilaian sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kredibilitas manajemen audit intern di Bank Indonesia yang telah menerapkan praktik terbaik dan diakui secara global. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kredibilitas serta akuntabilitas fungsi audit intern secara kelembagaan.

Di sisi integritas kelembagaan, Bank Indonesia terus menunjukkan kinerja yang kuat, tercermin dari capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang berada di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan penguatan integritas dan pengendalian intern yang dilakukan secara berkelanjutan, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Bank Indonesia terus memperkuat maturitas Manajemen Risiko (MR) dan maturitas Manajemen

Keberlangsungan Tugas (MKT) dalam rangka mewujudkan pengendalian risiko yang andal melalui pelaksanaan manajemen risiko yang optimal, berorientasi ke depan, serta terintegrasi. Pada 2025, Bank Indonesia berhasil mempertahankan maturitas MR pada level *Managed* dengan nilai yang terus meningkat, yang mengindikasikan bahwa penerapan MR di seluruh Bank Indonesia telah dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan pada seluruh proses bisnis. Hal ini dicapai melalui penguatan kapabilitas MR, yang antara lain mencakup atribut budaya MR, kerangka MR, proses MR, serta ketahanan dan keberlanjutan. Sementara itu, untuk maturitas MKT, Bank Indonesia berhasil menjaga pencapaian maturitas pada level Terkuantifikasi Menuju Teroptimasi (*Quantified to Optimize Managed*) dengan nilai yang semakin baik, serta mempertahankan perolehan sertifikasi ISO 22301 *Business Continuity Management System* (BCMS). Hal ini dicapai melalui penyempurnaan ketentuan, pengembangan strategi pemulihan, pelaksanaan simulasi multi-skenario, serta penguatan protokol keberlangsungan tugas yang selaras dengan standar internasional. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menyelesaikan ketentuan mengenai Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang terintegrasi antara Kebijakan dan Kelembagaan sebagai dasar penguatan implementasi MKT ke depannya. Pencapaian maturitas MR dan MKT tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan pengendalian risiko kelembagaan di Bank Indonesia telah dilakukan secara konsisten dan terus diperkuat secara berkelanjutan sesuai *international best practices*. Secara keseluruhan, berbagai langkah strategis tersebut menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang adaptif, terintegrasi, dan berstandar internasional, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

33) Pemenuhan penerbitan dan pelaksanaan peraturan per-Undang-Undangan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dan kebutuhan Bank Indonesia

Bank Indonesia secara konsisten melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku serta menerbitkan berbagai regulasi baru guna memastikan kecukupan landasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Langkah ini dilakukan secara responsif terhadap dinamika kebijakan, kebutuhan penguatan kelembagaan, serta sebagai tindak lanjut atas amanat peraturan perundang-undangan, termasuk

Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Secara umum, proses pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu asesmen hukum secara komprehensif terhadap area kebijakan dan kelembagaan, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta koordinasi yang erat dengan mitra kerja terkait. Melalui pendekatan tersebut, seluruh regulasi yang diterbitkan diharapkan tidak hanya selaras dengan kaidah hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan tata kelola pembentukan peraturan yang baik, akuntabel, dan mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan 155 peraturan yang terdiri atas Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), serta PADG Intern. Peraturan yang diterbitkan antara lain mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor sektor sumber daya alam, sekaligus memperkuat fungsi kelembagaan secara menyeluruh. Penerbitan regulasi ini mencerminkan kesinambungan upaya penguatan kerangka hukum yang adaptif dan selaras dengan perkembangan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun global. Upaya tersebut juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang kuat serta mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia secara optimal, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dinamika ekonomi dan kebutuhan penguatan kelembagaan.

34) Terjaganya akuntabilitas dan kinerja keuangan lembaga

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia terus memperkuat praktik pengelolaan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kelembagaan kepada publik, dengan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan tersebut diarahkan untuk menjaga kredibilitas Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif, efisien, dan patuh terhadap ketentuan, sekaligus memastikan terjaganya akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan institusi.

Sejalan dengan amanat UU P2SK, Bank Indonesia telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk dilakukan pemeriksaan. Proses audit berlangsung selama kurang lebih 90 hari, mulai Februari hingga awal Mei 2025. Dalam proses tersebut, Bank Indonesia secara konsisten menjaga kualitas laporan keuangan dengan

menyajikan informasi yang relevan, akuntabel, dan transparan, serta menjalankan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik sehingga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKTBI Tahun 2024, yang merupakan capaian ke-22 secara berturut-turut sejak tahun 2003. Pencapaian ini mencerminkan konsistensi Bank Indonesia dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, transparan, dan akuntabel, serta menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan yang telah memenuhi standar tertinggi dalam praktik akuntansi sektor publik.

Dalam mendukung capaian tersebut, Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan berbagai penguatan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, antara lain melalui peningkatan monitoring dan pengendalian realisasi anggaran agar selaras dengan perencanaan, pengembangan sistem pengelolaan keuangan, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, peran dan fungsi *Internal Control Officer* (ICO) di setiap satuan kerja juga terus diperkuat guna memastikan efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank Indonesia juga menyempurnakan proses bisnis, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola keuangan, serta penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kualitas tata kelola keuangan, sekaligus memperkuat kesiapan dalam menghadapi proses audit berikutnya.

Memasuki paruh kedua tahun 2025, Bank Indonesia semakin memperkuat tata kelola keuangan melalui penyempurnaan proses bisnis, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola keuangan, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Berbagai upaya penguatan tersebut turut mendukung keberhasilan Bank Indonesia kembali memperoleh opini WTP atas LKTBI Tahun 2025 dari BPK-RI pada Mei 2026. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan Bank Indonesia mempertahankan opini WTP selama 23 tahun berturut-turut sejak tahun 2003, sekaligus mencerminkan komitmen yang konsisten dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Ke depan, penguatan tata kelola keuangan terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat kredibilitas kelembagaan, serta mempertahankan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral yang profesional dan berintegritas.

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA 2025

Laporan Keuangan Bank Indonesia merupakan bentuk akuntabilitas manajemen Bank Indonesia dalam mencapai tujuan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Bank Indonesia menyajikan informasi keuangan Bank Indonesia yang meliputi posisi keuangan, penerimaan, pengeluaran, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang diperlukan. Laporan Keuangan Bank Indonesia yang disusun untuk periode akuntansi 1 Januari sampai dengan 31 Desember disebut Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI).

LKTBI Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini WTP tersebut telah diperoleh Bank Indonesia selama 23 (dua puluh tiga) kali secara berturut-turut sejak tahun 2003. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa menjaga akuntabilitas dan compliance atas pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

23
TAHUNBerturut-turut LKTBI memperoleh opini
"Wajar Tanpa Pengecualian"

Tabel 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET		
1. Emas	198.350.642	106.555.642
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	4.141.642.508	4.083.294.590
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	145.199.200	133.595.029
4. Tagihan	45.404.313	59.885.836
5. Aset Non Kebijakan	67.007.313	37.237.920
TOTAL ASET	4.597.603.976	4.420.569.017
LIABILITAS		
1. Uang Dalam Peredaran	1.359.954.721	1.204.555.686
2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	2.108.611.497	2.078.577.453
3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	147.495.593	135.605.984
4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	263.268.933	495.403.252
5. Kewajiban Non Kebijakan	37.490.608	32.482.200
6. Selisih Revaluasi	235.895.070	105.851.406
7. Modal	3.726.349	3.726.349
8. Akumulasi Surplus (Defisit)	441.161.205	364.366.687
8.1 Cadangan Umum	336.958.147	286.056.567
8.2 Cadangan Tujuan	27.408.540	26.118.054
8.3 Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	76.794.518	52.192.066
TOTAL LIABILITAS	4.597.603.976	4.420.569.017

**Tabel 2. LAPORAN SURPLUS DEFISIT
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025
dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2024**

(Dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	1 Januari s.d. 31 Desember 2024
PENGHASILAN		
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	253.484.129	226.894.030
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	282.348	249.543
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	6.212	5.657
4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	52.192	67.057
5. Pendapatan Lainnya	261.917	1.450.020
JUMLAH PENGHASILAN	254.086.798	228.666.307
BEBAN		
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	84.050.374	84.076.208
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	4.458.290	2.976.921
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	562.012	1.143.890
4. Hubungan Keuangan dengan Pemerintah	45.981.036	55.013.711
5. Beban Umum dan Lainnya	20.302.468	18.104.460
JUMLAH BEBAN	155.354.180	161.315.190
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK	98.732.618	67.351.117
PAJAK	21.938.100	15.159.051
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK	76.794.518	52.192.066

Dibandingkan dengan LKTBI Tahun 2024, LKTBI Tahun 2025 menunjukkan Total Aset/Liabilitas sebesar Rp4.597,60 triliun (meningkat sebesar Rp177,03 triliun atau 4,00%), Surplus sebelum Pajak sebesar Rp98,73 triliun (meningkat sebesar Rp31,38 triliun atau 46,59%), Pajak sebesar Rp21,94 triliun (meningkat sebesar Rp6,78 triliun atau 44,72%), dan Surplus setelah Pajak sebesar Rp76,79 triliun (meningkat sebesar Rp24,60 triliun atau 47,14%).

Pada sisi Aset, peningkatan terutama berasal dari Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah berupa Surat Berharga dan tagihan Repo surat-surat berharga dalam rangka operasi moneter, serta berasal dari Emas dan Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing berupa Giro dan Surat Berharga dalam rangka pengelolaan cadangan devisa.

Dari sisi Liabilitas, peningkatan terutama berasal dari Surat Berharga yang diterbitkan dan Utang dalam Rupiah berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dalam rangka operasi moneter.

Selanjutnya, peningkatan penghasilan terutama bersumber dari pendapatan bunga sejalan dengan peningkatan kepemilikan Surat Berharga dalam Rupiah dan Valuta Asing, sedangkan peningkatan Beban terutama berasal dari Beban Bunga pelaksanaan Kebijakan Moneter berupa Beban Diskonto SRBI sebagai dampak dari operasi moneter.

35) Tersedianya SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia

Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia. Hal ini dilakukan melalui penerapan strategi terintegrasi yang mencakup perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan (4P). Pendekatan ini diarahkan untuk mendukung transformasi organisasi di era digital serta menciptakan SDM unggul dengan karakter *3-Smart*, yaitu: berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*) sebagai fondasi kepemimpinan masa depan.

Pada tahap awal, penguatan difokuskan pada perencanaan dan pemenuhan SDM yang adaptif terhadap perubahan proses bisnis akibat digitalisasi. Bank Indonesia menyusun kebijakan dan pedoman manajemen karier sebagai acuan dalam pengembangan suksesi kepemimpinan, sekaligus mengembangkan *Digital Business Process* (DBP) untuk memetakan *talent pool* dan kebutuhan suksesi berbasis asesmen kompetensi. Penajaman perencanaan SDM dilakukan melalui optimalisasi strategi pengelolaan SDM yang didukung oleh DBP untuk menghasilkan SDM yang unggul, baik dari sisi kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku, guna menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional dengan memiliki aspek *3-Smart*.

Transformasi pada area pemenuhan SDM melalui penyempurnaan strategi rekrutmen dan penguatan manajemen karier pegawai ini bertujuan agar pegawai memiliki kepemimpinan yang kuat dan dapat bekerja secara optimal di era digital. Terkait aspek pemeliharaan SDM, Bank Indonesia menyusun ketentuan internal tentang Manfaat Pensiun Pegawai Bank Indonesia, ketentuan internal tentang Peraturan Dana Pensiun (PDP) DAPENBI dan DAPENBI IP. Pengaturan ditujukan untuk kebijakan manfaat pensiun yang dapat menjamin kesinambungan penghasilan yang layak bagi pegawai Bank Indonesia setelah memasuki masa pensiun, dengan memperhatikan *Employee Value Proposition* (EVP) berdasarkan prinsip kesetaraan antarpegawai, dengan tetap menjaga kondisi keuangan Bank Indonesia serta sustainabilitas DAPENBI dan DAPENBI IP.

Pada aspek pengembangan, Bank Indonesia melaksanakan program peningkatan kompetensi pegawai secara sistematis dan terencana melalui berbagai insiatif program pembelajaran yang

komprehensif. Program pembelajaran yang dilakukan seperti *in-house training*, sekolah kepemimpinan, seminar nasional dan internasional, *workshop*, serta *joint course* dengan berbagai lembaga internasional dan bank sentral *partner*. Materi pembelajaran mencakup dinamika terkini dalam area kebijakan dan kelembagaan kebanksentralan maupun isu strategis pada topik ekonomi dan keuangan secara umum, antara lain konsepsi dan respons bauran kebijakan bank sentral yang meliputi pemahaman terkait kebijakan moneter dan pasar keuangan, makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran digital dan pengelolaan uang rupiah, serta penguatan kepemimpinan strategis. Selain itu, pengembangan kapasitas juga diperkuat melalui partisipasi dalam forum akademik di tingkat regional dan global, riset kebijakan, serta pengelolaan jurnal internasional yang senantiasa mengacu pada standard terbaik sebagai bagian dari upaya memperkuat kapabilitas intelektual pegawai.

Penguatan juga dilakukan melalui transformasi digital dalam pengelolaan SDM. Transformasi digital dimaksud antara lain pengembangan dan penyempurnaan HR *SuperApps* sebagai *platform* integratif yang mendukung perencanaan karier, peningkatan kinerja, pengembangan kompetensi, serta pemantauan kesehatan pegawai. Pengembangan lanjutan aplikasi ini mencakup integrasi dengan *Learning Management System* (LMS), pengayaan database profil pegawai, serta pemanfaatan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara *end-to-end*. Penguatan juga dilakukan melalui transformasi digital dalam pengelolaan SDM, antara lain melalui pengembangan dan penyempurnaan HR *SuperApps* sebagai *platform* integratif yang mendukung perencanaan karier, peningkatan kinerja, pengembangan kompetensi, serta pemantauan kesehatan pegawai. Pengembangan lanjutan aplikasi ini mencakup integrasi dengan *Learning Management System* (LMS), pengayaan database profil pegawai, serta pemanfaatan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara *end-to-end*. Pada aspek pemeliharaan SDM, Bank Indonesia memperkuat EVP melalui penyediaan remunerasi yang kompetitif, program kesehatan yang komprehensif, serta penguatan kebijakan pensiun melalui penyusunan regulasi terkait Dana Pensiun Bank Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin kesejahteraan pegawai secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pegawai dan keberlanjutan keuangan institusi.

PS 11 Merumuskan dan implementasi kebijakan komunikasi dan pengaturan hukum untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia

Dalam upaya mewujudkan layanan informasi publik yang informatif serta membangun persepsi publik yang positif, Bank Indonesia menghadapi lingkungan strategis yang semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi digital dan AI yang masif telah mempercepat arus dan pola penyebaran informasi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko bias informasi dan disinformasi. Kondisi ini berlangsung di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik yang semakin kuat, sehingga setiap komunikasi Bank Indonesia berada dalam sorotan tinggi dan rentan menimbulkan beragam interpretasi yang berpotensi berkembang menjadi risiko hukum maupun tekanan politik publik terhadap kredibilitas institusi. Dalam konteks tersebut, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Hal ini menuntut komunikasi kebijakan yang akurat secara data, serta disampaikan dalam narasi yang sederhana, relevan, dan mudah dipahami, tanpa mengurangi substansi.

Dari sisi internal, amanat UU P2SK mendorong penguatan peran dan tata kelola, sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Dalam kaitan ini, aspek hukum menjadi landasan penting untuk menjaga keselarasan komunikasi dengan ketentuan yang berlaku, mengelola potensi risiko hukum, serta memastikan konsistensi dalam interaksi lintas otoritas. Dengan demikian, keterpaduan antara komunikasi kelembagaan dan landasan hukum yang kuat menjadi faktor kunci dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan komunikasi dan pengaturan hukum untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

36) Komunikasi untuk mendukung efektivitas kebijakan serta pemenuhan transparansi

Pada tahun 2025, Bank Indonesia terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kelembagaan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sinergi dengan kementerian/ lembaga terkait serta Komisi Informasi Pusat guna meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam mendukung implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Bank Indonesia secara konsisten meningkatkan kapabilitas pengelolaan layanan informasi publik melalui berbagai inisiatif, antara lain forum edukasi, *workshop* pemutakhiran informasi, serta penguatan kapasitas pengelola informasi di seluruh satuan kerja. Selain itu, Bank Indonesia secara berkala melakukan pemutakhiran dan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP) melalui kanal resmi agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Bank Indonesia juga memperkuat ketentuan internal terkait keterbukaan informasi publik guna memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan serta mendukung tata kelola layanan informasi yang semakin akuntabel dan berkepastian hukum.

Di sisi implementasi layanan, Bank Indonesia terus memperkuat pelayanan informasi publik yang inklusif dan responsif melalui kanal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sepanjang tahun 2025, kualitas layanan informasi publik tetap terjaga dengan tingkat kepuasan pemohon informasi mencapai 95,82%, sementara rata-rata penyelesaian permohonan informasi dilakukan dalam waktu kurang dari satu hari kerja. Penguatan layanan tersebut juga didukung oleh penyusunan strategi optimalisasi keterbukaan informasi publik, pemenuhan indikator monitoring dan evaluasi (monev), serta penyampaian kinerja keterbukaan informasi melalui uji publik kepada Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan.

Selain itu, Bank Indonesia turut menerbitkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 yang memuat evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik serta arah kebijakan penguatan transparansi dan akses informasi pada tahun 2025. Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil dengan kembali diraihnya predikat Badan Publik Informatif pada tahun 2025, sekaligus menempatkan Bank Indonesia pada peringkat ke-6 kategori Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Capaian ini mencerminkan konsistensi Bank Indonesia dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kelembagaan Bank Indonesia.

37) Komunikasi untuk menjaga persepsi publik yang positif terhadap Bank Indonesia

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat komunikasi kebijakan sebagai instrumen strategis dalam membangun dan menjaga kepercayaan

publik, mengelola ekspektasi serta meningkatkan pemahaman mitra kerja dan masyarakat luas. Komunikasi dilakukan sejalan dengan *stance* bauran kebijakan Bank Indonesia *pro-stability and growth*. Pendekatan ini menjadi fondasi dalam membentuk persepsi publik yang positif terhadap kebijakan Bank Indonesia sekaligus memperkuat kredibilitas institusi dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fokus komunikasi diselaraskan secara konsisten dengan hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan, sebagai wujud transparansi dan kredibilitas arah kebijakan Bank Indonesia di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Pada paruh pertama tahun, komunikasi ditekankan pada langkah penurunan BI-Rate secara bertahap sebagai kebijakan yang *pre-emptive* dan *forward looking* untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. Memasuki paruh kedua tahun, komunikasi menegaskan bahwa penurunan BI-Rate hingga 4,75% sebagai upaya penguatan dukungan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Konsistensi komunikasi tersebut berperan penting dalam menjaga keyakinan pelaku ekonomi serta memperkuat persepsi positif terhadap kredibilitas kebijakan Bank Indonesia.

Dalam konteks pengendalian inflasi, Bank Indonesia secara aktif mengomunikasikan sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPID dan TPID, termasuk implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Komunikasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keyakinan publik terhadap efektivitas pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Di sisi lain, komunikasi kebijakan *pro-growth* difokuskan pada penguatan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, ekspansi likuiditas, serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dan inklusi keuangan.

Strategi komunikasi kebijakan dilakukan secara komprehensif melalui berbagai kanal yang disesuaikan dengan karakteristik audiens. Kanal komunikasi tersebut meliputi: (i) kanal *above the line* (ATL) seperti website, siaran pers dan materi komunikasi lainnya, konferensi pers, taklimat media, media sosial; (ii) kanal *below the line* (BTL) melalui forum diskusi dengan mitra komunikasi dan pemangku

kepentingan, edukasi kepada komunitas, diseminasi pesan elektronik, respons atas pertanyaan publik melalui *contact center* BICARA131; serta (iii) kanal *through the line* (TTL) melalui kegiatan edukasi publik dan komunikasi interaktif, termasuk melalui Museum Bank Indonesia. Pendekatan kanal komunikasi yang terintegrasi (omni) tersebut dapat memperluas jangkauan komunikasi, menjaga konsistensi pesan, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, serta memperkuat persepsi publik yang positif terhadap kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat literasi dan edukasi kebanksentralan melalui kemitraan strategis di bidang pembelajaran dan riset, antara lain melalui implementasi mata kuliah kebanksentralan di perguruan tinggi, *training of trainers* bagi akademisi, kuliah umum, seminar kebijakan publik, serta kolaborasi riset dengan akademisi dan lembaga terkait.

Secara keseluruhan, komunikasi kebijakan yang terarah, konsisten, dan adaptif sepanjang tahun 2025 mampu menjaga ekspektasi publik tetap terkelola dengan baik, memperkuat kredibilitas Bank Indonesia. Upaya tersebut juga mendukung persepsi publik yang positif terhadap kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang semakin kompleks. Selain itu, komunikasi yang efektif turut mendorong terbentuknya pemahaman masyarakat yang lebih komprehensif mengenai peran strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PS 12 Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi dengan pengadaan dan pengelolaan program untuk mendukung pencapaian kinerja kelembagaan optimal

Pesatnya disrupsi teknologi digital, termasuk meningkatnya pemanfaatan layanan digital Bank Indonesia serta eksposur terhadap risiko siber, menuntut percepatan adopsi teknologi secara terarah dan terintegrasi. Dinamika tersebut diiringi oleh perkembangan regulasi lintas sektor dan meningkatnya kompleksitas pelaksanaan program, termasuk pada lokasi dengan keterbatasan akses, sehingga memerlukan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan yang semakin andal. Kondisi ini menuntut kesiapan kelembagaan yang adaptif, resilien, serta tetap berlandaskan tata kelola yang baik dan profesional.

Dalam merespons tantangan tersebut, Bank Indonesia mempercepat pemanfaatan berbagai teknologi terkini untuk memperkuat kapabilitas, baik pada area kebijakan maupun kelembagaan. Upaya ini didukung melalui penguatan pengelolaan sumber daya, khususnya pada aset teknologi digital dan aset fisik, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik. Penguatan tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan inovasi digital dan data yang saling terhubung, penyediaan sarana dan prasarana berbasis *modern office* dan *modern living*, serta pengelolaan program secara menyeluruh. Dengan demikian, Bank Indonesia mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus memperkuat ketahanan operasional dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis.

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi dengan pengadaan dan pengelolaan program untuk mendukung pencapaian kinerja kelembagaan optimal sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

38) Tercapainya *Service Excellent* melalui Manajemen Aset Fisik yang Terintegrasi, Modern, dan Digital

Bank Indonesia memastikan ketersediaan berbagai inovasi dan teknologi serta layanan digital yang *agile*, *resilient*, dan *intelligent* untuk mendukung transformasi pada area kebijakan dan kelembagaan. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan layanan kelogistikan yang andal dan berkualitas bagi berbagai aplikasi kritical, seperti BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, BI-ETP, dan BI-FAST, yang secara konsisten dijaga agar dapat beroperasi secara kontinu selama 24/7. Penyediaan layanan kelogistikan telah dilakukan secara optimal yang tecermin pada kualitas layanan yang memenuhi standar Bank Indonesia. Bank Indonesia senantiasa menjaga ketersediaan sarana sumber daya energi melalui pemeliharaan infrastruktur berupa kelistrikan dan sistem pendinginan.

Dalam rangka menjamin kelancaran operasional tersebut, Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan pemeliharaan infrastruktur pendukung, termasuk sistem kelistrikan, pendinginan, serta fasilitas gedung. Ketersediaan sumber daya energi dijaga secara optimal guna memastikan stabilitas operasional sistem, yang tercermin dari kualitas layanan yang memenuhi standar Bank Indonesia sepanjang tahun. Selain itu, penguatan koordinasi dengan PLN dan Pelaksana Operasional Pemeliharaan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga

keandalan layanan kelogistikan. Hal ini mencakup memastikan ketersediaan pasokan listrik secara berkelanjutan, kualitas tegangan dan frekuensi yang optimal, serta dukungan instalasi peralatan kelistrikan pada aplikasi kritical. Ketersediaan energi cadangan, termasuk bahan bakar untuk *backup system*, juga dijaga untuk memastikan keberlangsungan operasional tanpa gangguan.

Bank Indonesia juga memperkuat kemitraan strategis dengan PLN, Pertamina, dan mitra kerja lainnya guna memastikan kualitas layanan energi tetap terjaga pada level optimal. Kolaborasi ini mendukung kesiapan sistem kelistrikan dan peralatan *backup* dalam kondisi prima, sehingga seluruh aplikasi kritical dapat beroperasi secara andal dan berkesinambungan. Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga keandalan infrastruktur teknologi dan layanan digital, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia secara optimal.

39) Terwujudnya aset teknologi digital yang berkualitas melalui penerapan manajemen aset yang terstandar dan tingkat layanan yang optimal

Bank Indonesia senantiasa berupaya dalam menjaga tingkat keandalan (*reliability*), ketersediaan (*availability*), dan keamanan sistem informasi melalui asesmen *Information Technology Service Management (ITSM)* dan *Cyber Security Maturity (CSM)*. Dalam rangka mencapai hal tersebut, pada awal tahun 2025, penguatan difokuskan pada pengembangan digitalisasi proses pengambilan keputusan (*Decision-Making Process/DMP*), khususnya pada perumusan kebijakan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan dan Mingguan, yang didukung oleh peningkatan pemanfaatan data guna memperkuat kualitas kebijakan. Selain itu, pengembangan sistem juga dilakukan pada berbagai area strategis, termasuk layanan kas tunai, pengelolaan produk Operasi Moneter *pro-market*, serta sistem pendukung lainnya.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia secara konsisten menjaga keberlanjutan layanan digital melalui peningkatan maturitas ITSM dan CSM. Upaya ini dilakukan melalui monitoring intensif terhadap kinerja sistem, peningkatan kapasitas layanan, serta pemenuhan target *Service Level Agreement (SLA)*. Penguatan keamanan siber juga dilaksanakan secara komprehensif melalui proses *review*, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem keamanan guna mengantisipasi potensi risiko dan gangguan layanan.

Padapertengahan tahun 2025, penguatan difokuskan pada implementasi sistem yang lebih terintegrasi, termasuk perluasan digitalisasi proses bisnis dan pengelolaan aset, serta peningkatan pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui pengelolaan aset teknologi digital yang berkesinambungan dan antisipatif terhadap peningkatan kebutuhan layanan dalam rangka menjaga ketersediaan layanan digital dan tingkat kepuasan pengguna terhadap aset teknologi digital di Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia melanjutkan penguatan *cyber security* secara menyeluruh melalui proses *review*, evaluasi, serta perbaikan terhadap sistem keamanan siber, dan pelaksanaan pengembangan inovasi layanan digital. Bank Indonesia juga senantiasa mengupayakan pemenuhan target SLA melalui pemantauan performa secara proaktif, antisipasi potensi gangguan sejak dini, dan memastikan rencana pemulihan aplikasi berjalan optimal.

Berdasarkan asesmen ITSM dan CSM yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2025, maturitas ITSM dan CSM Bank Indonesia menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan digital yang semakin matang. Hal ini didukung oleh pengelolaan aset teknologi digital yang berkesinambungan, pemantauan performa secara proaktif, serta kesiapan rencana pemulihan sistem (*disaster recovery*) yang optimal. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas penerapan standar *best practice* internasional, termasuk standar ISO, untuk sistem strategis dan kritikal guna memastikan kualitas layanan digital yang andal dan aman. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia berhasil mempertahankan berbagai sertifikasi standar internasional, seperti ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, ISO 20000 IT Service Management, ISO 9000 Quality Management Standard - Requirements, ISO 9001 Quality Management Systems - Fundamentals and Vocabulary, ISO 22301:2019 Business Continuity Management System serta Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (TIA 942).

- 40) Terwujudnya pengadaan yang berkualitas untuk mendukung pengelolaan aset dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat tata kelola pengadaan melalui pengukuran *Procurement Maturity Assessment (PMA)* yang dilaksanakan oleh pihak eksternal menggunakan model *Procurement Excellence Plus*. Model ini menilai kematangan

fungsi pengadaan secara holistik yang mencakup dimensi strategi, operasional, organisasi, dan teknologi. Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah melaksanakan penilaian PMA yang menunjukkan peningkatan kinerja pengadaan, khususnya pada aspek sistem informasi. Hasil asesmen menunjukkan adanya peningkatan satu *key driver* menuju level *strategic*, sehingga secara keseluruhan 13 dari 15 *key drivers* pengadaan telah berada pada level *strategic*, sementara dua *key drivers* lainnya tetap terjaga pada level *proactive*. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi penguatan yang dilakukan sepanjang tahun, terutama dalam mendukung digitalisasi pengadaan dan peningkatan tata kelola yang lebih baik.

Pada awal tahun 2025, Bank Indonesia menyusun strategi dan rencana kerja PMA sebagai bagian dari asesmen tahunan untuk meningkatkan maturitas pengadaan. Penguatan difokuskan pada pengembangan sistem informasi pengadaan melalui pendekatan digitalisasi yang selaras dengan transformasi kelembagaan dan arah strategis Bank Indonesia. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi PMA tahun sebelumnya dilakukan secara berkelanjutan, terutama melalui penguatan *supplier relationship management* dan implementasi *modern strategic sourcing* guna mendorong pencapaian sasaran maturitas secara menyeluruh. Lebih lanjut pada pertengahan tahun 2025, fokus penguatan diarahkan pada implementasi berbagai inisiatif tersebut, termasuk penguatan sistem informasi pengadaan serta peningkatan koordinasi antar satuan kerja dalam penyelesaian pengadaan strategis. Bank Indonesia juga menerapkan strategi 3S+I (*simplifikasi, standarisasi, sistemisasi, dan integrasi*) untuk memastikan proses pengadaan berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, Bank Indonesia juga senantiasa melakukan monitoring secara berkala melalui laporan pengadaan guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong peningkatan maturitas pengadaan melalui penguatan digitalisasi, peningkatan koordinasi internal, serta penyempurnaan strategi pengadaan berbasis 3S+I. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan seluruh *key drivers* ke level *strategic* pada tahun berikutnya, sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

LAMPIRAN





BANK INDONESIA

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, interkoneksi, interoperabilitas yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
3-Smart	Program kepemimpinan Bank Indonesia untuk menciptakan pemimpin yang profesional yang memiliki kompetensi (<i>book smart</i>), berpengalaman (<i>street smart</i>), dan memiliki perilaku mulia (<i>spiritual smart</i>).
Agile	Kemampuan untuk bergerak cepat dan mudah
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya.
Bauran Kebijakan Kelembagaan	Penggunaan beberapa kebijakan pada area kelembagaan dengan basis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan/ <i>compliance</i> . Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam memastikan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik.
<i>Electronic Trading Platform</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Bank Indonesia - <i>Real-Time Gross Settlement</i>	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
<i>Best Practices</i>	Metode, teknik, atau prosedur yang telah terbukti secara konsisten memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan cara lainnya.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
BI-Payment Clear dan BI-Payment Info	Infrastruktur untuk mendeteksi anomali transaksi dan potensi fraud di sektor keuangan.
<i>Blueprint</i>	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
<i>Business matching</i>	Temu bisnis antarpelaku ekonomi.

ISTILAH	PENJELASAN
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
<i>Central Bank Digital Currency</i>	Mata uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.
<i>Central Clearing</i>	Mekanisme penyelesaian transaksi keuangan yang dikelola oleh CCP untuk mengurangi risiko gagal bayar, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi pasar.
<i>Central Counterparty</i>	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral <i>netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar.
<i>Contagion Analysis</i>	Analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana krisis keuangan, kejutan pasar, atau risiko tertentu menyebar dari satu entitas atau sektor ke sektor lainnya dalam sistem ekonomi atau keuangan.
<i>Countercyclical Capital Buffer</i>	Tambahkan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
<i>Counterparty Line</i>	Jumlah kredit atau limit eksposur yang diberikan oleh satu pihak kepada <i>counterparty</i> dalam transaksi keuangan.
<i>Cross Border</i>	Lintas batas, lintas negara.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
<i>Data-driven Institution</i>	Organisasi atau lembaga yang mendasarkan pengambilan keputusan dan strateginya pada analisis data.
<i>Data Lake</i>	Tempat penyimpanan data mentah dalam jumlah besar yang fleksibel dan digunakan untuk analisis lanjutan seperti <i>Big Data</i> , AI, dan <i>machine learning</i> .
<i>Data Preparation</i>	Proses menyiapkan data mentah agar lebih bersih, terstruktur, dan siap digunakan dalam analisis atau <i>machine learning</i> , sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan efektif.
<i>Data Repository Loader</i>	Proses atau alat yang digunakan untuk memuat data ke repositori penyimpanan (seperti <i>Data Warehouse</i> atau <i>Data Lake</i>) dengan memastikan integritas, efisiensi, dan kesiapan data untuk analisis atau kebutuhan bisnis.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Data Visualization</i>	Penyajian data dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif.
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan.
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Digital BPR	Pendekatan komprehensif untuk mendesain ulang dan mengoptimalkan proses bisnis berbasis digital dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan beradaptasi, antara lain mencakup aspek pengambilan keputusan, manajemen informasi, <i>digital environment</i> , dan pola kerja.
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>	Kerangka pengawasan yang bersifat <i>forward looking</i> dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet.
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Ekonomi dan keuangan hijau	Sistem ekonomi dan keuangan yang mendukung upaya menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan dan atau iklim.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
<i>Employee Value Proposition</i>	Nilai tambah yang ditawarkan pegawai dan sebagai imbalan atas kontribusi terhadap perusahaan.
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
Festival Ekonomi Syariah (FESyar)	Kegiatan sejenis Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang berskala regional dan nasional serta merupakan kegiatan <i>road to ISEF</i> .
<i>Financial Market Infrastructure</i>	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Financing to Value</i>	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Forward looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter.
<i>Front-Loading</i>	Strategi melakukan tindakan atau penyesuaian besar di awal periode untuk mencapai dampak maksimal atau mengantisipasi risiko di masa depan.
<i>Government Shutdown</i>	Kondisi di mana pemerintah federal (pusat) berhenti beroperasi atau menghentikan layanan non-esensial karena kegagalan dalam pengesahan anggaran tahunan oleh badan legislatif.
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
<i>HLM</i>	<i>High Level Meeting</i>
Industri Halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar.
<i>Indirect Clearing</i>	Mekanisme kliring di mana peserta pasar yang tidak memiliki akses langsung ke Central Counterparty (CCP) menggunakan perantara (<i>clearing member</i>) untuk menyelesaikan transaksi mereka.
INDONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi.
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa mudah sebuah perusahaan dapat membayar bunga atas utang-utangnya yang masih ada.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antar sistem terjadi secara tidak langsung.

ISTILAH	PENJELASAN
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
<i>Investor Outreach</i>	Strategi atau upaya untuk menjangkau, berkomunikasi, dan menarik investor potensial agar tertarik berinvestasi dalam aset, proyek, atau instrumen keuangan tertentu.
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)	Acara tahunan Bank Indonesia yang berskala nasional dan internasional dan terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu <i>Sharia Economic Forum</i> dan <i>Sharia Fair</i> . Kegiatan forum terdiri dari seminar/ <i>workshop</i> , sedangkan <i>Sharia Fair</i> merupakan <i>outlet</i> bagi pelaku usaha industri halal, pesantren, Lembaga keuangan, dan lembaga terkait.
<i>Joint Audit</i>	Proses audit keuangan yang dilakukan oleh dua atau lebih firma audit secara bersamaan untuk menilai laporan keuangan suatu entitas.
Keuangan digital	Keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau <i>web</i> melalui pihak ketiga.
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.
<i>Lead the Market</i>	Memimpin dalam industri atau segmen tertentu dengan inovasi, keunggulan kompetitif, atau strategi yang lebih unggul dibandingkan pesaing.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
<i>Loan to Value</i>	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i>	Bentuk kerja sama keuangan bilateral yang lazim dilakukan oleh bank sentral, yang memungkinkan suatu bank sentral untuk mendapatkan valuta asing dari bank sentral mitra dengan cara saling mempertukarkan mata uang lokal masing-masing negara, untuk kemudian dipertukarkan Kembali pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.
<i>Local Currency Transaction</i>	Transaksi bilateral antar dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk mendiversifikasi <i>currency exposure</i> .
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
<i>Market Maker</i>	Pihak yang secara aktif menyediakan likuiditas dengan menawarkan harga beli (<i>bid</i>) dan harga jual (<i>ask</i>) dalam transaksi pasar uang.
<i>Merchant Discount Rate</i>	Tarif yang dikenakan kepada <i>merchant</i> oleh bank.
Mikroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan Lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Modern Strategic Sourcing</i>	Pendekatan strategis dalam pemilihan dan manajemen pemasok yang mengutamakan efisiensi, inovasi, keberlanjutan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai bisnis serta mengoptimalkan rantai pasok.
<i>Money Market Curve</i>	Kurva yang menggambarkan hubungan antara tenor (jangka waktu) dan suku bunga instrumen pasar uang.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
<i>Net inflows</i>	Selisih antara total kontribusi atau pembelian baru (<i>inflows</i>) dan total penarikan atau penjualan (<i>outflows</i>) dari suatu investasi atau entitas.
<i>Non Performing Loan</i>	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
<i>Outstanding</i>	Jumlah yang masih berjalan, beredar, atau belum lunas dalam suatu instrumen keuangan.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Penanaman Modal Asing	Kegiatan memasukkan modal atau investasi baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kegiatan usaha atau mengelola operasi perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
<i>Price Discovery</i>	Proses pembentukan harga yang mencerminkan nilai wajar suatu aset berdasarkan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar.
<i>Primary Dealer</i>	Institusi yang disetujui oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan obligasi pemerintah secara langsung dari pemerintah.
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Programmability</i>	Kemampuan sistem keuangan untuk membuat kontrak dan instruksi keuangan yang dapat dijalankan secara otomatis sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS)	Standar <i>QR Code</i> pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
<i>QRIS Cross Border/Lintas Negara</i>	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standardisasi infrastruktur setelmen untuk perdagangan lintas batas.
QRIS TAP NFC	Sistem pembayaran berbasis teknologi <i>Near Field Communication</i> (NFC) yang memungkinkan pengguna cukup mendekatkan ponsel ke terminal pembayaran tanpa perlu memindai <i>QR code</i> secara manual.
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif.
<i>Regional Payment Connectivity</i> (RPC)	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand.
<i>Regulatory Reform</i>	Proses perubahan, penyempurnaan, atau penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan dalam suatu sektor atau industri.
<i>Repurchase Agreement (Repo)</i>	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
<i>Sandbox</i>	Uji coba terbatas dalam lingkungan yang terkontrol sebelum sistem atau fitur baru diterapkan secara luas.
<i>Seamless</i>	Sistem atau proses yang berjalan lancar, otomatis, dan tanpa hambatan.
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.

ISTILAH	PENJELASAN
Sovereign Credit Rating	Peringkat utang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. <i>Sovereign Credit Rating</i> mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
Spot	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.
Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran (SNAP)	Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
<i>Straight-through</i>	Pemrosesan otomatis yang dilakukan dalam transaksi bisnis
<i>Streamlining</i>	Peningkatan efisiensi suatu proses tertentu dalam suatu organisasi
<i>Stress test</i>	Uji ketahanan.
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah.
<i>Supplier Relationship Management</i>	Strategi dan proses yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pemasok secara efektif, dengan tujuan meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi risiko, dan menciptakan nilai tambah dalam bisnis.
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Surat Utang Negara	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
<i>Swap</i>	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (<i>stakeholder</i>) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
<i>Tokenization</i>	Proses digitalisasi aset nyata menjadi token yang dapat diperdagangkan di <i>blockchain</i> .
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.

ISTILAH	PENJELASAN
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Underlying Asset	Aset yang menjadi dasar dari instrumen finansial atau investasi.
Volatile Food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Waste to Energy	Proses mengubah limbah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan, seperti listrik, panas, atau bahan bakar.
White Paper	Laporan atau panduan yang ditulis secara mendalam untuk menginformasikan secara ringkas tentang suatu permasalahan dan solusinya.
Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger	Sistem pencatatan digital berbasis ledger untuk transaksi Rupiah Digital dalam skala <i>wholesale</i> .
Yield	Imbal hasil.

DAFTAR SINGKATAN

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas
3S	Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
4P	Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, Pemeliharaan
AB3	Aku Bangga BI Bermakna
ACC-BIS	The Council dari Asian Consultative Council - Bank for International Settlement
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AL	Alat Likuid
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATL	<i>Above The Line</i>
ATM	<i>Automated Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri</i>
ATM/D	<i>Automated Teller Machine/Deposit.</i>
BTL	<i>Below The Line</i>
BBWI	Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja
BI-ETP	Bank Indonesia - <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-FAST	Bank Indonesia - <i>Fast Payment</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia - <i>Real Time Gross Settlement</i>

ISTILAH	PENJELASAN
BIS	Bank for International Settlements
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BNM	Bank Negara Malaysia
BoP	<i>Balance of Payments</i>
BoT	Bank of Thailand
BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
BPR	Business Process Re-engineering
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BSP	Bangko Sentral ng Pilipina
BSPI	<i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBDC	<i>Central Bank Digital Currency</i>
CBUAE	Bank Sentral Uni Emirat Arab
CBSEA	Central Banking Service Excellence Achievement
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CP	<i>Consultative Paper</i>
CPIS	<i>Coordinated Portfolio Investment Survey</i>
DMP	<i>Decision Making Process</i>
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>

ISTILAH	PENJELASAN
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EMEAP	Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks
ERB	Ekspedisi Rupiah Berdaulat
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
ETPD	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
EVP	<i>Employee Value Proposition</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Question</i>
FATF	<i>Financial Action Task Force</i>
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FEKDI x IFSE	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo
FFR	<i>Fed Funds Rate</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FOMARU	Forum Mata Uang Rupiah
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
G20	Group of Twenty
GIRU	<i>Global Investor Relation Unit</i>
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

ISTILAH	PENJELASAN
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKNB	Institusi Keuangan Non-Bank
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	International Monetary Fund
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
INDONIA	Indonesia Overnight Index Average
IRFCL	<i>International Reserves and Foreign Currency Liquidity</i>
IRU	<i>Investor Relation Unit</i>
IHT	<i>In House Training</i>
ISDA	<i>International Swaps and Derivatives Association</i>
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISO	International Organization of Standardization
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (inovasi teknologi sistem keuangan)
ITSM	<i>Information Technology Service Management</i>
JIBOR	<i>Jakarta Interbank Offered rate</i>
JKD	Jaringan Komunikasi Data
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
K/L	Kementerian/Lembaga
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KKI	Kartu Kredit Indonesia
KKI	Kerja Sama Keuangan Internasional
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

ISTILAH	PENJELASAN
KOPERBI	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LSB	Lembaga Selain Bank
LU	Lapangan Usaha
MAS	Monetary Authority of Singapore
ME FATF	<i>Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force</i>
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
ML	<i>Machine Learning</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MuBI	Museum Bank Indonesia
NCCD	<i>Non Centrally Cleared Derivative</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
NWGBR	<i>National Working Group on Benchmark Reform</i>
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan

ISTILAH	PENJELASAN
OM	Operasi Moneter
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PCPM	Pendidikan Calon Pegawai Muda
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
Pemda	Pemerintah Daerah
PFMI	<i>Principles for Financial Market Infrastructures</i>
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMA	<i>Procurement Maturity Assessment</i>
PMK	Program Meningkatkan Kompetensi
PMK	Protokol Manajemen Krisis
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PoC	<i>Proof of Concept</i>
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>

ISTILAH	PENJELASAN
QRIS TUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	<i>Regional Investor Relation Unit</i>
RPC	<i>Regional Payment Connectivity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RRH	Rata-Rata Harian
SBC	<i>Structured Bilateral Cooperation</i>
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBN	Surat Berharga Negara
SBV	State Bank of Vietnam
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
Simkrisnas	Simulasi Krisis Nasional
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	Standar Nasional <i>Open API</i>
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPIP	Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia
SP-PUR	Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSKI	Statistik Sistem Keuangan Indonesia
STP	Straight Through Processing

ISTILAH	PENJELASAN
<i>SupTech</i>	<i>Supervisory Technology</i>
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
TIKMI	Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi
ToT	<i>Training of Trainer</i>
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UE	Uang Elektronik
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
ULE	Uang Layak Edar
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UU	Undang-Undang
UU P2SK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VITAL	<i>Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning</i>
VF	<i>Volatile Food</i>
WB	World Bank
WTE	<i>Waste to Energy</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	<i>Year on Year</i>





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id